

p-ISSN: 2549-5658

e-ISSN: 2549-7243

AGREGAT

JURNAL EKONOMI & BISNIS

- Determinasi Tarif Retribusi Pasar Tradisional dengan Pendekatan Willingness To Pay Dan Perbandingan Harga Pasar**
Pitri Yandri Hal 306 - 323
- Stock Split dan Pengaruhnya Pada Return Saham**
Rr Tini Anggraeni, Akrim Hayata Hal 324 - 343
- Implementasi Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Kasus Desa Rawa Burung, Kabupaten Tangerang, Banten)**
Amrie Firmansyah Hal 344 - 353
- Kajian Model Empiris Minat Berwirausaha Siswa SMK di Kabupaten Garut**
Rijal Assidiq Mulyana Hal 354 - 365
- Persepsi Mahasiswa Akuntansi Terhadap Profesi Akuntan Publik**
Herlin Herlin, Marlinda Sari Hal 366 - 376
- Komponen Informasi dan Komunikasi Serta Pemantauan Atas Siklus Pengeluaran**
Hera Khairunnisa Hal 377 - 387
- Efek Moral Reasoning Terhadap Niat Auditor Internal Untuk Melakukan Whistleblowing**
Meita Larasati Hal 388 - 398
- Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP)**
Budiandru Budiandru, Shabrina Saufani Isfa Hal 399 - 411

AGREGAT

Jurnal Ekonomi dan Bisnis

Diterbitkan oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA. Jurnal berkala Ilmiah ini fokus dalam kajian ekonomi dan bisnis terbit dua kali dalam satu tahun (Maret dan September)

Editor In Chief

Edi Setiawan (Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA)

Managing Editor

Emaridial Ulza (Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA)

Associate Editors

Faizal Ridwan Zamzany (Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA)

Dewi Pudji Rahayu (Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA)

Novita Kusuma Maharani (Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA)

Hera Khairunnisa (Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA)

Meita Larasati (Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA)

Editorial Advisory Board

Sofia.L. Eremina (National Research Tomsk Polytechnic University, Rusia)

Selevich T.S. (National Research Tomsk Polytechnic University, Rusia)

Eko Suyono (Universitas Jendral Soedirman Purwokerto)

Erna Setiany (Universitas Mercu Buana)

Zuhairan Y. Yunan (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta)

M Nurianto Al Arif (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta)

Hikmah Endraswati (IAIN Salatiga)

Muchdie (Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA)

Sunarta (Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA)

Assistant to Editor

Prayoga Agasi

Elmy Nur Azizah

Alamat Redaksi

Gedung Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA

Jl. Raya Bogor KM 23. No. 99. Flyover. Pasar Rebo. Jakarta Timur 13830

Telp: 021-87796977, Fax: 021-87796977

Email: agregat@uhamka.ac.id

<http://journal.uhamka.ac.id/index.php/agregat/index>

DAFTAR ISI

- DETERMINASI TARIF RETRIBUSI PASAR TRADISIONAL DENGAN PENDEKATAN *WILLINGNESS TO PAY* DAN PERBANDINGAN HARGA PASAR**
Pitri Yandri Hal 306-323
- STOCK SPLIT* DAN PENGARUHNYA PADA *RETURN SAHAM***
Rr Tini Anggraeni, Akrim Hayata Hal 324-343
- IMPLEMENTASI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA (STUDI KASUS DESA RAWA BURUNG, KABUPATEN TANGERANG, BANTEN)**
Amrie Firmansyah Hal 344-353
- KAJIAN MODEL EMPIRIS MINAT BERWIRAUSAHA SISWA SMK DI KABUPATEN GARUT**
Rijal Assidiq Mulyana Hal 354-365
- PERSEPSI MAHASISWA AKUNTANSI TERHADAP PROFESI AKUNTAN PUBLIK**
Herlin Herlin, Marlinda Sari Hal 366-376
- KOMPONEN INFORMASI DAN KOMUNIKASI SERTA PEMANTAUAN ATAS SIKLUS PENGELUARAN**
Hera Khairunnisa Hal 377-387
- EFEK MORAL *REASONING* TERHADAP NIAT AUDITOR INTERNAL UNTUK MELAKUKAN *WHISTLEBLOWING***
Meita Larasati Hal 388-398
- STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN ENTITAS TANPA AKUNTABILITAS PUBLIK (SAK ETAP)**
Budiandru Budiandru, Shabrina Saufani Isfa Hal 399-411

DETERMINASI TARIF RETRIBUSI PASAR TRADISIONAL DENGAN PENDEKATAN *WILLINGNESS TO PAY* DAN PERBANDINGAN HARGA PASAR

Pitri Yandri

STIE Ahmad Dahlan Jakarta

E-mail: p.yandri@gmail.com

Diterima: 3 Juni 2018; Direvisi: 7 Juni 2018; Disetujui: 25 Juni 2018

Abstract

The new autonomous region is generally faced with the administrative adaptation problem. The adaptation is being implemented by South Tangerang Municipality. One of the adaptations is doing traditional market governance improvement to become better by setting the tariff of retribution. In theoretically, the approach to the determinate of tariff retribution can be analyzed by the variety of approaches. Two of the most widely used is the willingness to pay and market price comparative approach. Thus, this article will use those approaches to estimate traditional market tariff retribution. The results of the estimation and its elaboration are discussed further in this article

Keywords: *Decentralization, Modern Market, Tangerang Selatan, Suburban, New Autonomous Region, Contingent Valuation Method*

Abstrak

Daerah otonom baru umumnya berhadapan dengan masalah adaptasi administratif. Upaya adaptasi itu sedang dilakukan oleh Kota Tangerang Selatan. Salah satu adaptasi tersebut adalah melakukan perbaikan tata kelola pasar tradisional untuk menjadi lebih baik dengan menetapkan tarif retribusi. Secara teoritik, pendekatan penentuan tarif retribusi dapat dilakukan dengan berbagai pendekatan. Dua pendekatan yang paling banyak dilakukan adalah *willingness to pay* dan perbandingan harga pasar. Karena itu, artikel ini akan menggunakan dua pendekatan tersebut untuk mengestimasi besaran tarif retribusi pasar tradisional. Hasil pendugaan dan elaborasinya dibahas lebih jauh dalam artikel ini. **Kata Kunci:** Desentralisasi, Pasar Modern, Kota Tangerang Selatan, Suburban, Daerah Otonom Baru, *Contingent Valuation Method*

PENDAHULUAN

Sejak era otonomi, banyak daerah yang dimekarkan. Secara normatif, pemekaran tersebut dilakukan demi mencapai kesejahteraan masyarakat. Karena diyakini pemekaran daerah adalah satu-satunya jalan untuk memperpendek rantai birokrasi pelayanan publik dan mendekatkan pemerintah dengan masyarakat di daerah. Karena keyakinan itulah maka banyak daerah memekarkan diri dari kabupaten induknya dan membentuk daerah otonom baru. Namun demikian, problem rumit muncul tatkala daerah tersebut berhasil dimekarkan. Problem-problem tersebut antara lain problem administrasi pemerintahan, penataan *governance* untuk mencapai tata kelola yang baik, hingga masalah bagaimana sumber-sumber pendapatan daerah bisa dioptimalkan demi mencapai pembiayaan pembangunan untuk

melayani masyarakat di daerahnya (Khitam, 2014). Problem tersebut juga sedang dihadapi oleh Kota Tangerang Selatan. Kota Tangerang Selatan dikenal sebagai daerah otonom yang dimekarkan pada tahun 2008 berdasarkan UU. No. 51/2008 tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan di Provinsi Banten tertanggal 26 November 2008. Wilayah ini adalah wilayah suburban yang berada di pinggir DKI Jakarta. Batas wilayah Kota Tangerang Selatan adalah sebelah utara berbatasan dengan Provinsi DKI Jakarta dan Kota Tangerang; sebelah timur berbatasan dengan Provinsi DKI Jakarta dan Kota Depok; sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Bogor dan Kota Depok; dan sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Tangerang (Gambar 1).

Gambar 1. Peta Lokasi Kota Tangerang Selatan



Upaya menyediakan pelayanan publik bermutu bagi masyarakat, setiap daerah dituntut untuk dapat membiayai sendiri ongkos yang dikeluarkan untuk menyediakan fasilitas pelayanan. Semakin tinggi kemampuan daerah untuk membiayai sendiri pembangunannya, semakin baik pula tingkat kemandirian daerah tersebut.

Dalam konteks itulah pemerintah daerah ditantang mencari berbagai terobosan perbaikan dan peningkatan basis fiskal daerah (pajak daerah dan retribusi daerah). Peningkatan pos-pos pendapatan daerah, termasuk retribusi, dengan demikian menjadi penting untuk terus dilakukan. Dalam UU. No. 28/2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dijelaskan bahwa retribusi daerah dibagi menjadi tiga jenis, yaitu retribusi jasa umum; retribusi jasa usaha; retribusi perizinan tertentu.

Salah satu dari sekian banyak jenis retribusi yang diambil oleh pemerintah daerah adalah retribusi pasar. Retribusi pasar adalah “retribusi atas fasilitas pasar tradisional/ sederhana yang berupa pelataran atau los yang dikelola pemerintah daerah dan khusus disediakan untuk pedagang, tidak termasuk yang dikelola perusahaan daerah pasar (Prakosa,

2005). Dalam konteks pasar, Kota Tangerang Selatan telah memiliki 9 (Sembilan) pasar tradisional yaitu: Pasar Ciputat, Pasar Serpong, Pasar Ciputat Permai, Pasar Jombang, Pasar Bintaro Sektor 2, Pasar Jengkol, Pasar Gedung Hijau, Pasar Kita Pamulang, dan Pasar Gintung.

Secara legal formal, pelimpahan kewenangan tata kelola sebagian pasar tersebut baru diserahkan oleh kabupaten induk (Kabupaten Tangerang) pada tahun 2015; dan sisanya pada tahun 2016. Karena persoalan kelambanan pelimpahan hak kepemilikan aset itulah seluruh pasar tersebut masih dalam kondisi yang memprihatinkan hingga saat ini. Pengamatan terhadap kondisi fisik pasar menunjukkan, permasalahan pasar di Tangerang Selatan mencakup antara lain: tidak ada lahan parkir; pedagang kaki lima yang tumpah ke jalan; minimnya infrastruktur pasar seperti lantai rusak dan kotor, problem drainase/saluran air; becek dan banjir; penanganan limbah/sampah pasar yang lemah; dan lain sebagainya (Gambar 2a-2c).

Masalah sekuensial yang dimulai dari perannya sebagai daerah otonom baru, yang peran itu membutuhkan berbagai penyesuaian administratif, lalu hal tersebut

diikuti pula oleh persoalan mengadaptasi dan sekaligus memitigasi risiko sebagai daerah otonom baru. Hal tersebut mengakibatkan kebijakan publik yang ditempuh seakan berlomba dengan kecepatan ekspektasi masyarakat terhadap pemenuhan fasilitas pelayanan. Merespons hal tersebut, Pemerintah Kota Tangerang Selatan telah menggulirkan Perda No. 09/2014 tentang Retribusi Daerah. Pada periode yang sama, mereka juga telah

menyusun regulasi perpasaran yang termaktub dalam Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan No. 4/2014 tentang Penyelenggaraan Perizinan dan Pendaftaran Usaha Perindustrian dan Perdagangan. Adapun peraturan spesifiknya tercantum dalam Peraturan Walikota Tangerang Selatan No. 2/2013 tentang Petunjuk Teknis Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.

Gambar 2a. Situasi Lorong di Pasar Jombang
Gambar 2b. Situasi Drainase/Saluran Air di Pasar Ciputat Permai
Gambar 2c. Situasi Parkir Pasar Ciputat

Gambar 2a



Gambar 2b



Gambar 2c



Sumber: survey, 2017

Namun demikian, sejumlah regulasi itu dinilai masih belum dapat menjawab persoalan karena regulasi yang ada hanya mengatur hal-hal yang bersifat umum. Menurut Perda tersebut, retribusi pasar digolongkan ke dalam Retribusi Jasa

Usaha (pasal 3) karena dianggap sebagai salah satu komponen retribusi sebagai akibat dari pemakaian kekayaan daerah. Jadi dalam regulasi ini, pelaku usaha yang menggunakan fasilitas pada bangunan pasar dianggap sebagai pihak yang

menggunakan kekayaan daerah dan karenanya mereka wajib membayar sejumlah retribusi. Adapun besaran tarif retribusi tergantung dari luas lahan yang

mereka gunakan. Gambar di bawah ini adalah ilustrasi besaran tarif retribusi pasar di Tangerang Selatan.

Gambar 3. Ilustrasi Karcis Retribusi Pasar di Tangerang Selatan

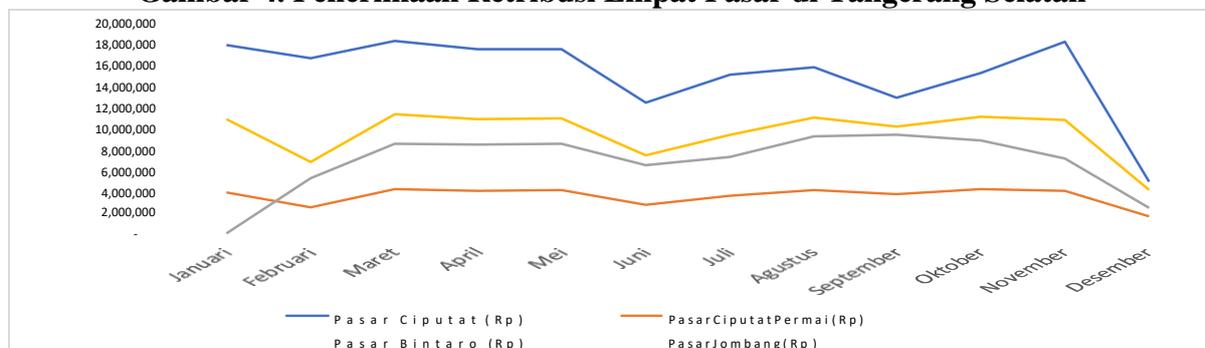


Sumber: survey, 2017

Karena belum jelasnya tata kelola pasar tradisional, maka persoalan lain yang dihadapi adalah: *pertama*, rendahnya penerimaan retribusi pasar. Data Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Tangerang Selatan menunjukkan, kontribusi retribusi pasar terhadap total retribusi daerah hanya berkisar 0,48%

pada tahun 2017. Pada tahun yang sama, total penerimaan retribusi pasar dari empat pasar yang ada hanya mencapai Rp. 429,922,213 (Gambar 4). *Kedua*, banyaknya pungutan ‘atas nama retribusi’ yang dilakukan oleh oknum tidak bertanggungjawab; dan hal ini berdampak pada kebocoran penerimaan retribusi.

Gambar 4. Penerimaan Retribusi Empat Pasar di Tangerang Selatan



Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Tangerang Selatan, diolah; 2017.
 Keterangan: data Pasar Ciputat Permai & Pasar Jombang sampai dengan 12 Desember 2017; data Pasar Ciputat dan Pasar Bintaro sampai dengan 8 Desember 2017.

Rendahnya penerimaan dari retribusi pasar ini telah menjadi gejala umum di hampir seluruh kabupaten/kota di Indonesia. Studi yang terkait dengan hal ini misalnya dilakukan oleh Megawati & Soejoto (2016) di Kab. Sidoarjo; Marselina (2013) di Kota Padang; dan Handoko (2012) di Kab. Pematang. Dalam upaya menjawab persoalan itu, penentuan tarif yang rasional dan proporsional menjadi penting dilakukan.

Kepastian tarif ini penting dari dua sisi sekaligus: dari sisi pemerintah, kepastian tarif akan dapat memberi kepastian berapa sesungguhnya potensi ekonomi tarif retribusi pasar yang dapat berkontribusi terhadap pendapatan asli daerah; dan dari sisi pelaku usaha: kepastian tarif akan memberi kepastian berapa harga (biaya) yang harus mereka keluarkan setiap bulan; kepastian tarif akan memberi kenyamanan berinvestasi bagi pelaku usaha. Lebih dari itu, memberi kepastian tarif retribusi juga berdampak

pada upaya pelestarian pasar tradisional sebagai rumah budaya (Basri *et al*, 2012); dan karenanya, eksistensimereka menjadi penting dalam konstelasi roda perekonomian (Putra & Rudito, 2015), terutama roda perekonomian daerah.

Apalagi dalam konteks daerah suburban yang banyak berdiri ritel minimarket secara massif (Smadja & Torre, 2017), mempertahankan keberadaan pasar tradisional dengan demikian menjadi kebijakan publik yang tak dapat ditawar-tawar lagi (Suryadarma *et al*, 2010).

METODE PENELITIAN

Desain penelitian menggunakan rancangan observasional. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik survey dengan instrumen kuesioner dan wawancara. Data yang digunakan adalah data primer. Teknik sampling yang digunakan adalah *purposive sampling*. Pasar yang akan diamati dan informasi jumlah responden sebagaimana tergambar dalam tabel di bawah ini.

Tabel 1. Distribusi Jumlah Sampel dan Pasar yang Diamati

Nama Pasar	Jumlah Responden (orang)	Teknik <i>Sampling</i> yang Digunakan
Pasar Ciputat	10	<i>Purposive Sampling</i>
Pasar Jombang	7	
Pasar Serpong	10	
Pasar Ciputat-Cimanggis	5	
Pasar Kita Pamulang	7	
Σ	39	

Berkenaan dengan jumlah sampel masyarakat, secara kuantitatif hal ini sesuai dengan Dalil Limit Pusat (*Central Limit Theorem*) yang menyatakan bahwa apabila X_1, X_2, \dots, X_n merupakan variabel acak dari populasi (dalam hal ini, distribusi probabilitas) manapun dengan rata-rata μ_x dan varians σ^2_x , maka rata-rata sampel cenderung terdistribusi secara normal dengan rata-rata μ_x dan varians $\frac{\sigma_x^2}{n}$ ketika ukuran sampel naik hingga tak terhingga. Jika X_i diasumsikan berasal dari populasi normal, maka rata-rata sampel akan mengikuti distribusi normal tanpa peduli terhadap ukuran sampel. Dalam praktiknya, terlepas distribusi probabilitas apapun yang mendasarinya, rata-rata sampel dari besaran sampel yang terdiri dari sekurang-kurangnya 30 observasi akan dijamin normal (Juanda, 2012).

Teknik analisis bagian ini terdiri dari 3 (tiga) bagian. *Pertama* adalah analisis nilai tengah (median) tarif retribusi yang bersedia dibayar oleh pengguna kios/lapak. Argumentasi penulis atas penggunaan formula ini adalah disebabkan nilai media adalah gambaran nilai yang paling moderat yang dapat diterima oleh pengguna kios/lapak di pasar. Formula standar nilai median untuk data ganjil (formula 4) dan

data genap (formula 5) adalah sebagai berikut.

$$Me = X_{\frac{n+1}{2}} \dots \dots \dots [4]$$

$$Me = \frac{1}{2} \left(X_{\left(\frac{n}{2}\right)} + X_{\left(\frac{n}{2} + 1\right)} \right) [5]$$

Kedua, selain menggunakan formula *median*, juga digunakan pendekatan kesediaan membayar (*willingness to pay/WTP*). Secara umum, nilai ekonomi didefinisikan sebagai pengukuran jumlah maksimum seseorang ingin mengorbankan barang dan jasa untuk memperoleh barang dan jasa lainnya. Secara formal, konsep ini disebut “keinginan membayar” (*willingness to pay*) seseorang terhadap barang dan jasa yang dihasilkan oleh pemerintah. Dengan menggunakan pengukuran ini, nilai barang dan jasa bisa “diterjemahkan” ke dalam bahasa ekonomi dengan mengukur nilai moneter barang dan jasa tersebut.

Keinginan membayar juga dapat diukur dalam bentuk kenaikan pendapatan yang menyebabkan seseorang berada dalam posisi *indifferent* terhadap perubahan eksogenus (faktor-faktor di luar yang bisa dikontrol). Perubahan ini bisa terjadi karena perubahan harga (misalnya akibat sumber daya makin langka) atau karena perubahan kualitas sumber daya.

Jadi WTP dapat diartikan sebagai jumlah maksimal seseorang mau membayar untuk menghindari terjadinya penurunan terhadap sesuatu.

Banyak faktor mempengaruhi keputusan masyarakat untuk menikmati layanan pemerintah, salah satunya adalah kemampuan atau daya belinya. Daya beli sangat terkait dengan pendapatan masyarakat dan tarif retribusi. Dalam ekonomi, permintaan masyarakat akan layanan pemerintah dapat diekspresikan dalam fungsi permintaan.

Fungsi permintaan adalah fungsi yang menunjukkan hubungan antara kuantitas layanan yang diinginkan masyarakat dengan tarif retribusi, pendapatan masyarakat, dan faktor lain. Ada dua cara yang dapat digunakan untuk mengestimasi fungsi permintaan, yaitu metode langsung dan metode tidak langsung. Metode langsung melibatkan konsumen dengan menanyakan secara langsung apa yang mereka lakukan jika terjadi perubahan dalam variabel tertentu.

Sedangkan metode tidak langsung dilakukan berdasarkan data yang telah dikumpulkan dan kemudian dilakukan upaya untuk menemukan hubungan-hubungan statistik antara variabel. Dalam tahap operasional penerapan pendekatan CVM terdapat 5 tahap kegiatan atau

proses. Tahapan tersebut adalah; Membuat hipotesis pasar, hipotesis pasar yang dibangun disini adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan ingin menentukan tarif retribusi pasar. Pada tahap ini konsultan membuat suatu kuesioner yang berisi informasi lengkap mengenai informasi harga (tarif) pasar bagi setiap pedagang/pengguna lapak dengan berdasar pada harga (tarif) retribusi di pasar yang dikelola oleh swasta; Mendapatkan nilai lelang (*bids*), tahap ini dilakukan dengan teknik survey langsung terhadap responden. Instrumen survey menggunakan kuesioner tertutup (model referendum) dengan jawaban “ya” dan “tidak”. Tujuan survey ini adalah untuk memperoleh nilai maksimum keinginan membayar (WTP) dari responden terhadap tarif retribusi; Menghitung rata-rata WTP, setelah survey dilakukan, tahap berikutnya adalah menghitung nilai rata-rata setiap individu. Nilai ini diperoleh dari hasil lelang tahap dua. Perhitungan nilai WTP dengan menggunakan *Contingent Valuation Method* digunakan pendekatan model logit.

Model diestimasi dengan menggunakan *Maximum Likelihood* dimana peluang seseorang untuk membayar retribusi diasumsikan merupakan fungsi dari variabel sosial-

ekonomi: jenis kelamin, pendapatan (*income*), dan kepuasan atas pelayanan pasar. Peluang menjawab ya = 1 (sanggup membayar) atau tidak = 0, ditentukan oleh persamaan regresi linier berikut ini:

$$P(Y=1) = P(u_i > -\alpha - \beta X_i) = 1 - F\left(\frac{-\alpha - \beta X_i}{\sigma}\right) \quad [6]$$

$$P(Y=0) = P(u_i \leq -\alpha - \beta X_i) = F\left(\frac{-\alpha - \beta X_i}{\sigma}\right) \quad [7]$$

Dimana koefisien α dan β adalah koefisien regresi dengan X adalah vektor variabel sosial-ekonomi (jenis kelamin, pendapatan/*income*, dan persepsi terhadap pelayanan fasilitas pasar). Pendugaan koefisien dilakukan dengan teknik *maximum likelihood* dengan fungsi sebagai berikut:

$$L = \prod_{Y_i=0} F\left(\frac{-\alpha - \beta X_i}{\sigma}\right) \prod_{Y_i=1} \left[1 - F\left(\frac{-\alpha - \beta X_i}{\sigma}\right)\right] \quad [8]$$

Dari pendugaan koefisien pada persamaan [8] kemudian akan diperoleh nilai rata-rata *willingness to pay (mean WTP)* yang menggambarkan nilai tarif retribusi. Memperkirakan kurva lelang (*Bid Curve*) Kurva lelang atau *bid curve* diperoleh dengan meregresikan WTP sebagai variabel tidak bebas (dependen variabel) dengan variabel bebas seperti jenis kelamin, pendapatan (*income*), dan persepsi terhadap fasilitas pelayanan pasar dengan model sebagai berikut:

$$W_i = f(I, S, P) \dots [9]$$

Model [9] ditransformasi ke logaritma (*log*) sehingga:

$$\begin{aligned} \text{LogWTP}_i &= \alpha_0 + \beta_1 \text{LogIncome}_i + \beta_2 \text{DummyGender} \\ &+ \beta_3 \text{DummyKepuasan} \\ &+ \varepsilon_i \dots [10] \end{aligned}$$

Mengagregatkan data, Tahap terakhir dari CVM adalah dengan mengagregatkan rata-rata lelang yang diperoleh pada tahap tiga. Proses ini melibatkan konversi data rata-rata sampel ke rata-rata populasi secara keseluruhan dengan rumus sebagai berikut:

$$\overline{W} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n W_i \dots [11]$$

Ketiga, Perbandingan harga pasar. Ada banyak layanan pemerintah yang banyak juga disediakan oleh swasta, seperti penyewaan ruangan, gedung, tanah, peralatan, dan lain sebagainya. Untuk kasus seperti ini, informasi harga pasar sewa bukan hal yang sulit didapatkan. Harga pasar sewa merupakan hasil dari tarik menarik antara permintaan dan penawaran pasar. Perbandingan harga pasar dapat dilakukan dengan melakukan survey terhadap barang/jasa sejenis. Dalam konteks pungutan retribusi, perbandingan harga pasar akan dilakukan terhadap pasar yang dikelola oleh swasta di Tangerang Selatan.

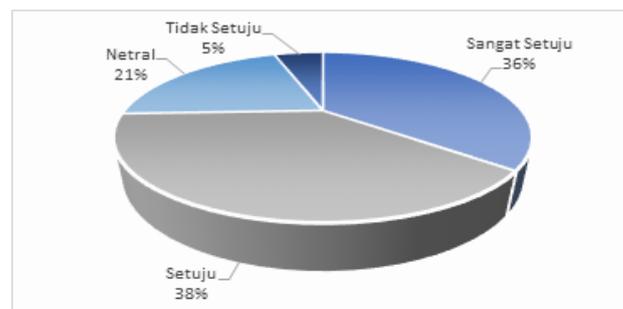
HASIL DAN PEMBAHASAN

Secara teori, kesediaan membayar (*willingness to pay*) sangat erat kaitannya dengan pendapatan dan pelayanan yang diterima oleh seseorang. Dengan kata lain, kesediaan membayar seseorang adalah fungsi dari pendapatan dan kepuasan atas pelayanan yang diberikan.

Sebelum melakukan pendugaan dengan peralatan statistika, berikut ini adalah hasil jajak pendapat kepada pengguna kios/lapak tentang kesediaan membayar mereka. Informasi pada Gambar 5 menjelaskan pendapat responden tentang revitalisasi pasar. Sebanyak 38% pengguna kios/lapak

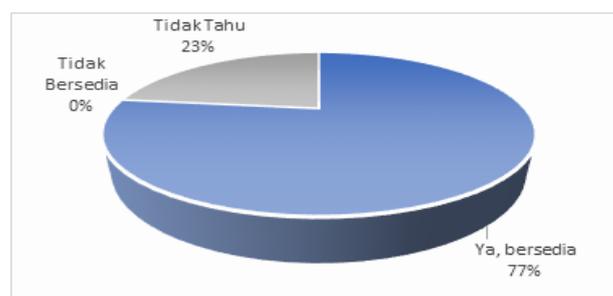
menyatakan setuju bahwa pasar perlu direvitalisasi dalam upaya menghasilkan fasilitas pelayanan yang lebih baik. Bahkan sebanyak 36% pengguna kios/lapak menyatakan sangat setuju jika pasar direvitalisasi. Selebihnya sebesar 21% pengguna kios/lapak menyatakan netral dan 5% pengguna menyatakan ketidaksetujuannya. Informasi ini sesungguhnya mengindikasikan bahwa terdapat ekspektasi [harapan] dari para pengguna kios/lapak bahwa pasar dapat direvitalisasi di masa mendatang.

Gambar 5. Pendapat Responden tentang Revitalisasi Fasilitas Pasar



Sumber: survey, diolah; 2017

Gambar 6. Pendapat Responden tentang Kesediaan Membayar Retribusi Jika Fasilitas Pasar Bermutu

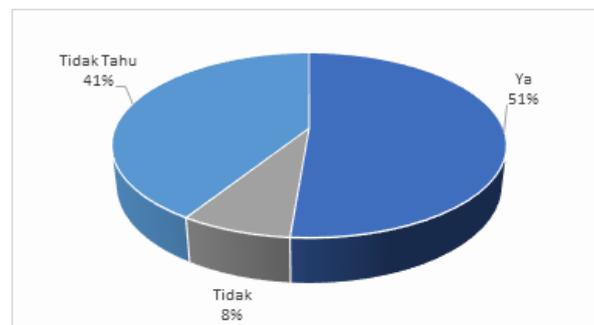


Sumber: survey, diolah; 2017

Gambar 6 menjelaskan situasi kesediaan membayar para pengguna kios/lapak. Sebanyak 77% pengguna menyatakan bersedia jika fasilitas pasar bermutu. Sebanyak 23% responden menyatakan tidak tahu. Hasil jajak pendapat ini

menyirat makna bahwa pengguna bisa memahami keterkaitan "mutu sebuah produk" dengan harga yang harus mereka bayar. Hasil ini relevan dengan studi yang dilakukan Wang *et al* (2016) di Korea Selatan.

Gambar 7. Kesediaan Responden Membayar Retribusi Lebih Tinggi Jika Fasilitas Pasar Direvitalisasi



Sumber: survey, diolah; 2017

Lebih dari itu, pengguna bersedia membayar retribusi lebih tinggi jika pasar direvitalisasi. Sebanyak 51% pengguna kios/lapak menyatakan persetujuannya, 41% pengguna menjawab tidak tahu, dan sisanya sebesar 8% pengguna menjawab tidak bersedia. Informasi ini menjadi salah satu dasar pengambilan kebijakan bagi Dinas Perindustrian dan Perdagangan, terutama dalam menentukan besaran tarif retribusi di masa mendatang.

Dengan menggunakan persamaan [10] dalam Bab IV, diperoleh pendugaan kesediaan membayar [WTP] pengguna

kios/lapak dalam membayar retribusi. Tanda koefisien yang diharapkan adalah $\beta_1 > 0$; $\beta_2 > 0$; dan $\beta_3 > 0$. Pendekatan yang dilakukan adalah *ordinary least square* dengan model $Y_t = \alpha + \beta_1 X_t + \varepsilon$ untuk $t = 1, 2, \dots, i$.

Dengan asumsi sebagai berikut (Juanda, 2009); Hubungan antara Y dan X adalah linear dalam parameter; Nilai X tetap untuk observasi yang ber-ulang-ulang (*non-stochastic*).

Karena variabel X-nya lebih dari satu, maka tidak ada multikolinieritas antara X_1 , X_2 , dan X_n ; Nilai harapan (*expected*

value) atau rata-rata dari variabel gangguan e_i adalah nol atau $E(e | X_i) = 0$; Varians dari variabel gangguan e_i adalah sama (*homoskedastisitas*)

$$Var(e_i | X_i) = E[e_i - E(e_i | X_i)]^2 = E(e_i^2 | X_i) = \sigma^2$$

Tidak ada serial korelasi antara variabel gangguan e_i , atau variabel gangguan e_i tidak saling berhubungan dengan variabel

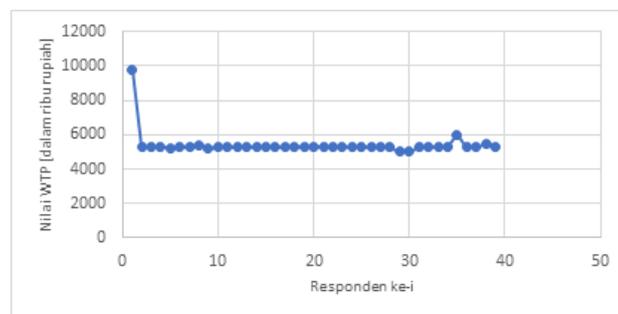
gangguan e_i yang lain

$$Cov(e_i, e_j | X_i, X_j) = E[(e_i - E(e_i | X_i))(e_j - E(e_j | X_j))] = E(e_i | X_i)E(e_j | X_j) = 0$$

Variabel gangguan e_i berdistribusi normal

$$e \sim N(0, \sigma^2)$$

Gambar 8. Kurva Kesiediaan Membayar Tarif Retribusi



Sumber: data diolah, 2017

Hasil pendugaan awal menghasilkan nilai-nilai sebagaimana tersaji dalam Tabel 2. Tabel ini menginformasikan bahwa hasil pendugaan terhadap variabel-variabel dalam model regresi tidak sesuai prinsip-prinsip ekonometrika sebagaimana disebut dalam Juanda (2009) di atas. Hal tersebut terlihat dari variabel *dummy* jenis kelamin [D_Gender) dan kepuasan terhadap pelayanan pasar [D_Kepuasan]. Nilai p-

value sebagai tolok ukur pengambilan keputusan menunjukkan hasil yang tidak signifikan. Rekomendasi teori statistik untuk menyiasati hal tersebut adalah dengan membuang variabel-variabel yang tidak signifikan. Prosedur tersebut mengisyaratkan bahwa perlunya menguji kembali model regresi. Hasil pengujian dan pendugaan setelah membuang variabel yang tidak signifikan tersaji dalam Tabel 3.

Tabel 2. Hasil Pendugaan Awal Nilai Regresi Kesiediaan Membayar Retribusi

Variabel	Simpangan Baku	Koefisien	t-hitung	P-Value	Varians Inflation	Keterangan
----------	----------------	-----------	----------	---------	-------------------	------------

	Factor					
Konstanta	0,212	3,264	15,42	0,000	--	--
LogIncome	0,0358	0,0787	2,20	0,035	1,02	Signifikan
D_Gender	0,0143	0,0006	0,04	0,967	1,02	Tidak signifikan
D_Kepuasan	0,0142	0,0119	0,84	0,407	1,02	Tidak signifikan
R ²	14,45%					
R ² Adj	6,90%					
Durbin Watson [DW]	1,072					

Sumber: data diolah; 2017

Tabel 3. Hasil Pendugaan Nilai Regresi Kesiediaan Membayar Retribusi

Variabel	Simpangan Baku	Koefisien	t-hitung	P-Value	Varians Inflation Factor	Keterangan
Konstanta	0,198	3,314	16,77	0,000	--	--
LogIncome	0,0334	0,0709	2,12	0,041	1,00	Signifikan
R ²	10,84%					
R ² Adj	8,43%					
Durbin Watson [DW]	1,07997					

Sumber: data diolah; 2017

Hasil pengujian dan pendugaan pada Tabel 3 menginformasikan bahwa model regresi telah signifikan sebagai dasar pengambilan keputusan.

Sehingga persamaan WTP retribusi dapat ditulis sebagai berikut: $\text{LogWTP} = 3.314 + 0.0709 \text{ LogI}$. Di mana WTP adalah kesiediaan membayar, dan I adalah pendapatan (*Income*) pengguna kios/lapak. Dugaan koefisien pendapatan (*income*)

terhadap WTP adalah positif. Nilai koefisien menunjukkan 0,0709 (7,1%).

Nilai ini memiliki arti setiap perubahan (peningkatan) pendapatan sebesar 1% pengguna kios/lapak akan meningkatkan probabilitas kesiediaan membayar retribusi sebesar 7,1%. Variabel pendapatan (I) dalam model regresi ini mampu menjawab keragaman kesiediaan membayar (R²) sebesar 10,8%; dan 89,2% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak

dimasukkan ke dalam model. Hasil ini memberi informasi bahwa sesungguhnya terdapat hubungan kausatif yang nyata antara peningkatan pendapatan pengguna kios/lapak dengan kesediaan mereka dalam membayar retribusi. Semakin tinggi pendapatan mereka, semakin tinggi pula kemungkinan mereka mampu dan bersedia membayar retribusi. Hasil ini menjadi justifikasi bagi Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam mengambil kebijakan peningkatan tarif retribusi di masa mendatang. Adapun besaran tarif retribusi menurut hasil jajak pendapat tersaji dalam Tabel 4.

Tabel 4 menginformasikan nilai rata-rata besaran tarif retribusi yang bersedia dibayar oleh para pengguna kios/lapak adalah Rp. 5.440 per hari; dengan nilai tengah (*median*) harga yang bersedia mereka bayar adalah Rp. 5.250/hari. Rekomendasi konsultan atas temuan ini adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan dapat mengambil kebijakan tarif berdasarkan dengan nilai tengah (*median*) yang bersedia pengguna kios/lapak bayar karena nilai tengah menggambarkan nilai paling moderat ketimbang nilai rata-rata.

Tabel 4. Rata-Rata Besaran Retribusi yang Bersedia dibayar oleh Pengguna Kios/Lapak

No	Komponen	Jumlah [Rp]/hari
1	Rata-Rata harga retribusi yang bersedia dibayar pengguna kios/lapak	5.440
2	Nilai tengah harga retribusi yang bersedia dibayar pengguna kios/lapak	5.250
3	Harga lain-lain*	
	a. Kebersihan	3.500
	b. Keamanan	3.000
	c. Listrik	3.000
Σ^{**}		14.750

Sumber: data diolah; 2017; Keterangan: [*] harga eksisting yang dipungut saat ini; [**] menggunakan nilai tengah

Selanjutnya, hasil survey lapangan menunjukkan bahwa pengguna kios/lapak dikenakan pungutan lain selain dari

retribusi, yaitu uang kebersihan, uang listrik, dan uang keamanan. Karena itu, jika diagregasi (ditotal) harga retribusi

yang harus dibayar oleh pengguna adalah sebesar Rp. 14.750/hari. Penentuan tarif retribusi juga dilakukan dengan metode perbandingan harga pasar. Pasar yang menjadi alat perbandingan adalah Pasar Modern Bintaro yang berlokasi di Jalan Tegal Rotan Raya No.2, Pondok Jaya,

Pondok Aren, Pd. Jaya, Pd. Aren, Kota Tangerang Selatan. Hasil survey yang penulis dengan teknik wawancara terhadap pedagang yang terdapat di Pasar Modern Bintaro menghasilkan informasi yang tersaji dalam Tabel 5.

Gambar 9. Pasar Modern Bintaro



Sumber: survey, 2017

Tabel 5. Harga/Tarif Retribusi di Pasar Modern Bintaro

Jenis Lapak	Tarif per Bulan [Rp]
Lapak/los sayur	1.000.000 – 1.300.000
Lapak/los ikan	2.500.000
Kios	3.750.000

Sumber: survey, 2017

Jika dibandingkan dengan tarif retribusi di Pasar Modern Bintaro, tentu harga/tarif retribusi pasar tradisional yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Tangerang

Selatan jauh lebih murah. Informasi pada Tabel 27 dan 28 kemudian dapat dihitung perbandingan harga pasarnya sebagaimana tersaji dalam tabel berikut.

Tabel 6. Perbandingan Tarif Retribusi Pasar yang Dimiliki Swasta dan Pemerintah Kota Tangerang Selatan

Jenis Pasar Berdasarkan Kepemilikan	Jumlah Tarif [Rp] per Hari
-------------------------------------	----------------------------

Pasar tradisional yang Dimiliki Pemerintah Kota Tangerang Selatan	14.750
Pasar yang Dimiliki Swasta*	53.333

Sumber: [*] survey; data diolah, 2017; Keterangan: [*] berdasarkan nilai rata-rata lapak/los sayur dan ikan

Pada Tabel 6 terbaca bahwa tarif retribusi pada pasar tradisional yang dimiliki pemerintah lebih murah dibandingkan dengan tarif retribusi pada pasar yang dimiliki oleh swasta. Dengan memperhatikan data tersebut, maka sesungguhnya, penentuan tarif retribusi sebesar Rp. 14.750/hari pada pasar tradisional yang dimiliki Pemerintah Kota Tangerang Selatan masih sangat layak untuk diterapkan. Namun demikian, tarif tersebut tentu memiliki prasyarat yang harus dipenuhi, yaitu: (1) fasilitas pasar bermutu; dan (2) sistem *governance* pasar terkelola dengan baik.

Menurut Sulistyio & Cahyono (2010), dalam upaya mewujudkan peningkatan kontribusi pasar terhadap PAD, pasar-pasar tradisional harus dibuat lebih modern dahulu untuk menuju pasar yang sehat dan bisa berkontribusi pada perekonomian daerah. Dengan kata lain, tindakan revitaliasi menjadi agenda pertama yang harus diselesaikan (Paramita, 2010).

SIMPULAN

Hasil jajak pendapat terhadap pengguna kios/lapak menunjukkan bahwa sejatinya

mereka bersedia membayar retribusi lebih tinggi jika pasar dapat direvitalisasi dan diberi fasilitas yang bermutu. Hasil uji statistika terhadap kesediaan membayar mereka [*willingness to pay*] menunjukkan, terdapat hubungan kausal yang nyata antara peningkatan pendapatan yang mereka terima dengan kesediaan membayar retribusi. Hasil uji model regresi mengonfirmasi, peningkatan pendapatan pengguna kios/lapak sebesar 1% akan meningkatkan probabilitas kesediaan membayar retribusi sebesar 7,1%. Dengan kalimat yang lain, semakin tinggi pendapatan mereka, semakin tinggi pula kemungkinan mereka mampu dan bersedia membayar retribusi. Hasil ini menjadi justifikasi bagi Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam mengambil kebijakan peningkatan tarif retribusi di masa mendatang.

Hasil kalkulasi juga menunjukkan, nilai retribusi yang bersedia mereka bayar berkisar pada harga Rp. 14.750 per hari. Harga ini telah termasuk di dalamnya uang kebersihan, uang listrik, dan uang keamanan. Dengan menguji validitas

perbandingan harga tersebut pada pasar yang dikelola swasta, harga sebesar Rp. 14.750 per hari masih jauh di bawah harga pungutan retribusi pasar yang dikelola swasta, yaitu sebesar Rp. 53.333 per hari. Dengan memperhatikan hasil tersebut, maka sesungguhnya, penentuan tarif retribusi sebesar Rp. 14.750/hari pada pasar tradisional yang dimiliki Pemerintah Kota Tangerang Selatan masih sangat layak untuk diterapkan dengan prakondisi sebagai berikut: (1) fasilitas pasar bermutu; dan (2) sistem *governance* pasar terkelola dengan baik.

REFERENSI

- Basri, M.C., *et al*, (2012), *Rumah Ekonomi Rumah Budaya: Membaca Kebijakan Perdagangan Indonesia*, Jakarta: Penerbit Gramedia.
- Firmanzah, R.E., & Halim, (2012), *Strategi Revitalisasi Pasar Tradisional*, dalam Basri, M.C., *et al*, (2012), *Rumah Ekonomi Rumah Budaya: Membaca Kebijakan Perdagangan Indonesia*, Jakarta: Penerbit Gramedia
- Haidar, J.I., (2012), The Impact of Business Regulatory Reforms on Economic Growth, *Journal of the Japanese and International Economies*, 26 (2012): 285-307.
- Handoko, A.T., (2012), Analisis Perkembangan Retribusi Pasar Daerah sebagai Sumber Pembiayaan Otonomi Daerah di Kab. Pematang Tahun 2007-2011, *Economics Development Analysis Journal*, 1 (2) (2012): 1-7.
- Juanda, B., (2009), *Ekonometrika: Pemodelan dan Pendugaan*, IPB Press, Bogor.
- ., (2012), *Metodologi Penelitian Ekonomi dan Bisnis*, Bogor: IPB Press.
- Juliarta, I.M.G., & Darsana, I.B., (2015), Analisis Efektivitas Revitalisasi Pasar Tradisional Dan Dampaknya Terhadap Pengelolaan Pasar, Jumlah Pengunjung Dan Pendapatan Pedagang. *E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana*. Vol. 5, No. 1 138-166.
- Khitam, M.C., (2014), Pelayanan Publik di Daerah Otonom Baru (Studi Pelayanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan), *Jurnal EKBIS*, Vol. XI/ No. 2, Juli 2014: 553-567.
- Marselina, E., (2013), Analisis Kontribusi Pajak Parkir dan Retribusi Pasar terhadap Pendapatan Asli Daerah pada Pemerintah Kota Padang,

- Jurnal Akuntansi*, Vol. 1, No. 1: 1-25.
- Masitha, A.I., (2010), Dampak Sosial Ekonomi Revitalisasi Pasar Tradisional terhadap Pedagang, *Jurnal Sosek Pekerjaan Umum*, Vol. 2, No. 1, April 2010: 41-55.
- Megawati, N.A., & Soejoto, A., (2016), Kontribusi Retribusi Pasar terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sidoarjo, *Jurnal Pendidikan Ekonomi*, Vol. 4, No. 3: 1-10.
- Paramita, A.A. *et al.*, (2013). Efektivitas Dan Dampak Program Revitalisasi Pasar Tradisional Di Pasar Agung Peninjoan. *E-Jurnal EP Unud*, 2 (5) 233-243 ISSN: 2303-0178.
- Prakosa, K.B., (2005), *Pajak dan Retribusi Daerah*, Yogyakarta: UII Press
- Putra, R.D.D., & Rudito, B., (2015), Planning Community Development Program of Limbangan Traditional Market Revitalization with Social Mapping, *Procedia-Social and Behavioral Sciences*, 169 (2015): 143-150.
- Saragih, J.P. (2002). *Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah dalam Otonomi*. Jakarta: Penerbit Ghalia.
- Smadja, O.P., & Torre, A., (2017), Retail decentralization and land use regulation policies in suburban and rural communities: The case of the Ile-de-France region, *Habitat International* xxx(2017): 1-12.
- Sugianto. (2008). *Pajak dan Retribusi Daerah (Pengelolaan Pemerintah Daerah Dalam Aspek Keuangan, Pajak dan Retribusi Daerah)*. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana.
- Sulistyo, H., & Cahyono, B. (2010) Model Pengembangan Pasar Tradisional Menuju Pasar Sehat di Kota Semarang. *Jurnal EKOBIS* Vol.11, No.2, Juli 2010 : 516 – 526.
- Suryadarma, D., Poesoro, A., Akhmadi, Budiyati, S., Rosfadhila, M., Surhayadi, A., (2010), Traditional Food Traders in Developing Countries and Competition from Supermarket: Evidence from Indonesia, *Food Policy*, 35 (2010): 79-86.
- Wang, H., Kim, K.H., Ko, E., Liu, H., (2016), Relationship Between Service Quality and in Customer Equity Traditional Markets, *Journal of Business Research*, xxx (2016): xxx-xxx.

STOCK SPLIT DAN PENGARUHNYA PADA RETURN SAHAM

Rr Tini Anggraeni¹, Akrim Hayata²

¹²UIN Syarif Hidayatullah

tinianggraeni@uinjkt.ac.id, akrim.movers@gmail.com

Diterima: 3 Juni 2018; Direvisi: 7 Juni 2018; Disetujui: 25 Juni 2018

Abstract

This study aims to determine the effect of the stock split on the Return of each company's stock. The sample using 6 companies that conduct stock split corporation activity, recorded in Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) consistently during period 2012-2016 and once joined in Jakarta Islamic Index (JII). This study uses multiple regression analysis as a tool of analysis. The result of the analysis shows that simultaneously Return On Assets (ROA), Total Assets Turnover (TATO), Earning Per Share (EPS) and Price Earning Ratio (PER) produces significant influence only on ASII and TLKM stock. Partially, Price Earning Ratio (PER) variable gives significant effect to ASII, SCMA, and TLKM stock returns. While the variable Earning Per Share (EPS) produces a significant influence on ICBP stock returns.

Keywords: Financial performance, Stock Split, Stock Return, ROA, TATO, EPS, and PER.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh pemecahan saham terhadap Return saham pada 6 perusahaan yang melakukan aktivitas korporasi *stock split* yang tercatat dalam Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) secara konsisten selama periode 2012-2016 dan pernah tergabung dalam *Jakarta Islamic Index* (JII). Kinerja keuangan dalam penelitian ini diukur menggunakan rasio *Return On Assets* (ROA), *Total Assets Turnover* (TATO), *Earning Per Share* (EPS) dan *Price Earning Ratio* (PER). Penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda sebagai alat analisis. Hasil analisis menunjukkan bahwa secara simultan variabel *Return On Assets* (ROA), *Total Assets Turnover* (TATO), *Earning Per Share* (EPS) dan *Price Earning Ratio* (PER) memiliki pengaruh yang signifikan hanya pada saham ASII dan TLKM. Secara parsial, variabel *Price Earning Ratio* (PER) secara signifikan mempengaruhi variabel Return saham ASII, SCMA dan TLKM. Sedangkan variabel *Earning Per Share* (EPS) secara signifikan mempengaruhi variabel Return saham ICBP.

Kata kunci: Kinerja Keuangan, *Stock Split*, Return Saham, ROA, TATO, EPS, dan PER.

PENDAHULUAN

Aktivitas investasi yang dilakukan khususnya di pasar modal tidak lain adalah untuk mendapatkan keuntungan di masa yang akan datang atas dana yang ditanamkannya saat ini. Seorang investor bahkan bersedia untuk meninggalkan keuntungan yang bisa didapatkan saat ini untuk memaksimalkan keuntungan dimasa depan. Sedangkan motivasi tiap investor bisa berbeda antara yang satu dengan yang lain. Mulai dari sekedar mendapatkan tambahan penghasilan dan mengamankan uang agar nilainya tidak berkurang akibat inflasi hingga tujuan yang lebih besar seperti untuk dana pensiun ataupun dana pendidikan.

Seluruh aktivitas investasi di pasar modal diatur dan diawasi oleh bursa efek seperti yang tercantum didalam undang-undang tentang pasar modal yaitu UU No. 8 tahun 1995. Pembuatan undang-undang jelas bertujuan untuk melindungi semua pihak yang terkait dengan pasar modal terutama para investor dalam bertransaksi. Perusahaan yang terdaftar di bursa efek terus diawasi dan pihak perusahaan diharuskan untuk memberikan laporan secara berkala terkait dengan kinerja perusahaan selama masih terdaftar. Adanya keterbukaan dalam informasi tentang perusahaan serta lembaga

perantara dalam kegiatan investasi yaitu sekuritas, memudahkan para investor dalam membuat keputusan investasi.

Keuntungan tidak dapat dipisahkan dengan kemungkinan kerugian atau risiko yang bisa terjadi kapan pun, dengan kata lain seorang investor harus bersedia untuk menanggung risiko yang akan terjadi (Divisi Edukasi Bursa Efek Indonesia, 2014). Semakin tinggi keuntungan yang ingin diraih semakin besar pula risiko yang harus ditanggung. Kerugian atau risiko yang bisa terjadi pada seorang investor dalam penanaman modalnya dalam bentuk saham adalah penurunan harga saham atau dengan kata lain *capital loss*. Sedangkan berkaitan dengan dividen yang dibagikan, adanya kemungkinan tidak dibagikan oleh perusahaan, baik itu dikarenakan penggunaan dana untuk investasi pada aktiva tetap ataupun penambahan modal untuk ekspansi perusahaan.

Secara umum, ada dua jenis analisis dalam menerjemahkan perubahan harga saham perusahaan. Pertama, analisis teknikal. Analisis ini berfokus pada pergerakan harga saham baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang dan digunakan untuk mengetahui kapan investor harus membeli, menjual ataupun keluar dari perdagangan saham untuk membatasi kerugian yang akan terjadi.

Kedua, analisis fundamental. Informasi pada laporan keuangan sangat dibutuhkan untuk analisis fundamental, dikarenakan analisis ini mengkaji kinerja perusahaan kedepannya melalui data historis yang terkandung di dalam laporan keuangan dan juga bertujuan untuk mengetahui alasan dibalik perubahan harga saham (May, 2011).

Analisis-*analisis* fundamental mempertimbangkan semua faktor-faktor yang mempengaruhi harga pasar sebuah saham dengan tujuan untuk menentukan nilai intrinsik saham tersebut. Nilai intrinsik ini mencerminkan hukum permintaan dan penawaran saham yang dianalisis. Besar kecilnya nilai intrinsik menjadi pertimbangan keputusan investor untuk membeli saham. Dikatakan *overpriced* jika nilai intrinsik lebih kecil dibandingkan dengan harga sahamnya dan sebaliknya, saham *undervalued* jika nilai intrinsiknya lebih besar (Murphy, 1999). Kondisi saham yang *undervalued* bisa dikatakan bahwa pasar belum merespon nilai yang sebenarnya dari saham itu, kemungkinan pada periode sebelumnya kondisi perusahaan sedang tidak baik atau hanya dapat menghasilkan laba yang sedikit. Nilai intrinsik dapat mewakili nilai perusahaan secara keseluruhan, karena

disamping modal dan laba bersih masih banyak indikator yang mempengaruhi besar kecilnya nilai intrinsik perusahaan. Sehingga penilaian nilai intrinsik sangat besar kemungkinan bersifat subjektif tergantung siapa yang menilai dan perusahaan apa yang dinilai.

Investasi dipasar modal erat kaitannya dengan pengembalian atau keuntungan yang besar, dengan syarat perusahaan yang di danai harus memiliki kinerja perusahaan yang baik, terutama kinerja keuangannya. Baik tidaknya kinerja keuangan suatu perusahaan dapat diamati melalui laporan keuangan yang secara berkala dilaporkan. Laporan keuangan perusahaan bukan semata-mata dibuat untuk kepentingan pihak eksternal, perusahaan juga memerlukan laporan keuangan untuk mengamati perkembangan dan kinerjanya sendiri. Hal ini untuk memastikan keadaan perusahaan terkendali, stabil dan tentu saja dapat menghasilkan laba dari kegiatan operasional. Pembuatan laporan keuangan dibedakan antara laporan keuangan internal dan laporan keuangan yang di publikasi secara umum kepada masyarakat. Laporan internal dibuat tiap tiga bulan atau enam bulan sekali, sedangkan laporan yang lebih detail dibuat setahun sekali (Kasmir, 2012), Informasi

yang terdapat pada laporan keuangan berbentuk angka-angka yang menggambarkan kondisi dan perubahan kinerja keuangan perusahaan.

Evaluasi kondisi keuangan perusahaan diperlukan untuk melihat seberapa besar perkembangan perusahaan dalam operasionalnya atau bahkan evaluasi ini bertujuan untuk memperbaiki kinerja keuangan perusahaan yang sebelumnya mengalami kerugian. Alat yang digunakan untuk menggambarkan kondisi dan kinerja keuangan perusahaan adalah Rasio Keuangan. Penggunaan rasio keuangan yaitu dengan cara membandingkan suatu angka pada bagian laporan keuangan dengan angka pada bagian lain. Hasil yang diperoleh dari analisis rasio keuangan lebih dapat mewakili kondisi perusahaan dibandingkan dengan angka-angka aslinya sendiri (Horne, *et.all*, 2008). Terlebih lagi, hasil ini digunakan untuk menilai kinerja manajemen dalam suatu periode apakah mencapai target seperti yang telah ditetapkan atau sebaliknya. Disamping itu, juga untuk menilai kemampuan manajemen dalam memberdayakan sumber daya perusahaan (aset) secara efektif dan efisien (Kasmir, 2010).

Selain kinerja keuangan, harga saham juga mempengaruhi investor maupun calon investor dalam mengambil keputusan

investasi. Tingkat harga saham menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi permintaan dan penawaran akan suatu saham. Kebanyakan perusahaan tidak akan cenderung menetapkan harga terlalu rendah, sedangkan harga yang terlalu tinggi juga akan menjatuhkan penawaran saham tersebut (Deitiana, 2011).

Tingginya harga saham akan mengurangi kemampuan para investor untuk membeli saham tersebut. Hukum permintaan dan penawaran kembali akan berlaku ketika harga saham sudah mencapai tingkat tertinggi, akibatnya harga saham akan turun kembali pada posisi keseimbangan yang baru. Saham dengan harga yang sangat tinggi membuat investor dengan modal kecil tidak dapat berpartisipasi dalam transaksi, hal ini berdampak pada berkurangnya likuiditas saham sehingga saham perusahaan terlihat kurang menarik bagi investor. Cara yang dilakukan oleh emiten untuk mempertahankan agar sahamnya tetap berada dalam rentang perdagangan yang optimal sehingga daya beli investor meningkat, terutama untuk investor kecil, yaitu dengan melakukan pemecahan saham.

Pemecahan saham atau *stock split* adalah meningkatkan jumlah saham yang beredar akan tetapi tidak merubah

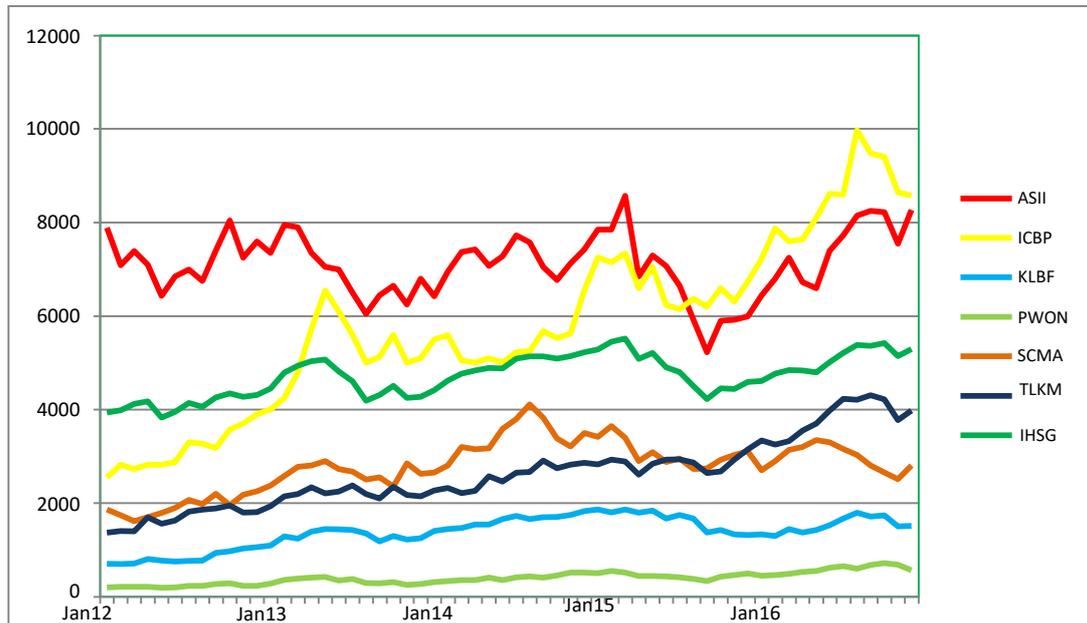
besarnya modal. Secara teoritis, pemegang saham tidak secara langsung merasakan manfaat yang nyata dengan adanya *stock split*, sementara ada biaya yang harus ditanggung emiten untuk melakukannya (Baker, *et.all*, 1980). Berkaitan dengan biaya yang harus dikeluarkan oleh emiten, laba ditahan digunakan untuk membiayai kegiatan ini. Hal ini berdampak pada dividen yang kemungkinan diterima oleh para investor, lebih sedikit bahkan tidak sama sekali.

Berkaitan dengan *stock split* atau pemecahan saham, setidaknya ada dua hipotesis yang digunakan untuk menjelaskan pengaruhnya terhadap perdagangan saham yaitu *signaling hypothesis* dan *trading range hypothesis*. Berdasarkan *signaling hypothesis*, pasar menanggapi pengumuman pemecahan saham sebagai peningkatan profitabilitas atau dengan kata lain, dividen saham tersebut akan segera meningkat.

Menurut Litner (Litner, 1956), perusahaan lebih memilih untuk tidak mengurangi dividen, maka *stock split* menjadi sinyal dari direksi perusahaan kepada pasar, bahwa laba masa depan akan cukup untuk mempertahankan pembayaran dividen pada tingkat yang lebih tinggi dari

yang sebelumnya. Jika pasar menanggapi positif sinyal dari direksi ini, maka kemungkinan harga saham akan meningkat setelah adanya pengumuman *stock split* (Fama, 1969). Sedangkan *trading range hypothesis* menyatakan bahwa perusahaan memecah saham hingga mencapai tingkat (harga) tertentu dan likuiditas perdagangan yang optimal. Manajemen menggunakan informasi perusahaan yang bersifat privat dalam menentukan faktor pemecah dan juga prediksi laba pada masa yang akan datang (Mcnichols, *et.all*, 1989). Laba pada masa depan menjadi sangat penting, terkait dengan *signaling hypothesis* yang telah disebutkan sebelumnya.

Dari periode pengamatan dari tahun 2012-2016, saham-saham yang melakukan aktivitas *stock split* dan masuk dalam Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) adalah saham Astra International, Tbk (ASII), Indofood CBP Sukses Makmur Tbk (ICBP), Kalbe Farma Tbk (KLBF), Pakuwon Jati Tbk (PWON), Surya Citra Media Tbk (SCMA) dan Telekomunikasi Indonesia Tbk (TLKM). Berikut adalah grafik pergerakan harga saham yang melakukan aksi *stock split* dikomparasikan dengan total pergerakan IHSG secara keseluruhan.

Gambar 1. Pergerakan Harga Penutupan Saham Perusahaan dan IHSG

(Sumber : BEI, data diolah dari Ringkasan Kinerja Perusahaan)

IHSG sebagai cerminan pergerakan seluruh harga saham dibursa. Semakin besar kapitalisasi pasar atau jumlah saham yang beredar dari sebuah perusahaan maka kemungkinan IHSG mengikuti pola pergerakan saham tersebut semakin besar, begitu pula sebaliknya.

Saham ASII dan TLKM memiliki kapitalisasi yang besar di bandingkan ke empat saham lain pada grafik 4.2 yaitu 321 T dan 390 T sehingga dapat terlihat grafik

IHSG tidak jauh berbeda dengan pergerakan harga saham ASII dan TLKM.

Harga saham ICBP bergerak naik dari tahun ke tahun, akan tetapi pergerakan harga saham ICBP dan IHSG terlihat bersinggungan, dikarenakan kapitalisasi pasar saham ICBP masih belum cukup untuk menggerakkan IHSG yang merupakan gabungan seluruh harga saham di bursa.

Tabel 1. Harga Tertinggi dan Harga Terendah Saham Perusahaan

Saham	2012		2013		2014		2015		2016	
	Max	Min								
ASII	8050	6430	7950	6050	7725	6425	8575	5225	8275	6450
ICBP	3900	2550	6550	4000	6550	5000	7335	6150	9975	7225
KLBF	1060	700	1450	1090	1830	1405	1865	1320	1795	1300
PWON	280	188	420	250	515	307	550	331	720	448
SCMA	2250	1610	2900	2350	4110	2650	3650	2730	3350	2510
TLKM	1950	1370	2380	1940	2915	2215	3105	2615	4310	3250

(Sumber : BEI, data diolah dari Ringkasan Kinerja Perusahaan)

Tabel diatas menunjukkan adanya *return* negatif yang besar pada saham KLBF tahun 2015 sekitar 27,8%. Akan tetapi, tidak serta merta saham KLBF tidak diperdagangkan sama sekali. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, grafik yang digunakan adalah grafik tahunan. Oleh karena itu, transaksi saham akan terus berlangsung walaupun harga sedang turun. Transaksi hanya bisa terjadi jika investor yang menjual dan investor yang membeli saham sepakat dengan harga saham.

Ketika harga saham turun, investor yang membeli saham memiliki harapan harga saham akan naik kembali, tentu saja harus didukung dengan analisa harga saham dan perusahaan yang baik.

METODE PENELITIAN

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling*. Teknik ini bersifat tidak acak, dimana sampel dipilih berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tertentu (Mantra, *et.all*, 1989). Indeks yang menjadi perhatian pada penelitian ini adalah Indeks saham syariah. Indeks Saham Syariah Indonesia dan Jakarta Islamic Index adalah indeks yang termasuk kedalam saham syariah. Saham pada ISSI adalah keseluruhan saham yang memenuhi kriteria saham syariah yang telah

ditentukan oleh OJK, sedangkan JII merupakan 30 saham syariah paling likuid yang ditetapkan oleh BEI.

Berdasarkan POJK No. 15/POJK.04/2015 tentang penerapan prinsip syariah di pasar modal, efek atau saham syariah baik itu dari akad, cara, kegiatan usaha serta aset yang melandasi penerbitannya tidak bertentangan dengan prinsip syariah di pasar modal. Masih berpatokan pada peraturan yang sama, pada pasal 2 ayat 1 disebutkan kegiatan atau jenis usaha apa saja yang bertentangan dengan prinsip syariah sehingga tidak dikategorikan pada jenis saham syariah yaitu : perjudian, jasa keuangan ribawi, jual beli yang mengandung ketidakpastian dan memproduksi, mendistribusikan, memperdagangkan atau menyediakan barang yang haram dan/atau barang atau jasa yang merusak moral. Pada penelitian ini, populasi yang digunakan adalah saham-saham yang terdaftar pada ISSI dikarenakan dianggap dapat mewakili keseluruhan saham syariah, dibandingkan dengan saham-saham likuid pada JII.

Sampel dipilih berdasarkan kriteria yang telah ditentukan yakni; Perusahaan melakukan aktivitas *stock split* dalam periode penelitian; Perusahaan tergabung

secara konsisten dalam Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) selama periode penelitian 5 tahun berturut-turut; Perusahaan pernah tergabung dalam *Jakarta Islamic Index* (JII).

Berikut adalah saham-saham lolos screening tergabung dalam ISSI dan JII yang digunakan dalam objek penelitian ini:

Tabel 3. Sektor dan Subsektor Perusahaan

No.	Simbol	Sektor	Subsektor	Tanggal <i>Stock Split</i>
1	ASII	Aneka industri	Mesin dan alat berat	4 Juni 2012
2	ICBP	Industri barang konsumsi	Makanan dan minuman	26 Juli 2016
3	KLBF	Industri barang konsumsi	Farmasi	5 Oktober 2012
4	PWON	Properti, real estate dan konstruksi bangunan	Properti dan real estate	29 Maret 2012
5	SCMA	Perdagangan, jasa dan investasi	Periklanan, percetakan dan media	25 Oktober 2012
6	TLKM	Infrastruktur, utilitas dan transportasi	Telekomunikasi	27 Agustus 2013

Penelitian ini menggunakan metode analisis regresi linier berganda untuk melihat pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat baik secara parsial maupun simultan termasuk besaran koefisien determinasi R square yang menunjukkan kemampuan variabel bebas dalam menerangkan variabel terikatnya.

Persamaan model regresi penelitian ini dapat diformulasikan sebagai berikut:

$$Y = \beta_0 + \beta_1ROE + \beta_2TATO + \beta_3EPS + \beta_4PER$$

Keterangan:

β_0 = Konstanta model regresi

$\beta_1 - \beta_4$ = Koefisien regresi

R = *Return* saham perusahaan

ROE = *Return On Equity* pada unit observasi

TATO = *Total Assets Turnover*

EPS = *Earning Per Share*

PER = *Price Earning Ratio*

E = Komponen *error*

Penelitian ini menggunakan olah data regresi linier berganda pada masing-masing saham syariah yang menjadi objek penelitian. Hal ini dilakukan untuk melihat pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel terikat. Regresi linier berganda juga digunakan untuk menganalisis pengaruh variabel-variabel independen kinerja keuangan terhadap variabel dependen return saham baik secara simultan maupun parsial untuk

melihat pengaruh variabel bebas secara parsial terhadap variabel terikatnya. Adapun variabel bebas yang digunakan adalah variabel-variabel kinerja keuangan yang diukur dengan rasio *Return on Equity (ROE)* yang menggambarkan rasio Profitabilitas, yang mengukur kinerja keseluruhan sebuah perusahaan dan efisiensinya dalam mengelola aktiva kewajiban dan ekuitas, *Total Asset Turnover (TATO)* yang menggambarkan rasio aktivitas yang mengukur likuiditas aktiva tertentu dan efisiensi dalam mengelola aktiva, *Earning per Share (EPS)* dan *Price Earning Ratio (PER)* yang menggambarkan rasio pasar yang menggambarkan pergerakan harga pasar saham terhadap kemampuan laba yang dihasilkan.

Seluruh variabel bebas yang digunakan diatas dikorelasikan dengan variabel terikat yaitu return saham. Adapun pemilihan rasio-rasio keuangan diatas disesuaikan berdasarkan pemetaan dari literature review dan pengamatan peneliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Ekspektasi yang diharapkan dari aktivitas stock split adalah besaran volume transaksi perdagangan yang menunjukkan nilai likuiditas perdagangan suatu saham.

Pemecahan nilai saham dalam nilai yang lebih kecil, diharapkan dapat meningkatkan volume transaksi perdagangan suatu saham.

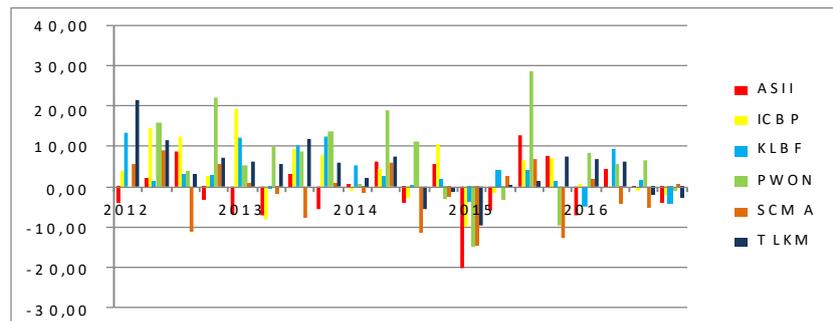
Aksi stock split yang dilakukan diharapkan dapat meningkatkan likuiditas perdagangan suatu saham dengan tujuan untuk menarik minat para investor untuk melakukan transaksi perdagangan di pasar sekunder. Tingginya transaksi perdagangan yang ada di bursa menunjukkan bahwa masyarakat benar-benar dapat memanfaatkan bursa sebagai wadah intermediary unit untuk menempatkan investasi dan mengambil manfaat dari investasi yang dilakukan. Salah satu manfaat dari kegiatan investasi adalah perolehan keuntungan.

Namun ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh suatu saham untuk bisa melakukan aksi stock split. Diantaranya adalah kinerja keuangan yang harus dipenuhi untuk bisa melakukan pemecahan saham. Untuk itulah penelitian ini dilakukan untuk menganalisis apakah ada pengaruh kinerja keuangan terhadap volatilitas atau naik turunnya harga saham yang tercermin pada perolehan return atau keuntungan saham. Pengembalian atas investasi yang dilakukan investor disebut sebagai *return*. Nilai *return* yang besar

menandakan adanya peningkatan yang besar antara harga saham saat ini dengan harga saham pada periode sebelumnya. Nilai *return* yang positif menunjukkan peningkatan harga saham sedangkan nilai

return yang negatif menunjukkan penurunan harga saham. Berikut adalah gambaran nilai *return* saham-saham syariah yang melakukan aksi stock split.

Grafik 2. Nilai Return Perusahaan Tahun 2012 – 2016



(Sumber : BEI, data diolah dari Ringkasan Kinerja Perusahaan)

Grafik 1 diatas menggambarkan perubahan *return* saham perusahaan tiap tahunnya dimana dibagi menjadi empat yaitu, triwulan I pada bulan maret, triwulan II pada bulan juni, triwulan III pada bulan september dan triwulan IV pada bulan desember. Terlihat pada grafik ini, semua saham negatif pada triwulan I dan beberapa saham pada triwulan II tahun 2015. Sedangkan pada triwulan III pada tahun yang sama, return semua saham kembali positif. Return negatif terbesar

terjadi pada saham ASII pada triwulan I tahun 2015 sebesar 20,12 persen diikuti saham PWON dan SCMA sebesar 14,95 dan 14,58.

Langkah selanjutnya adalah melakukan Uji F untuk menunjukkan apakah variabel independen atau variabel bebas mempunyai pengaruh secara bersama-sama atau simultan terhadap variabel dependen atau variabel terikat. Berikut adalah hasil dari uji F dari penelitian ini:

Tabel 4. Hasil Uji Simultan

Saham Perusahaan	Nilai F-statistic	Probabilitas
ASII	3.16	0.04
ICBP	1.96	0.15
KLBF	1.41	0.28
PWON	1.46	0.26
SCMA	1.68	0.20
TLKM	4.33	0.01

(Sumber : Output Eviews)

Pengujian secara simultan variabel *Return On Assets (ROA)*, *Total Assets Turnover (TATO)*, *Earning Per Share (EPS)* dan *Price Earning Ratio (PER)* terhadap variabel *Return* saham-saham syariah yang melakukan aksi stock split pada perusahaan adalah; *Return On Assets (ROA)*, *Total Assets Turnover (TATO)*, *Earning Per Share (EPS)* dan *Price Earning Ratio (PER)* berpengaruh secara simultan terhadap variabel *Return* pada saham PT. Astra International Tbk. (ASII) dan PT Telekomunikasi Indonesia (TLKM) saja. Sedangkan *Return On Assets (ROA)*, *Total Assets Turnover (TATO)*, *Earning Per Share (EPS)* dan *Price Earning Ratio (PER)* tidak berpengaruh secara simultan terhadap variabel *Return* pada saham PT. Indofood

CBP Sukses Makmur Tbk. (ICBP), PT. Kalbe Farma Tbk. (KLBF), PT. Pakuwon Jati Tbk. (PWON), PT. Surya Citra Media Tbk. (SCMA). Dari hasil diatas dapat disimpulkan bahwa setiap saham yang melakukan aksi stock split memiliki pengaruh yang berbeda-beda pada setiap variabel bebas yang digunakan. Hal ini menunjukkan bahwa aksi stock split tidak mempengaruhi minat investor untuk melakukan investasi. Hal ini bisa dilihat pada perolehan return saham-sahamnya yang tidak mengalami perubahan yang cukup signifikan. Uji T pada penelitian ini dilakukan untuk menunjukkan apakah variabel independen mempunyai pengaruh secara parsial terhadap variabel dependen. Berikut adalah hasil dari uji T dari penelitian ini:

Tabel 5. Hasil Uji T

Variable	ASII		ICBP		KLBF		PWON		SCMA		TLKM	
	Coeff	Prob.										
C	65.757	0.0739	3.1735	0.9490	3.7755	0.8720	18.283	0.5239	29.045	0.0790	29.501	0.3839
ROA	2.2832	0.1587	0.6424	0.6282	0.3721	0.7644	0.0526	0.9741	0.9009	0.2345	2.0282	0.3003
TATO	24.025	0.2482	14.214	0.6992	20.261	0.3228	8.0591	0.9404	23.756	0.3313	39.184	0.5158
EPS	0.0544	0.3493	0.0837	0.0277	0.1763	0.4701	0.1783	0.6787	0.0071	0.9554	0.0983	0.3203
PER	2.4727	0.0080	0.0422	0.9204	0.2323	0.3431	0.5084	0.0609	0.7931	0.0237	2.0508	0.0063

Pengujian secara parsial variabel Return On Assets (ROA), Total Assets Turnover (TATO), Earning Per Share (EPS) dan Price Earning Ratio (PER) terhadap variabel Return saham pada perusahaan

Dari hasil output diatas dapat dilihat bahwa ROA tidak berpengaruh secara parsial pada return saham pada seluruh

saham yang menjadi sampel objek pengamatan. Dapat disimpulkan bahwa tidak semua investor menggunakan

indikator ROA sebagai reference dalam pengambilan keputusan pemilihan saham. Hal ini tercermin pada perolehan return saham yang cenderung stabil selama periode pengamatan pada beberapa saham. Sehingga dapat dikatakan bahwa ROA pada saham yang melakukan *stock split* tidak mengalami perubahan yang signifikan dan tidak mempengaruhi besaran return saham yang diperoleh.

Jika dilihat dari besaran koefisiennya, dapat dilihat bahwa ROA berkontribusi negatif terhadap return saham ICBP. Dan ROA berkontribusi negatif pada ASII, KLBF, PWON, SCMA dan TLKM. Artinya peningkatan ROA tidak diimbangi dengan naiknya keuntungan (return) saham yang dihasilkan. Hal ini sesuai dengan penelitian natali (2016) yang memberikan hasil bahwa aksi stock split tidak mempengaruhi perolehan abnormal return saham. Rasio ini mengukur efektivitas dari keseluruhan operasi perusahaan. Perusahaan yang mampu menghasilkan laba yang tinggi akan menarik minat investor untuk melakukan investasi maka harga saham perusahaan akan meningkat dan mengakibatkan return saham dari perusahaan tersebut ikut meningkat. Kontribusi ROA negatif terhadap return saham menunjukkan bahwa kenaikan pendapatan bersih saham tidak

mempengaruhi return saham. sehingga dapat dikatakan bahwa investor tidak menjadikan ROA sebagai indikator atau reference dalam pengambilan keputusan pemilihan saham.

Dari hasil output diatas dapat dilihat bahwa TATO tidak berpengaruh secara parsial pada return saham pada seluruh saham yang menjadi sampel objek pengamatan baik pada saham ASII, ICBP, KLBF, PWON, SCMA maupun TLKM. Hal ini dapat dikatakan bahwa tidak semua investor tidak memperhatikan indikator TATO sebagai reference dalam pengambilan keputusan pemilihan saham. Sehingga dapat dikatakan bahwa kinerja TATO pada saham yang melakukan stock split tidak mempengaruhi besaran return saham yang diperoleh.

Total Asset Turnover merupakan rasio untuk mengatur tingkat efisiensi perusahaan dalam penggunaan seluruh aset untuk menghasilkan penjualan. TATO diperoleh dengan cara membandingkan antara penjualan dengan total aset perusahaan. TATO yang tinggi mengindikasikan bahwa manajemen perusahaan dapat mendayagunakan seluruh aktiva yang dimilikinya untuk mendatangkan revenue bagi perusahaan dan hal ini pada gilirannya dianggap dapat meningkatkan keuntungan perusahaan.

Dengan demikian, TATO yang tinggi berpotensi menarik investor untuk terus berinvestasi di perusahaan tersebut dan akan meningkatkan nilai saham tersebut. Menurut Risca (Risca Yuliana Thrisye dan Nicodemus Simu, 2013), TATO yang tinggi menunjukkan efisiensi suatu perusahaan dalam memanfaatkan aktiva yang dimilikinya dan menunjukkan semakin besar penjualan yang dihasilkan, yang kemudian berdampak positif pada harga saham. Ketidaksesuaian hasil bisa dipengaruhi oleh klasifikasi industri yang menjadi objek sampel pengamatan adalah perusahaan-perusahaan yang bergerak di sektor jasa sehingga frekuensi perputaran aset tidak berpengaruh pada volume transaksi perdagangan.

Jika dilihat dari besaran koefisiennya, dapat dilihat bahwa TATO berkontribusi positif pada perolehan return saham. Hal ini berarti peningkatan TATO berimplikasi positif pada peningkatan volume transaksi perdagangan saham yang pada akhirnya meningkatkan return saham.

Dari hasil output diatas dapat dilihat bahwa EPS tidak berpengaruh secara parsial pada return saham pada ASII, KLBF, PWON, SCMA dan TLKM namun berpengaruh secara parsial pada ICBP. Hal ini dapat dikatakan bahwa tidak semua

investor tidak memperhatikan indikator EPS sebagai reference dalam pengambilan keputusan pemilihan saham. Sehingga dapat dikatakan bahwa EPS pada saham yang melakukan stock split tidak mempengaruhi besaran return saham yang diperoleh.

EPS menunjukkan jumlah uang yang dihasilkan (return) dari setiap lembar saham. Semakin besar nilai EPS, semakin besar keuntungan atau return yang diterima pemegang saham. Menurut Basuki (Basuki Toto Rahmanto dan Suherman, 2014). Nilai EPS mencerminkan informasi mengenai kemampuan perusahaan dalam menghasilkan arus kas yang baik di masa yang akan datang yang pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan perusahaan. Sehingga semakin besar EPS maka akan berdampak pada keuntungan (return) yang semakin tinggi bagi pemegang saham.

Jika dilihat dari besaran koefisiennya, dapat dilihat bahwa EPS berkontribusi positif terhadap return saham pada PWON, SCMA dan TLKM. Sedangkan EPS berkontribusi negatif pada ASII, ICBP dan KLBF. Stock split yang dilakukan hanya untuk memecah nilai nominal saham untuk likuiditas perdagangan yang tidak berkontribusi

positif pada peningkatan *earning* maupun return saham. sehingga dapat dikatakan bahwa EPS tidak dijadikan indikator bagi investor dalam pemilihan saham.

Dari hasil output diatas dapat dilihat bahwa PER tidak berpengaruh secara parsial pada return saham pada ICBP, KLBF, PWON dan TLKM namun berpengaruh secara parsial pada ASII dan SCMA. Hal ini dapat dikatakan bahwa investor tidak memperhatikan indikator PER sebagai reference dalam pengambilan keputusan pemilihan saham. Sehingga dapat dikatakan bahwa PER pada saham yang melakukan stock split tidak mempengaruhi besaran return saham yang diperoleh.

Jika dilihat dari besaran koefisiennya, dapat dilihat bahwa PER berkontribusi positif terhadap return saham pada ICBP dan KLBF. Sedangkan EPS berkontribusi negatif pada ASII, KLBF, PWON, SCMA dan TLKM. Menurut Sri (Sri Zuliarni, 2012), perusahaan yang mempunyai PER tinggi menunjukkan perusahaan tersebut mempunyai tingkat pertumbuhan yang tinggi. Karena perusahaan tidak mendistribusikan seluruh laba kepada pemegang saham. Jika perusahaan mendapat laba, laba tersebut dapat digunakan untuk investasi perusahaan atau

mendistribusikannya kepada pemegang saham dalam bentuk dividen. Saham yang PER nya rendah diasumsikan bahwa laba seluruhnya dibagikan dalam bentuk dividen.

PER merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba, maka semakin tinggi PER akan semakin tinggi pula minat investor dalam menanamkan modal di perusahaan tersebut, sehingga harga saham perusahaan tersebut akan ikut naik dan laba per saham juga akan meningkat.

Tabel 6. Koefisien Determinasi

Saham Perusahaan	R-squared	Adj. R-squared
ASII	0.46	0.31
ICBP	0.34	0.16
KLBF	0.27	0.08
PWON	0.28	0.08
SCMA	0.31	0.12
TLKM	0.53	0.41

(Sumber : Output Eviews)

Besarnya nilai *Adjusted R-Squared* terbesar ada pada saham PT. Telekomunikasi Indonesia (TLKM) sebesar 41% dan saham PT Astra International (ASII) sebesar 31%. Sedangkan besarnya nilai *Adjusted R-Squared* saham PT. Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. (ICBP) sebesar 16%, saham PT. Surya Citra Media Tbk. (SCMA) sebesar 12%, saham PT. Kalbe Farma Tbk. (KLBF) dan saham PT. Pakuwon Jati Tbk. (PWON) sebesar 8%. Hal ini menunjukkan

bahwa persentase pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen adalah cukup kecil karena hanya memiliki pengaruh dibawah 50%.

Kinerja perusahaan sering digunakan sebagai indikator baik buruknya performance sebuah perusahaan. Kinerja perusahaan umumnya diukur berdasarkan penghasilan bersih (laba) atau sebagai dasar bagi ukuran yang lain seperti imbalan investasi (*return on investment*) atau penghasilan per saham (*earning per share*). Unsur yang berkaitan langsung dengan pengukuran penghasilan bersih (laba) adalah penghasilan dan beban. Dalam penelitian ini ukuran kinerja perusahaan yang digunakan adalah Return on Equity, Total Asset Turnover (TATO), Earning per share (EPS) dan Price Earning Ratio (PER). Indikator ini sering digunakan sebagai refrence bagi investor untuk mengambil keputusan.

Cara yang dilakukan oleh emiten untuk mempertahankan agar sahamnya tetap berada dalam rentang perdagangan yang optimal sehingga daya beli investor meningkat, terutama untuk investor kecil, yaitu dengan melakukan pemecahan saham. Pemecahan saham atau *stock split* adalah upaya untuk meningkatkan jumlah saham yang beredar akan tetapi tidak

merubah besarnya modal. Secara teoritis, pemegang saham tidak secara langsung merasakan manfaat yang nyata dengan adanya *stock split*, sementara ada biaya yang harus ditanggung emiten untuk melakukannya. Berkaitan dengan biaya yang harus dikeluarkan oleh emiten, laba ditahan digunakan untuk membiayai kegiatan ini. Hal ini berdampak pada dividen yang kemungkinan diterima oleh para investor, lebih sedikit bahkan tidak sama sekali.

Berdasarkan *signaling hypothesis*, pasar tidak menanggapi pengumuman pemecahan saham sebagai peningkatan profitabilitas. Menurut Litner (2004), perusahaan lebih memilih untuk tidak mengurangi dividen, maka *stock split* menjadi sinyal dari direksi perusahaan kepada pasar, bahwa laba masa depan akan cukup untuk mempertahankan pembayaran dividen pada tingkat yang lebih tinggi dari yang sebelumnya. Jika pasar menanggapi positif sinyal dari direksi ini, maka kemungkinan harga saham akan meningkat setelah adanya pengumuman *stock split*. Sedangkan *trading range hypothesis* menyatakan bahwa perusahaan memecah saham hingga mencapai tingkat (harga) tertentu dan likuiditas perdagangan yang optimal. Manajemen menggunakan

informasi perusahaan yang bersifat privat dalam menentukan faktor pemecah dan juga prediksi laba pada masa yang akan datang. Laba pada masa depan menjadi sangat penting, terkait dengan *signaling hypothesis* yang telah disebutkan sebelumnya.

SIMPULAN

Tingkat harga saham menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi permintaan dan penawaran akan suatu saham. Kebanyakan perusahaan tidak akan menetapkan harga terlalu rendah, sedangkan harga yang terlalu tinggi juga akan menjatuhkan penawaran saham tersebut. Tingginya harga saham akan mengurangi kemampuan para investor untuk membeli saham tersebut. Hukum permintaan dan penawaran kembali akan berlaku ketika harga saham sudah mencapai tingkat tertinggi, akibatnya harga saham akan turun kembali pada posisi keseimbangan yang baru. Saham dengan harga yang sangat tinggi membuat investor dengan modal kecil tidak dapat berpartisipasi dalam transaksi, hal ini berdampak pada berkurangnya likuiditas saham sehingga saham perusahaan terlihat kurang menarik bagi investor.

REFERENSI

Ariyanti, A. I., & Suwitho, S. (2016).

Pengaruh Cr, Tato, Npm Dan Roa

Terhadap Return Saham. *Jurnal Ilmu & Riset Manajemen*, 5(4).

Association of Chartered Certified Accountants (ACCA). (2009) Paper F9 Financial Management. London: BPP Learning Media.

Baker, H. K., & Gallagher, P. L. (1980). Management's view of stock splits. *Financial Management*, 73-77.

Basuki Toto Rahmanto dan Suherman, (2014) "Pengaruh ROA, EPS, Ukuran Perusahaan, Umur Perusahaan dan Prosentase Penawaran Saham terhadap Initial Return Penawaran Umum Perdana," *Jurnal Bisnis dan Komunikasi*, Vol. 1 No. 1: h. 58.

Brealey, Richard A. dkk. (2001), *Fundamentals of Corporate Finance Third Edition*. Boston: McGraw-Hill.

Budiardjo, D., & Hapsari, J. H. (2011). Pertumbuhan earning per share, price to book value dan price earning ratio sebagai dasar keputusan stock split. *Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan*, 13(1), Hal 83-90.

Damayanti, N. L., Atmadja, A. T., & Surya, N. A. (2014). Analisis pengaruh pemecahan saham (stock split) terhadap tingkat keuntungan (return) saham dan likuiditas saham (Studi pada perusahaan yang go

- public di Bursa Efek Indonesia).
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi
SI, 2(1), hal 10.
- Deitiana, T. (2011). Pengaruh rasio keuangan, pertumbuhan penjualan dan dividen terhadap harga saham. *Jurnal Bisnis dan Akuntansi*, 13(1), 57-66.
- Dianita, Putu Eka. "Pengaruh Rasio Likuiditas, Profitabilitas, Solvabilitas, Aktivitas dan Penilaian Pasar terhadap Return Saham." *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, Vol. 1 No. 2.
- Divisi Edukasi Bursa Efek Indonesia. (2014), *Buku Pedoman Sekolah Pasar Modal Syariah Level 1*. Jakarta: Bursa Efek Indonesia,.
- Fahmi, Irham, (2013), *Pengantar Manajemen Keuangan : Teori dan Soal Jawab*. Bandung: Alfabeta,.
- Fama, Eugene F. dkk. "The Adjustment of Stock Prices to New Information." *International Economic Review*, Vol. 10 No. 1.
- Fraser, Lyn M. dan Ormiston, Aileen, (2008), *Memahami Laporan Keuangan*, Edisi Ketujuh. Indeks,.
- Ghozali, Imam, (2005), *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*. Semarang: Badan Penerbitan Universitas Diponegoro.
- Hamid, Abdul., (2009), *Pasar Modal Syariah*. Jakarta: Lembaga Penelitian UIN Jakarta.
- Harahap, Sofyan Syafri, (2010), *Analisis Kritis Atas Laporan Keuangan*. Jakarta: Rajawali Pers,.
- Harmono, (2014), *Manajemen Keuangan : Berbasis Balance Scorecard*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Hernoyo, M. A. (2013), Pengaruh stock split announcement terhadap volume perdagangan dan return. *Management Analysis Journal*, 2(1), hal 110-116.
- Hery. *Analisis Kinerja Manajemen*. Jakarta: Grasindo, 2015.
- Horne, James C. Van dan Wachowicz, John M, (2008), *Fundamentals of Financial Management 13th Edition*. England: Pearson Education Limited.
- Horne, James C. Van dan Wachowicz, John M, (2012), *Prinsip-Prinsip Manajemen Keuangan*. Jakarta: Salemba Empat,.
- Ihsan, Dwi Nur'aini, (2013), *Analisis Laporan Keuangan Perbankan Syariah*. Tangerang Selatan: UIN Jakarta Press.

- Indarti, I., & Purba, D. M. B, (2011), Analisis perbandingan harga saham dan volume perdagangan saham sebelum dan sesudah stock split. *Jurnal Ilmu Ekonomi ASET*, 13(1), Hal 57-63,
- James C. Van Horne dan John M. Wachowicz, *Fundamentals of Financial Management 13th Edition* (England: Pearson Education Limited, 2008), hal 26.
- Kasmir, (2012), *Analisis Laporan Keuangan*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Kasmir, (2010), *Pengantar Manajemen Keuangan*. Jakarta: Kencana.
- Larson, Kermit D. dkk. (2005), *Principles of Financial Accounting Seventeenth Edition*. New York: McGraw-hill.
- Lestari, S., & Sudaryono, A, (2008), Pengaruh stock split: Analisis likuiditas saham pada perusahaan go public di Bursa Efek Indonesia dengan memperhatikan pertumbuhan dan ukuran perusahaan. *Jurnal Bisnis dan Akuntansi*, 10(3), hal 139-148
- Litner, John. "Distribution of Incomes of Corporations Among Dividends, Retained Earnings and Taxes." *The American Economic Review*, Vol. 46 No. 2.
- Manan, Abdul, (2009), *Aspek Hukum Dalam Penyelenggaraan Investasi Di Pasar Modal Syariah Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Mantra, Ida Bagoes dan Kasto, (1989), *Metode Penelitian Survei*. Jakarta: Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial.
- May, Ellen, (2011), *Smart Traders Not Gamblers*. Jakarta: Gramedia.
- McNichols, Mauren dan Dravid, Ajay. "Stock Dividends, *Stock splits* and Signaling." *The Journal of Finance*, Vol. 45 No. 3.
- Moeljadi. (2006), *Manajemen Keuangan : Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Murphy, John J, (1999), *Technical Analysis of The Financial Market: A Comprehensive Guide To Trading Methods And Applications*. Paramus: New York Institute of Financial.
- Nachrowi, Nachrowi Djalal dan Usman, Hardius. *Ekonometrika*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2006.
- Najmiah. dkk. "Pengaruh *Price to Book Value (PBV)*, *Price Earning Ratio (PER)* dan *Debt to Equity Ratio (DER)* terhadap *Return Saham* pada Industri *Real Estate* dan *Property* yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2009-2013."

- Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi*
SI, Vol.2 No. 1.
- Nasarudin, M. Irsam, (2008), *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Rahmanto, Basuki Toto dan Suherman. "Pengaruh ROA, EPS, Ukuran Perusahaan, Umur Perusahaan dan Prosentase Penawaran Saham terhadap Initial Return Penawaran Umum Perdana." *Jurnal Bisnis dan Komunikasi*, Vol. 1 No. 1.
- Rahmawati, Amalia. "Kinerja Keuangan dan Tingkat Pengembalian Saham: Studi pada Perusahaan Asuransi di Bursa Efek Indonesia." *Jurnal Bisnis dan Manajemen*, Vol. 7 No. 1.
- Risca Yuliana Thrisye dan Nicodemus Simu, (2013), "Analisis Pengaruh Rasio Keuangan terhadap Return Saham BUMN Sektor Pertambangan Periode 2007-2010," *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis*, Vol. 8 No. 2, hal. 80.
- Riyadi, S., & Andrefa,S,(2013), Analisis dampak stock split terhadap harga, volume dan keputusan investasi pada saham. *E-Jurnal Manajemen dan Bisnis*, 1(1), hal 24.
- Setyawan, I. R. Stock split dan likuiditas saham di BEI, (2010), Pengujian menggunakan hipotesis likuiditas. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, 7(2), Hal 124-138.
- Sri Zuliarni, (2012), "Pengaruh Kinerja Keuangan terhadap Harga Saham pada Perusahaan Mining and Mining Service di Bursa Efek Indonesia (BEI)," *Jurnal Aplikasi Bisnis*, Vol. 3 No. 1, hal. 40.
- Sugiarti. "Pengaruh Kinerja Keuangan Perusahaan terhadap Return Saham (Studi pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia." *Jurnal Aplikasi Manajemen*, Vol. 13 No. 2.
- Sugiyono, (2010), *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: ALFABETA.
- Suliyanto, (2011), *Ekonometrika Terapan: Teori dan Aplikasi Dengan SPSS*. Yogyakarta: ANDI.
- Sutrisno, W., Susilowati, S., & Yuniartha, F. (2000), Pengaruh stock split terhadap likuiditas dan return saham di Bursa Efek Jakarta. *Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan*, 2(2), Hal 1-13
- Thrisye, Risca Yuliana dan Nicodemus Simu. "Analisis Pengaruh Rasio Keuangan terhadap Return Saham BUMN Sektor Pertambangan

Periode 2007-2010.” *Jurnal Ilmiah
Akuntansi dan Bisnis*, Vol. 8 No. 2.

Winarno, Wing Wahyu, (2015), *Analisis
Ekonometrika dan Statistika dengan
EViews*. Yogyakarta: UPP STIM
YKPN

Zuliarni, Sri. “Pengaruh Kinerja Keuangan
Terhadap Harga Saham Pada
Perusahaan *Mining And Mining
Service* Di Bursa Efek Indonesia
(BEI).” *Jurnal Aplikasi Bisnis*, Vol.
3 No.1.

IMPLEMENTASI PENGELOLAAN KEUANGAN PADA DESA RAWA BURUNG KABUPATEN TANGERANG, BANTEN

Amrie Firmansyah

Politeknik Keuangan Negara STAN

Email: amrie.firmansyah@gmail.com

Diterima: 3 Juni 2018; Direvisi: 7 Juni 2018; Disetujui: 25 Juni 2018

Abstract

This study aims to determine the implementation of village financial management covering the phases of planning, implementation, administration, reporting, and accountability. The method used in this study is a descriptive qualitative and using data research technique with an in-depth interview, observation, and documentation. Informants in this research are village government officers who understand the village financial management cycles. The results of this study concluded that the village financial management, in general, has been conducted accountably and transparently in accordance with the applicable rules. However, the implementation of village financial management is dominated by the head of the village government section, not the village treasurer who is supposed to the village finance management functions. This is due to the lack of standard operating procedures for village financial management, clear job description, and qualification of job competence. The low salaries in the village administration resulted in the reluctance of people to work in the village government. In addition, Rawa Burung Village does not have officers with an educational background in accounting.

Keywords: *Village financial management, Accountable, Transparent.*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan pengelolaan keuangan desa yang meliputi tahapan perencanaan, pelaksanaan, administrasi, pelaporan, dan akuntabilitas. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dan menggunakan teknik penelitian data dengan wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Narasumber dalam penelitian ini adalah petugas pemerintah desa yang memahami siklus pengelolaan keuangan desa. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pengelolaan keuangan desa, secara umum, telah dilakukan secara akuntabel dan transparan sesuai dengan aturan yang berlaku. Namun, pelaksanaan pengelolaan keuangan desa didominasi oleh kepala bagian pemerintahan desa, bukan bendahara. Hal ini disebabkan oleh kurangnya standar operasional prosedur untuk manajemen keuangan desa, deskripsi kerja yang jelas, dan kualifikasi kompetensi kerja. Rendahnya gaji dalam administrasi desa mengakibatkan keengganan orang untuk bekerja di pemerintahan desa. Selain itu, Desa Rawa Burung tidak memiliki petugas dengan latar belakang pendidikan akuntansi.

Kata Kunci: Pengelolaan keuangan desa, Akuntabel, Trasparan.

PENDAHULUAN

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengamankan pemerintah desa untuk lebih mandiri dalam mengelola pemerintahan dan berbagai sumber daya alam yang dimiliki, termasuk di dalamnya pengelolaan keuangan dan kekayaan milik desa. Keuangan Desa menurut Permendagri No. 113 Tahun 2014 adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Sementara itu pengelolaan keuangan desa adalah seluruh rangkaian kegiatan yang dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan hingga pertanggungjawaban yang dilaksanakan dalam satu tahun anggaran, terhitung mulai 1 Januari sampai dengan 31 Desember.

Peran besar yang diterima oleh desa, tentunya disertai dengan tanggung jawab yang besar pula. Oleh karena itu, pemerintah desa harus dapat menerapkan prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam tata pemerintahannya. Seluruh kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan. Pengalokasian dana desa yang bersumber dari APBN mulai

tahun anggaran 2015 (www.djpk.kemenkeu.go.id, 2015), pengelolaan keuangan desa menjadi pusat perhatian masyarakat khususnya terkait dengan akuntabilitas dan transparansi. Dalam hal pengelolaan keuangan desa, pemerintah desa wajib menyusun laporan realisasi pelaksanaan APBDesa dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa dalam suatu siklus yang dimulai daritahap perencanaan sampai dengan tahap pertanggungjawaban.

Tahap perencanaan dan penganggaran, pemerintah desa harus melibatkan masyarakat desa yang tercermin dalam Badan Permusyawaratan Desa (BPD), sehingga program kerja dan kegiatan yang disusun dapat mengakomodir kepentingan dan kebutuhan masyarakat desa serta sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh desa tersebut (Permendagri 113/2014). Selain itu pemerintah desa harus bisa menyelenggarakan pencatatan, atau minimal melakukan pembukuan atas transaksi keuangannya sebagai wujud pertanggungjawaban keuangan yang dilakukannya. Dengan demikian, dalam pengelolaan keuangan desa perlu didukung oleh sumber dana manusia yang handal sehingga pengelolaan keuangan desa dapat dilaksanakan secara transparan dan akuntabel. Dengan adanya kewenangan

pengelolaan keuangan desa (berdasarkan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014) dan adanya alokasi dana desa mulai tahun anggaran 2015 (berdasarkan PP Nomor 47 Tahun 2015), seharusnya desa semakin terbuka (transparan) dan bertanggung jawab terhadap proses pengelolaan keuangan.

Dalam ketentuan Permendagri nomor 113 Tahun 2014 dinyatakan bahwa pengelolaan keuangan desa merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, laporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan desa, sehingga desa diharapkan dapat mengelola keuangannya tersebut lebih baik. Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Penyelenggaraan kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa didanai oleh APBDesa. Penyelenggaraan kewenangan lokal berskala Desa selain didanai oleh APBDesa, juga dapat didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja negara dan anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Penelitian terkait dengan pengelolaan keuangan desa yang dilakukan oleh Hanifah dan Praptoyo (2015) menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan desa telah

dilaksanakan secara akuntabel dan transparan yang diwujudkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDesa), namun dari sisi pencatatan akuntansi masih diperlukan adanya pembinaan dan pelatihan lebih lanjut untuk pegawai desa, karena belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan. Hal ini menunjukkan kurangnya kemampuan dan kompetensi perangkat desa. Sejalan dengan penelitian tersebut, Indrianasari (2017) membuktikan bahwa perangkat desa cukup berperan dalam keseluruhan pengelolaan keuangan desa.

Abidin (2015) menyatakan bahwa perbaikan yang perlu dilakukan dalam pengelolaan keuangan desa meliputi pelaksanaan administrasi keuangan, kualitas laporan keuangan, dan penyerapan anggaran pada kegiatan yang telah diprogramkan. Masalah utamanya diakibatkan oleh kurangnya jumlah perangkat desa dan kurangnya kompetensi perangkat desa. Sejalan dengan hal tersebut, Umami dan Nurodin (2016) menyimpulkan bahwa transparansi dan akuntabilitas berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan desa.

Astuti dan Yulianto (2016) menyatakan bahwa keberhasilan pengelolaan keuangan desa adalah transparansi, akuntabel dan partisipasi karena hal-hal tersebut

merupakan aspek penting dalam menciptakan *good governance*. Hambatan untuk menciptakan *good governance* dalam pengelolaan keuangan desa adalah kurangnya kompetensi sumber daya manusia.

Penelitian lainnya dilakukan Nafidah dan Anisa (2017) dengan menggunakan data pengelolaan keuangan desa di Kabupaten Jombang menyimpulkan bahwa secara garis besar pengelolaan keuangan desa telah dilakukan secara akuntabel. Mondale *et al.* (2017) melakukan pengujian perbandingan pengelolaan keuangan di dua desa serta membandingkan faktor penghambat serta pendukung dalam pengelolaan keuangan desa dari mulai tahapan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, sampai dengan pelaporan dan pertanggungjawaban. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan dan kesamaan dalam pengelolaan keuangan di dua desa ini yang dimulai dari tahapan perencanaan sampai dengan pelaporan dan pertanggungjawaban.

Penelitian yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan desa masih menjadi fokus banyak peneliti mengingat banyak pihak yang menyoroti pengelolaan keuangan desa sejak tahun 2015 mengingat pemerintah desa mendapat alokasi dana desa yang bersumber dari APBN dan APBD. Dalam penelitian-penelitian sebelumnya, walaupun

pengelolaan dana desa telah dilakukan secara transparansi dan akuntabel, namun masalah utama dari pelaksanaan pengelolaan dana desa yang banyak ditemukan adalah kurang kompetensinya SDM pemerintah desa. Namun demikian, dalam penelitian-penelitian sebelumnya lebih banyak menyoroti pelaksanaan pengelolaan keuangan desa, tidak terlalu memfokuskan kendala yang terjadi ketidakkompetenan SDM dalam pemerintah desa.

Oleh karena itu, dalam penelitian ini bukan hanya mengulas kembali pelaksanaan pengelolaan keuangan desa, namun juga mengulas aparatur desa yang terlibat dalam pengelolaan keuangan desa. Adapun pemilihan objek penelitian dengan menggunakan pengelolaan keuangan Desa Rawa Burung, Kabupaten Tangerang karena lokasi desa ini masih dekat dengan wilayah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang diharapkan aparatur desa lebih memiliki kompetensi dibandingkan dengan daerah lainnya dan informasi lebih banyak diperoleh.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif deskriptif. Data penelitian diperoleh dengan menggunakan teknik wawancara mendalam, observasi dan dokumentasi. Wawancara dilakukan kepada pegawai yang menguasai proses pengelolaan keuangan de-

sa, khususnya bendahara desa yang terlibat langsung dalam pengelolaan keuangan desa. Pemilihan Desa Rawa Burung dalam penelitian ini karena memiliki lokasi yang dekat dengan Provinsi DKI Jakarta yang diharapkan memiliki pegawai yang kompeten dalam pengelolaan keuangan desa. Wawancara dilakukan minggu ketiga bulan Februari 2018. Adapun item-item yang ditanyakan kepada informan terkait dengan pengelolaan keuangan daerah sebagai Permendagri nomor 113 tahun 2014 meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Untuk mendapatkan informasi mengenai pengelolaan keuangan desa, diperlukan pemilihan informan berdasarkan kompetensi pengetahuan atas proses pengelolaan keuangan desa yang terjadi di Desa Rawa Burung. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari Kepala Desa dan beberapa perangkat desa menyatakan bahwa pegawai yang paling memiliki kompetensi atas informasi pengelolaan keuangan desa adalah kepala seksi pemerintahan desa, sedangkan bendahara desa rawa burung lebih memiliki fungsi atas penerimaan kas dan pengeluaran kas saja.

Dalam perencanaan kegiatan, Desa Rawa Burung sudah menerapkan Rencana Pem-

angunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) untuk jangka waktu 6 tahun dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) setiap tahunnya. RPJMDes dan RKPDDes disusun oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Pemerintah Desa. Terkait dengan hal tersebut, Kepala Desa menentukan RPJMDesnya untuk enam tahun ke depan untuk disampaikan kepada BPD dengan tujuan untuk proses persetujuan. Selanjutnya, RPJMDes yang sudah disetujui BPD dijabarkan ke dalam RKPDDes setiap tahun selama enam tahun. Setiap tahunnya diadakan Musrenbang (Musyawarah Perencanaan dan Pembangunan) yang berisi daftar usulan kegiatan masyarakat dari setiap Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) Desa Rawa Burung untuk dapat dimasukkan ke dalam RKPDDes. RKPDDes yang telah disetujui di tingkat pemerintah desa, selanjutnya divalidasi oleh Bagian Bidang Pembangunan Desa, Pemerintah Kabupaten Tangerang. RKPDDes merupakan dasar untuk menyusun APBDDes.

Dalam mengalokasikan anggaran dalam APBDDes terdapat kendala di antaranya adalah sulitnya pengalokasian penerimaan dana desa, alokasi dana desa, bantuan yang bersumber dari pemerintah dan pemerintah daerah dengan tepat mengingat masih terbatasnya kompetensi pegawai Desa Rawa

Burung masih terbatas. Masih adanyadana desa yang masih tersisa di akhir tahun padahal seluruh rencana kegiatan desa telah sesuai dengan RKPDes dan dianggarkan dalam APBDesa.Strategi yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Rawa Burung untuk menghindari adanya sisa anggaran lebih adalah dengan merealokasi penggunaan anggaran-anggaran untuk kegiatan-kegiatan lainnya yang tetap mengacu kepada RKPDes tahun berjalan.

Sumber pendapatan APBDesa Desa Rawa Burung terdiri dari Dana Desa, Alokasi Dana Desa (ADD) dan Pajak Bagi Hasil (PBH) dari Pemerintah Daerah (Pemda).Alokasi anggaran belanja pegawai, barang dan modal didasarkan pada analisis belanja kebutuhan dan Rincian Anggaran Belanja (RAB).Salah satu belanja modal yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Rawa Burung adalah belanja infrastruktur.Masih belum terdapat komponen pembiayaan dalam APBDesa selama periode tahun 2015-2017.Sistem keuangan Desa Rawa Burung telah memiliki operator yang merupakan perangkat pemerintah desa.Operator yang mengangani sistem keuangan telah memenuhi kualifikasi operasional siskeudes Desa Rawa Burung.

Dalam pelaksanaan kegiatan selama tahun berjalan, semua penerimaan dan pengeluaran desa dilaksanakan melalui rekening

kas desa Rekening kas Desa Rawa Burung atas nama Bendahara desa. Penerimaan dan pengeluaran desa telah didukung oleh bukti yang lengkap dan sah, bukti belanja berupa nota belanja dan pengadaan barang telah dilakukan dikodifikasi sesuai dengan pengeluaran tahun bersangkutan.Bendahara desa sangat berperan dalam penatausahaan setiap transaksi dengan menggunakan buku kas umum.

Untuk pelaksanaan kegiatan, sebelum APBDesa ditetapkan, masyarakat atau kelompok masyarakat mengajukan daftar usulan kegiatan kepada Musrenbang (Musyawarah Perencanaan dan Pembangunan) untuk selanjutnya dilakukan *review* dan validasi oleh Bidang Pembangunan Desa Pemerintah Kabupaten Tangerang untuk selanjutnya dimasukkan ke dalam RKPDes. Rincian Anggaran Belanja (RAB) divalidasi oleh Bidang Pembangunan Desa Pemerintah Kabupaten Tangerang.Pencairan Surat Perintah Pembayaran (SPP) di Desa Rawa Burung dilakukan dengan mengajukan RAB setiap pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Desa. Atas dasar lalu bendahara akan mencarikannya.Dalam pelaksanaannya, pemerintah desa memiliki buku pembantu kas kegiatan yang terintegrasi dengan aplikasi sistem keuangan desa.

Bendahara desa juga memiliki kewajiban

memungut pajak penghasilan dan pajak lainnya serta menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara. Bendahara desa dan operator sistem keuangan desa memiliki petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan pemungutan pajak penghasilan dan pajak lainnya, serta aplikasi sistem keuangan desa yang mendukung dengan adanya sistem penghitungan pajak di dalam aplikasi tersebut. Dalam pengadaan barang jasa yang dilakukan baik dengan swakelola maupun dengan kontrak pengadaan barang/jasa, pencairan dan pada umumnya dilakukan dengan mekanisme dana talangan terlebih dahulu, untuk selanjutnya dimintakan penggantian kepada bendahara desa.

Dalam bagian penatausahaan, Bendahara Desa melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran dengan membuat laporan realisasi pelaksanaan kegiatan setiap akhir bulan yang dilakukan dengan aplikasi sistem keuangan desa. Bendahara desa melaporkan pertanggungjawaban seluruh kegiatan yang telah dilaksanakan setiap bulan secara rutin kepada kepala desa. Penyusunan laporan pertanggungjawaban bulanan dilakukan menggunakan aplikasi siskeudes yang di dalamnya terdapat buku kas umum, buku kas

pembantu pajak, dan buku bank menggunakan aplikasi siskeudes.

Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota berupa laporan semester pertama sebelum bulan Juli berakhir, sedangkan laporan semester akhir tahun dilaporkan sebelum Januari berakhir. Laporan pertanggungjawaban dalam bentuk Laporan Realisasi pelaksanaan APBDesa.

Walaupun belum diatur dalam SOP pengelolaan keuangan desa namun tahap-tahap dan waktu yang dilakukan telah sesuai sebagaimana yang diatur dalam permendagri 113/2014. *Review* dan *monitoring* pengelolaan keuangan desa dilakukan oleh inspektorat pemerintah kabupaten tangerang yang lebih bersifat pembinaan dan pengawasan. Kegiatan ini sangat berguna bagi pemerintah desa rawa burung dalam meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan desa.

Tindakan-tindakan perbaikan atas hasil *review* inspektorat dilakukan dibawah komando kepala desa kepada pegawai yang menangani keuangan desa. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa dituangkan dalam Peraturan Desa untuk selanjutnya disampaikan kepada masyarakat melalui media informasi seperti banner dan mading sehingga masyarakat mendapatkan informasi atasrealisasi

pelaksanaan APBDesa.

Pelaksanaan pengelolaan keuangan pada Desa Rawa burung pada umumnya telah dilaksanakan secara akuntabel dan transparan. Penelitian sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Hanifah (2015), Nadifah dan Anisa (2017). Pemerintah Desa rawa Burung telah melaksanakan prosedur pelaksanaan pengelolaan keuangan desa telah sesuai dengan Permendagri 113/2014. Peran kepala desa sangat dominan dalam mewujudkan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa dengan menunjuk kepala seksi pemerintah desa yang bertanggung jawab atas proses pengelolaan keuangan desa. Penunjukkan tersebut didasarkan atas kompetensi pegawai sehingga penyediaan informasi keuangan baik untuk pemerintah kabupaten dan masyarakat dapat dilakukan secara akuntabel dan transparan. Sementara itu, Bendahara Desa hanya berperan dalam penerimaan dan pengeluaran kas desa. Walaupun penyusunan *standard operating procedures* masih belum dinyatakan secara jelas, namun tahapan pengelolaan keuangan desa telah sesuai dengan permendagri 113/2014.

Pemberian informasi kepada masyarakat atas pengelolaan desa dilakukan secara transparan sehingga meminimalisir asimetri informasi antara kedua pihak yaitu pengelola keuangan desa dan masyarakat. Pelaporan laporan keuangan desa masih sangat tergan-

tung aplikasi sistem keuangan desa yang dioperasikan oleh kepala seksi pemerintah desa. Tidak terdapat pegawai pengelola keuangan desa yang memiliki latar belakang pendidikan akuntansi yang sebenarnya sangat membantu dalam pengelolaan keuangan desa. Hal ini dapat dimaklumi mengingat standar gaji yang diberikan oleh pemerintah desa rawa burung masih relatif rendah, sehingga masih terdapat keengganan masyarakat untuk bekerja dalam pemerintah desa. Pengetahuan akuntansi yang minim dari pegawai pemerintah desa rawa burung hanya diperoleh melalui sosialisasi dan pelatihan-pelatihan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Tangerang. Fungsi *monitoring* dan pengawasan keuangan desa dilakukan oleh Inspektorat Pemerintah Kabupaten Tangerang. Pemerintah Desa Rawa Burung sangat responsif terhadap rekomendasi Inspektorat apabila ditemukan adanya kesalahan pelaksanaan kegiatan.

SIMPULAN

Pengelolaan keuangan pada Desa Rawa Burung telah dilaksanakan pada umumnya telah dilaksanakan secara akuntabel dan transparan sesuai dengan ketentuan dalam Permendagri Nomor 113/2014. Bendahara desa hanya memiliki kompetensi terkait dengan penerimaan dan pengeluaran kas desa. Pengelola sistem keuangan desa sangat tergantung dari Kepala Seksi Pemerintah

Desa yang memahami setiap tahapan dalam pengelolaan keuangan desa. Hal ini menunjukkan bahwa tidak semua perangkat desa memiliki kompetensi pengelolaan keuangan pemerintah desa. Hal ini akan memiliki risiko atas kelangsungan pengelolaan keuangan desa apabila pegawai tersebut megundurkan diri. Hal lainnya adalah tidak terdapat pegawai yang memiliki latar belakang pendidikan akuntansi khususnya dalam pengelolaan keuangan desa.

REFERENSI

- Abidin, M.Z. (2015). Tinjauan atas pelaksanaan keuangan desa dalam mendukung kebijakan dana desa. *Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik*, 6 (1), 61-76
- Astuti, T.P., Yulianto (2016). Good governance pengelolaan keuangan desa menyongsong berlakunya Undang-Undang No. 6 Tahun 2014. *Berkala Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, 1(1), 1-14
- Godfrey, J., Hodgson, A., Tarca, A., Hamilton, J., Holmes, S. (2010). *Accounting Theory 7th Edition*. Milton: John Wiley & Sons, Inc
- Hanifah, S.I., S. Praptoyo (2015) Akuntabilitas dan Transparansi PertanggungJawaban Anggaran Pendapatan Belanja Desa. *Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi*, 4 (8), 1-15
- Indrianasari, N.T. (2017). Peran perangkat desa dalam akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. *Jurnal Ilmiah Ilmu Akuntansi, Keuangan dan Pajak*, 1 (2), 29-46.
- Jensen, M. C., Meckling, W. H. (1976). Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure. *Journal of Financial Economics*, 3(4), 305-360
- Mondale, T.F., Aliamin, Fahlevi, H. (2017). Analisis Problematika Pengelolaan Keuangan Desa. *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam*, 3 (2), 196-212
- Nafidah, L., N., Anisa, N. (2017) Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Jombang. *Akuntabilitas : Jurnal Ilmu Akuntansi*, 10 (2), 273-288
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa
- Umami, R., Nurodin, I. (2017). Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa. *Jurnal Ilmiah Ilmu Ekonomi*, 6(11), 74-80
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Watts, R. L., Zimmerman, J. L. (1990). Positive accounting theory: a ten year perspective. *The Accounting Review*, 65, 131–156

www.djpk.kemenkeu.go.id diakses tanggal 10 Maret 2018

**KAJIAN MODEL EMPIRIS MINAT BERWIRSAUSAHA SISWA SMK DI
KABUPATEN GARUT**

Rijal Assidiq Mulyana

STAI Al Musaddadiyah

Email:rijal.assidiq@stai-musaddadiyah.ac.id

Diterima: 3 Juni 2018; Direvisi: 7 Juni 2018; Disetujui: 25 Juni 2018

Abstract

The research was conducted to get the explanation and prove the influence of subjective norm, perceived behavioral control, and attitude toward the entrepreneurial intention. the subject of research is the students of SMKN 12 Garut with the number of respondents 128 people, the analysis technique used is with the structural equations modelling. The results showed that subjective norms did not have a positive effect on perceived behavioral control, as well as on entrepreneurial attitudes. Meanwhile, subjective norm, perceived behavioral control, and entrepreneurial attitude simultaneously have no positive effect on entrepreneurial intention. but partially found a positive influence perceived behavioral control, and entrepreneurial attitudes towards entrepreneurial intention.

Keywords: *Subjective Norm, Perceived Behavioral Control, Entrepreneurial Attitude, Entrepreneurial Intention*

Abstrak

Penelitian dilakukanguna memperoleh gambaran dan membuktikan pengaruh norma subyektif, persepsi kontrol perilaku, dan sikap wirausaha terhadap minat berwirausaha. subjek penelitian adalah siswa SMKN 12 Garut dengan jumlah responden 128 orang, teknik analisis yang digunakan adalah dengan model persamaan struktural. Hasil penelitian menunjukkan norma subyektif tidak berpengaruh positif terhadap persepsi kontrol perilaku, begitu pula terhadap sikap wirausaha. Sementara, norma subyektif, persepsi kontrol perilaku, dan sikap wirausaha secara simultan tidak berpengaruh positif terhadap minat berwirausaha. namun secara parsial ditemukan pengaruh positif persepsi kontrol perilaku, dan sikap wirausaha terhadap minat berwirausaha.

Kata Kunci: Norma Subyektif, Persepsi Kontrol Perilaku, Sikap Wirausaha, Minat Berwirausaha

PENDAHULUAN

Saat ini penelitian mengenai minat berwirausaha tengah berkembang. Berbagai variabel dimasukkan untuk memprediksi minat berwirausaha. begitupun, metodologi yang digunakan untuk mempelajari wirausahawan telah berubah sepanjang beberapa tahun (Linan dan Chen: 2006).

perkembangan tersebut dikarenakan kewirausahaan diyakini sebagai syaraf pusat perekonomian atau *the backbone of economy* dan pengendali perekonomian suatu bangsa atau *tailbone of economy* (Suryana, 2009).

Keyakinan lainnya adalah bahwa kewirausahaan merupakan kunci untuk sejumlah hasil sosial yang diinginkan. Seperti, pertumbuhan ekonomi, pengangguran yang lebih rendah, peningkatan lapangan pekerjaan, stabilisasi ekonomi dan modernisasi teknologi (Baumol, *et al*: 2007, United Nations Conference On Trade and Development, 2005).

Upaya mengembangkan kewirausahaan dan meningkatkan jumlah wirausahawan di Indonesia dianggap pilihan tepat mengingat fakta yang amat memprihatinkan mengenai tingginya jumlah pengangguran di Indonesia, data terakhir yang dilansir BPS menyebutkan bahwa angkatan kerja pada Februari 2017 mencapai 131,5 juta orang, dengan tingkat pengangguran terbuka

mencapai 7,01 juta orang (5,33 %). Dilihat dari tingkat pendidikan pada Pebruari 2017, TPT untuk Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) paling tinggi diantara tingkat pendidikan lain yaitu sebesar 9,27 %. TPT tertinggi berikutnya terdapat pada Sekolah Menengah Atas (SMA) sebesar 7,03%. (Berita Statistik BPS No. 47/05/Th. XX, 05 Mei 2017).

Lantas mengapa lulusan SMK menduduki tingkat pengangguran terbuka paling tinggi berdasarkan tingkat pendidikan yang diselesaikan?. Dalam hal ini Wijaya (2007) memberikan alasan mengapa penganggur yang berasal dari lulusan SMK begitu tinggi. Wijaya menyebutkan bahwa pada kenyataannya siswa lulusan SMK lebih senang menjadi pegawai atau buruh dan bahkan tidak bekerja sama sekali. Ada beberapa alasan, mengapa siswa SMK tidak tertarik berwirausaha setelah lulus SMK adalah karena tidak mau mengambil risiko, takut gagal, tidak memiliki modal dan lebih menyukai bekerja pada orang lain.

Alasan tersebut bertentangan dengan tujuan individu masuk SMK yang ingin cepat bekerja dan ingin membuka usaha sendiri. Di lain pihak upaya pemerintah senantiasa digalakkan untuk mendorong penciptaan wirausahawan. MP3EI (Master Plan Percepatan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia)

Adalah salah satunya, upaya yang digagas pada era Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono ini diterbitkan guna mendorong dan menumbuhkembangkan sumber daya manusia yang produktif dengan cara menempatkan pendidikan yang bermutu dan relevan sebagai basis pembangunannya (MP3EI, 2011) dan SMK menjadi salah satu upaya tersebut.

Minat berwirausaha merupakan prediktor terbaik dalam mempengaruhi perilaku berwirausaha (Krueger, *et al*, 2000, Fayolle dan Gailly, 2004). Dalam pengertian ini minat berwirausaha akan menjadi langkah pertama dalam proses yang berkembang dan kadang dalam proses jangka panjang bagi penciptaan sebuah usaha (Lee dan Wong, 2004). Dengan beragam prediktor yang mempengaruhi keinginan berwirausaha, maka, elemen kewirausahaan saat ini tidak hanya masuk di ruang-ruang kelas SMK, SMA, dan Aliyah tetapi juga pada beragam kegiatan ekstrakurikuler di sekolah yang diarahkan pada pembentukan sikap wirausaha siswa.

Tidak terkecuali di Kabupaten Garut. Kabupaten Garut adalah salah satu Kabupaten di Propinsi Jawa Barat yang memiliki potensi wirausaha, banyak hasil wirausaha daerah yang dikenal, seperti dodol garut, domba garut, jeruk keprok

Garut, kerajinan kulit Sukaregang, dan beragam wisata kuliner. Sehingga penulis memaknai kaitan program penciptaan wirausaha yang digalakkan pemerintah dengan “SMK”nya dengan potensi wirausaha di Kabupaten Garut. Seakan menemukan kesesuaiannya. Lulusan SMK di Kabupaten Garut adalah wirausahawan muda mandiri yang siap mengolah segenap potensi yang ada di daerahnya. Beranjak dari pemikiran diatas maka rasanya sangat relevan jika kemudian diadakan penelitian mengenai minat berwirausaha siswa SMK di Kabupaten Garut. Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka masalah penelitian akan dirumuskan dalam rumusan masalah sebagai berikut, Bagaimana pengaruh norma subyektif, persepsi kontrol perilaku, dan sikap wirausaha terhadap minat berwirausaha siswa SMK?.

Secara umum tujuan dari penelitian penulis adalah untuk menguji teori perilaku terencana yang digagas oleh Ajzen (1991) yang kemudian dikembangkan oleh Linan dan Chen (2009) menjadi sebuah model minat berwirausaha (*Entrepreneurial Intention Model*). Adapun secara khusus tujuan dari penelitian yang dilakukan penulis adalah untuk memperoleh gambaran dan membuktikan, pengaruh norma subyektif, persepsi kontrol perilaku, dan

sikap wirausaha terhadap minat berwirausaha siswa SMK.

METODE PENELITIAN

Penelitian dilakukan di Kabupaten Garut dengan lokasi yang diambil yaitu Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) 12 Garut. Dengan beberapa pertimbangan yaitu: SMK yang memfasilitasi siswa dengan mata pelajaran kewirausahaan; letak sekolah dekat dengan pusat pemerintahan kabupaten Garut; siswa berasal dari berbagai daerah yang berada di Kabupaten Garut.

Adapun jumlah sampel yang akan diujikan adalah berjumlah 128 responden. Analisis yang digunakan adalah analisis Model Persamaan Struktural (*Structural Equation Model/SEM*). Dalam analisis model persamaan struktural ada asumsi-asumsi yang harus dipenuhi dalam prosedur dan pengolahan datanya adapun asumsi tersebut menurut Ferdinand (Kusnendi, 2008) adalah sebagai berikut: Ukuran sampel yang harus dipenuhi dalam pemodelan adalah minimum berjumlah 100 dan selanjutnya menggunakan perbandingan lima observasi untuk setiap *estimated parameter*; normalitas dan linieritas. Sebaran data harus dianalisis untuk melihat apakah asumsi normalitas dipenuhi sehingga data dapat diolah lebih lanjut untuk pemodelan SEM; *outliers* yaitu observasi yang muncul dengan nilai-nilai ekstrim baik

secara univariat maupun multivariat; multikolinieritas dapat dideteksi dari determinan matriks kovarians yang sangat kecil memberikan indikasi adanya problem multikolinieritas atau singularitas.

Analisa data yang digunakan oleh penulis berbasis data empiris. Hal ini konsisten dengan asumsi analisa model persamaan struktural yang mensyaratkan data sekurang-kurangnya berskala interval. Sementara data yang terkumpul dalam penelitian ini jika diklasifikasi dalam skala psikologi termasuk kedalam jenis data ordinal. Pengujian asumsi dan analisis data penelitian menggunakan komputasi statistik melalui aplikasi program AMOS 20.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel 2. Deskripsi Jawaban Responden

Variabel	SMKN 12 Garut		
	Rata-rata	SD	Kategori
Norma Subyektif	23,23	2,437	Sedang
Persepsi Kontrol Perilaku	32,98	4,736	Tinggi
Sikap Wirausaha	29,88	3,701	Sedang
Minat Berwirausaha	35,89	4,309	Tinggi

Dari tabel tersebut menunjukkan bahwa norma subyektif dan sikap wirausaha siswa SMK berada pada level sedang. Sementara,

persepsi kontrol perilaku dan minat berwirausaha berada pada level tinggi. Tingginya persepsi kontrol perilaku berwirausaha dan minat berwirausaha, menurut pengamatan penulis di lapangan ditenggarai karena; lingkungan di sekitar tempat tinggal responden yang memiliki akses instrumen kesiapan; aktivitas kewirausahaan di sekitar tempat sekolah responden lebih besar dan lebih bervariasi. Hal ini tentu saja mempengaruhi minat siswa SMK dalam memandang kewirausahaan.

Menurut Hurlock (1978) perkembangan minat dipengaruhi oleh lingkungan dan budaya. Artinya bagi mereka yang berada di sekitar lingkungan dan budaya berwirausaha yang tinggi. Memiliki potensi lebih besar dikemudian hari untuk menjadi wirausahawan. Begitupun sebaliknya bagi mereka yang berada di sekitar lingkungan dan budaya wirausaha yang rendah. Kemungkinan potensi untuk menjadi wirausaha di masa depan akan minim; motivasi untuk keluar dari zona kenyamanan dengan memilih karir masa depan untuk menjadi wirausaha.

Uji asumsi statistik dilakukan dengan cara; uji normalitas data; uji *multivariate outliers*, dan; uji multikolinieritas. Hasil uji asumsi statistik menunjukkan data tidak normal karena munculnya beberapa variabel

yang menunjukkan nilai lebih tinggi dari $\pm 2,58$. Sehingga perlu dilakukan drop data responden yang terindikasi outliers sebanyak 4 data, setelah data yang tidak normal dan data yang diduga terindikasi outliers didrop maka diperoleh model sebagaimana ditunjukkan.

Overall model minat berwirausaha siswa SMK menunjukkan kriteria GFT sebagai berikut. nilai chi-squares = 126,121 dengan probabilitas $p = 0,003$ menunjukkan kriteria tidak fit. Begitu juga dengan kriteria fit lainnya AGFI = 0,831, GFI = 0,880 keduanya dibawah angka yang distandarkan yaitu 0,9. Sementara nilai TLI = 0,916 dan CFI 0,932 memenuhi kriteria fit. Juga nilai RMSEA = 0,064 berada dibawah nilai 0,08 juga memenuhi kriteria fit.

Sehingga secara keseluruhan dengan mempertimbangkan kriteria fit yang terpenuhi model fit dengan data. Maka secara keseluruhan model minat berwirausaha siswa SMK memenuhi kriteria fit, artinya model yang diusulkan mampu mengestimasi matriks kovariansi populasi yang tidak berbeda dengan matriks kovariansi data sampel. Hal tersebut mengindikasikan bahwa hasil estimasi yang diperoleh dari data sampel dapat dijadikan sebagai basis untuk membuat generalisasi tentang fenomena yang diteliti. Dilihat dari

loading factor ada variabel yang nilainya dibawah angka yang distandarkan 0,40 (Kusnendi, 2008). yaitu variabel $X_2 = 3,72$. Namun mempertimbangkan kelayakan indikator secara teori. Penulis, dalam hal ini mempertahankan indikator yang nilainya dibawah angka yang distandarkan tersebut. Secara parsial indikator dalam variabel persepsi kontrol perilaku, sikap wirausaha dan minat berwirausaha dilihat dari hasil uji kebermaknaan terhadap masing-masing koefisien bobot faktor menunjukkan seluruhnya signifikan pada tingkat kesalahan 5% dengan nilai estimasi koefisien bobot faktor yang distandarkan semuanya lebih besar dari angka minimal yang direkomendasikan sebesar 0,40.

Hal tersebut mengindikasikan bahwa masing-masing indikator memiliki validitas dan reliabilitas yang memadai dalam mengukur variabel persepsi kontrol perilaku, sikap wirausaha, dan minat berwirausaha. sementara hasil uji kebermaknaan terhadap masing-masing koefisien bobot faktor untuk variabel norma subyektif menunjukkan angka yang kurang dari angka yang distandarkan. Namun walaupun demikian sebagaimana disebutkan pada pernyataan terdahulu variabel tersebut tetap dipertahankan berdasarkan kelayakan secara teori. Untuk menguji ukuran konsistensi internal dari indikator-indikator sebuah

variabel. Maka penulis menggunakan cara composite construct reliability. cut off value dari construct reliability adalah 0,70.

Perhitungan reliabilitas konstruk didapatkan hasil sebagai berikut: Norma Subyektif = **0,4**. Persepsi Kontrol

Perilaku = **0,8**, Sikap Wirausaha = **0,6**, dan Minat Berwirausaha = **0,8**

Dilihat dari reliabilitas konstruk, hasil estimasi norma subyektif memberikan nilai sebesar 0,445 lebih kecil dari angka mutlak yang ditetapkan yaitu 0,70. Artinya bahwa secara komposit indikator X_1 , X_2 dan X_3 tidak memiliki konsistensi internal yang memadai. Begitu juga dengan hasil estimasi sikap wirausaha memberikan nilai sebesar 0,684 artinya bahwa indikator X_{16} , X_{17} , X_{18} dan X_{20} tidak memiliki konsistensi internal yang memadai.

Sementara, hasil estimasi reliabilitas konstruk untuk persepsi kontrol perilaku memberikan nilai sebesar 0,823 lebih besar dari angka mutlak yang ditetapkan yaitu 0,70. Artinya bahwa secara komposit indikator X_5 , X_6 , X_7 , X_8 , dan X_9 memiliki konsistensi internal yang memadai. Begitu juga dengan hasil estimasi minat berwirausaha memberikan nilai sebesar 0,819. Artinya bahwa secara komposit indikator X_{16} , X_{17} , X_{18} , dan X_{20} memiliki konsistensi internal yang memadai. Besarnya

pengaruh masing-masing variabel baik dapat kita lihat pada Tabel 3. secara langsung atau melalui variabel lain,

Tabel 3. Dekomposisi Pengaruh Antar Variabe

IHubungan Antar Variabel	Pengaruh			
	Langsung	Tidak Langsung Melalui		Total
		PKP	SW	
NS → PKP	0,692	-	-	0,692
NS → SW	0,774	-	-	0,774
NS → MB	0,064	0,224	0,456	0,744
PKP → MB	0,323	-	-	0,323
SW → MB	0,589	-	-	0,589

Estimasi nilai parameter sebagai pengujian dilihat dari hasil koefisien standardized terhadap hipotesis yang diajukan dapat regression yang terlampir pada Tabel 4.

Tabel 4. Regression Weights

	Estimate	S.E.	C.R.	P	Label
PKP <--- NS	,323				par_8
SW <--- NS	,515				par_9
MB <--- NS	,045				par_10
MB <--- PKP	,484	,241	2,009	,045	par_11
MB <--- SW	,621	,258	2,405	,016	par_12

Seperti telah dikemukakan penulis sebelumnya bahwa hipotesis nol (H_0) ditolak jika nilai C.R (t-hitung) lebih besar sama dengan dari 1,96. Penjelasan lebih lanjut dari pengujian hipotesis adalah sebagai berikut. Perhatikan hasil output model minat berwirausaha diatas juga memperhatikan hasil koefisien standardized regression

diperoleh estimasi parameter persamaan struktural sebagai berikut,

$$PKP = 0,69 NS + 0,136 errorvar ; R^2 = 0,864$$

Dari hasil output koefisien parameter didapatkan nilai t-hitung lebih rendah dari nilai standar yang ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa pengaruh norma

subyektif terhadap persepsi kontrol perilaku (H1) secara statistik tidak signifikan pada tingkat kesalahan $\alpha = 0,05$. artinya bahwa hipotesis I yang menyatakan norma subyektif berpengaruh positif terhadap persepsi control perilaku siswa SMK tidak dapat diterima. Memperhatikan hasil output model minat berwirausaha diatas juga memperhatikan hasil koefisien standardized regression diperoleh estimasi parameter persamaan struktural sebagai berikut,

$$\mathbf{SW = 0,77 NS + 0,211 errorvar ; R^2 = 0,789}$$

Dari hasil *output* koefisien parameter menunjukkan bahwa pengaruh norma subyektif terhadap sikap wirausaha secara statistik tidak signifikan pada tingkat kesalahan $\alpha = 0,05$. artinya bahwa hipotesis II yang menyatakan norma subyektif berpengaruh positif terhadap sikap wirausaha siswa SMK tidak dapat diterima. Memperhatikan hasil output model minat berwirausaha diatas juga memperhatikan hasil koefisien standardized regression diperoleh estimasi parameter persamaan struktural sebagai berikut;

$$\mathbf{MB = 0,064 NS + 0,323 PKP + 0,589 SW + 0,148 errorvar ; R^2 = 0,852}$$

Berdasarkan persamaan struktural diatas dapat dijelaskan hasil sebagai berikut, hasil output koefisien persepsi kontrol perilaku (X₂) didapatkan nilai = 0,323 dengan nilai t-

hitung 2,009. Hal ini menunjukkan bahwa pengaruh persepsi kontrol perilaku terhadap minat berwirausaha secara statistik signifikan pada tingkat kesalahan $\alpha = 0,05$.

Artinya persepsi control perilaku berpengaruh positif terhadap sikap wirausaha siswa SMK dapat diterima. Hasil output koefisien parameter sikap wirausaha (X₃) didapatkan nilai = 0,589 dengan nilai t-hitung 2,405. Hal ini menunjukkan bahwa pengaruh sikap wirausaha terhadap minat berwirausaha secara statistik signifikan pada tingkat kesalahan $\alpha = 0,05$. artinya bahwa sikap wirausaha berpengaruh positif terhadap minatberwirausaha siswa SMK dapat diterima.

Dari penjelasan diatas didapatkan kesimpulan bahwa secara simultan minat berwirausaha (X₄) dipengaruhi secara positif oleh norma subyektif (X₁), persepsi kontrol perilaku (X₂), dan sikap wirausaha (X₃) tidak dapat diterima. Namun, secara parsial hanya persepsi kontrol perilaku berpengaruh positif terhadap sikap wirausaha siswa SMK dapat diterima dan sikap wirausaha berpengaruh positif terhadap minat berwirausaha siswa SMK secara statistik dapat diterima.

Sementara dari hasil persamaan struktural diatas dapat dijelaskan bahwa Tinggi rendahnya minat berwirausaha siswa dipengaruhi positif oleh norma subyektif, persepsi kontrol perilaku, dan sikap

wirusaha. secara individual besarnya pengaruh norma subyektif terhadap minat berwirausaha adalah sebesar 0,064 (0,41%), pengaruh persepsi kontrol perilaku terhadap minat berwirausaha adalah sebesar 0,323 (10%) dan pengaruh sikap wirusaha sebesar 0,589 (35%). Hal tersebut menunjukkan bahwa sikap wirusaha memberikan pengaruh relatif cukup kuat terhadap minat berwirausaha dibanding variabel lainnya. Secara bersama-sama pengaruh variabel norma subyektif, persepsi kontrol perilaku, dan sikap wirusaha terhadap minat berwirausaha sebesar 85 %.

Hal ini menunjukkan variansi yang terjadi pada minat berwirausaha dapat dijelaskan oleh kuat lemahnya norma subyektif, persepsi kontrol perilaku, dan sikap wirusaha siswa. Sementara sisanya sebesar 15% merupakan variansi yang berasal dari variabel eksogen lain yang tidak terjelaskan dalam model. Besarnya error varian mengandung makna masih banyak variabel-variabel lain yang perlu digali lebih lanjut dan berpotensi memiliki kontribusi terhadap minat berwirausaha, selain variabel norma subyektif, persepsi kontrol perilaku, dan sikap wirusaha. Besarnya pengaruh sikap wirusaha terhadap minat berwirausaha mendukung penelitian Linan dan Chen (2006 dan 2009) yang diujikan

kepada mahasiswa asal spanyol. Sikap menurut Ajzen (1991) dibangun atas dasar kepercayaan-kepercayaan atau *beliefs*. Ajzen(1991) mengungkapkan *beliefs* ini sebagai *behavioral beliefs*. Seorang individu akan berniat untuk menampilkan suatu perilaku tertentu ketika ia menilainya secara positif. Selain itu, sikap juga ditimbang berdasarkan hasil evaluasi terhadap konsekuensinya (*outcome evaluation*).

Hal ini membuktikan bahwa sikap tidak hanya mencakup penilaian afektif (saya menyukainya, itu membuat saya merasa baik, itu menyenangkan), tetapi juga pertimbangan evaluatif (itu lebih menguntungkan, itu memberi manfaat yang lebih) (Linan & Chen, 2006). Variabel lainnya yang memiliki kontribusi terhadap minat berwirausaha adalah persepsi kontrol perilaku/efikasi diri. Walaupun memiliki kontribusi cukup rendah (10%). Namun, secara teoritis kontribusi persepsi kontrol perilaku/efikasi diri terhadap minat berwirausaha telah dikonfirmasi oleh para peneliti sebelumnya seperti Ajzen (1991), Linan dan Chen (2006 dan 2009), Nastiti, Indarti, dan Rostiani (2010), Iskandar (2012).

SIMPULAN

Teknik persamaan struktural yang digunakan dalam analisis empiris di sekolah menengah

kejuruan, hasilnya kurang memuaskan, hal ini menunjukkan masih adanya keterbatasan instrumen walaupun demikian model minat berwirausaha yang dikembangkan Linan dan Chen (2009) yang diadaptasi dari teori perilaku terencana Ajzen masih dirasa cukup memadai untuk mempelajari kewirausahaan dengan memasukan beberapa penambahan yang disesuaikan dengan lingkungan dan budaya yang berkembang di SMK khususnya di Kabupaten Garut umumnya di Indonesia.

Hasil penelitian menunjukkan norma subyektif tidak berpengaruh positif terhadap persepsi kontrol perilaku juga sikap wirausaha. Begitu pula norma subyektif, persepsi control perilaku tidak berpengaruh positif terhadap minat berwirausaha secara simultan. Namun secara parsial terdapat hubungan positif persepsi kontrol perilaku dan sikap wirausaha terhadap minat berwirausaha. Berdasarkan penelitian ini penulis memberikan rekomendasi kepada pemerintah, jika pemerintah memiliki ekspektasi untuk dapat mencetak siswa-siswa yang memiliki pengetahuan kewirausahaan yang cukup. Hal ini bisa dimulai dengan menyiapkan kurikulum yang dapat memfasilitasi dan meningkatkan kewirausahaan siswa SMK. Kemudian menyiapkan guru-guru yang memiliki

wawasan kewirausahaan baik secara teoritis maupun praktis yang cukup memadai.

REFERENSI

- Ajzen, I. (1991): "The Theory of Planned Behavior", *Organizational Behavior and Human Decision Processes*, 50, 179-211.
- Ajzen, I dan Fishbein, M. (1975). *Belief, Attitude, Intention and Behavior: An Introduction To Theory And Research*. Philipines: Addison Wesley Publishing Company.
- Baumol, W. J. Litan, R. E. Schramm, C. J. (2007): "Sustaining Entrepreneurial Capitalism". *Capitalism and Society*, Vol. 2, Issue 2. 1-36.
- BeritaStatistik BPS No. 47/05/Th. XX, 05 Mei 2017. Keadaan Ketenagakerjaan Indonesia Februari 2017.
- Fayolle, A. and Gailly, B. (2004). "Using The Theory of Planned Behaviour to Assess Entrepreneurship Teaching Programs: A First Experimentation", *IntEnt2004 Conference*, Naples (Italy), 5-7 July.
- Hurlock, E. B. (1978). *Perkembangan Anak*. Jakarta: Erlangga.
- Iskandar. (2012). *Efektivitas Pendidikan Kewirausahaan Dalam Mengembangkan Intensi Kewirausahaan Mahasiswa: Studi Tentang Faktor-Faktor yang*

- Mempengaruhi Intensi Sampel Dengan LISREL. Bandung: Penerbit Alfabeta.*
- Kewirausahaan Mahasiswa*
- Berdasarkan Pendekatan*
- Entrepreneurial Intention Based Model Pada Mahasiswa Perguruan Tinggi di Wilayah Cirebon. Disertasi Doktor Pada SPS UPI Bandung: Tidak Diterbitkan.*
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. (2008). Edisi Keempat. Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional.
- Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. (2011). *Master Plan Percepatan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025*. Jakarta: Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
- Kolvereid, L. (1996): "Prediction of Employment Status Choice Intentions", *Entrepreneurship Theory & Practice*, 21 (1), 47-57.
- Krueger, N. F. Reilly, M. D. Carsrud, A. L. (2000). "Competing models of Entrepreneurial Intentions". *Journal of Business Venturing*, 411-432.
- Kusnendi. (2008). *Model-Model Persamaan Struktural Satu dan Multigroup*
- Lee, S.H. and Wong, P.K. (2004): "An Exploratory Study of Technopreneurial Intentions: a Career Anchor Perspective", *Journal of Business Venturing*, 19, 7-28.
- Liñán, F dan Chen, Y. W. (2006). *Testing The Entrepreneurial Intention Model on a Two-Country Sample*. Barcelona: Departament d'Economia de l'Empresa Universitat Autònoma de Barcelona.
- Liñán, F dan Chen, Y. W. (2009). "Development and Cross-Cultural Application of a Specific Instrument to Measure Entrepreneurial Intention". *Entrepreneurship Theory and Practice*, 593-617.
- Misra, S. Dan Kumar, E. S. (2000). "Resourcefulness: A Proximal Conceptualisation of Entrepreneurship Behaviour". *Journal of Entrepreneurship*, 2000; 9; 135-153.
- Nastiti, N. Indarti, N. Rostiani, R. (2010). "Minat Berwirausaha Mahasiswa Indonesia dan Cina". *Jurnal Manajemen dan Bisnis*. Vol. 9, No. 2 September: 188-200.

Reynolds, P.D. (1997): “Who Start New Firms? – Preliminary Explorations of Firms-In-Gestation”, *Small Business Economics*, 9 (5), 449-462.

Suryana. (2009). *Kewirausahaan Pedoman Praktis: Kiat dan Proses Menuju Sukses*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.

United Nations Conference on Trade and Development. (2004). *Entrepreneurship and Economic Development: The empretec Showcase*. Geneva: United Nations Conference on Trade and Development.

Wijaya, T. (2007). “Hubungan *Adversity Intelligence* Dengan *Intensi Berwirausaha*”. *Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan*. Vol. 9, No. 2, September: 117-127.

Wikipedia. (2013, 24 Juni). Kewirausahaan. Tersedia <http://id.m.wikipedia.org/wiki/kewirausahaan>.

**PERSEPSI MAHASISWA AKUNTANSI TERHADAP PROFESI AKUNTAN
PUBLIK**

Herlin¹, Marlinda Sari²

¹²Universitas Dehasen Bengkulu

Email : herlin.olin81@gmail.com

Diterima: 3 Juni 2018; Direvisi: 7 Juni 2018; Disetujui: 25 Juni 2018

Abstract

This research aims to gain the perception or attitude of the students towards the profession of public accounting. This research was done at the University of Bengkulu Dehasen addressed to the accounting student with the number of respondents as many as 55 people. To get the perception of this study uses census with sampling method research tool questionnaire presented to students by way of accounting to meet directly and ask for the willingness of the time to fill out the questionnaire provided. The results of this study proves that the most dominant factor affect the perception of accounting students of Dehasen Bengkulu University to the profession of public accountant is the personality and professional recognition. While the factor of financial reward and work environment Does not affect the perception of accounting students of Dehasen University of Bengkulu to the public accountant profession

Keywords: *Accounting, Profession, Public Accountant*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan persepsi atau sikap dari mahasiswa akuntansi terhadap profesi akuntan publik. Penelitian ini di lakukan di Universitas Dehasen Bengku dengan jumlah responden sebanyak 55 orang yaitu mahasiswa jurusan akuntansi. Metode penelitian menggunakan metode total sampling atau sensus dengan menggunakan alat penelitian berupa kuesioner. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa faktor yang paling dominan mempengaruhi persepsi mahasiswa akuntansi Universitas Dehasen Bengkulu terhadap profesi akuntan publik adalah personalitas dan pengakuan professional. Sedangkan faktor penghargaan finansial dan lingkungan kerja tidak mempengaruhi persepsi mahasiswa akuntansi Universitas Dehasen Bengkulu terhadap profesi akuntan publik.

Kata Kunci: Akuntansi, Profesi, Akuntan Publik

PENDAHULUAN

Akuntan Publik merupakan seorang yang secara profesional memiliki izin resmi untuk mendirikan kantor akuntan public. Ludigdo

dan Machfoedz (1997), profesi akuntan

Indonesia pada masa yang akan datang menghadapi tantangan yang semakin berat.

Untuk itu, kesiapan yang menyangkut profesionalisme profesi seperti keahlian (*skill*), karakter (*character*), dan pengetahuan (*knowledge*) mutlak diperlukan.

Profesi akuntan telah diatur oleh pemerintah dari berbagai regulasi, terutama untuk akuntan publik. Menurut UU Akuntan

Publik No. 5 Tahun 2011, akuntan publik adalah seseorang yang telah memperoleh izin untuk memberikan jasa sebagaimana

diatur dalam Undang-Undang tersebut.

Profesi akuntan publik diuntut untuk mampu bertindak dan bekerja secara

profesional dan menjalankan profesinya sesuai etika yang sudah ada. profesi Akuntan

Publik memiliki peranan yang besar dalam

mendukung perekonomian nasional yang

sehat dan efisien serta meningkatkan transparansi dan mutu informasi dalam

bidang keuangan. Akuntan publik

mengemban kepercayaan masyarakat untuk

memberikan opini atas kewajaran laporan

keuangan perusahaan. Profesi akuntan

publik menjanjikan prospek yang cerah

karena memberikan tantangan intelektual

dan pengalaman belajar yang tidak ternilai, dan memberikan peluang untuk mendapatkan pekerjaan yang menantang dan bervariasi karena dapat ditugaskan di berbagai tempat dan berbagai perusahaan yang memiliki ciri dan kondisi yang berbeda.

Profesi akuntan publik termasuk dalam profesi-profesi termahal, karena lingkup pekerjaan yang dilakukan oleh akuntan publik pada umumnya terdiri dari pekerjaan audit, akuntansi, pajak, dan konsultasi manajemen. Seorang akuntan publik dibatasi oleh kode etik dalam melaksanakan pekerjaannya. Gelar akuntan yang diperoleh oleh akuntan publik hanya dapat dipakai oleh mereka yang telah terdaftar pada Departemen Keuangan yang dibuktikan pemberian nomor register.

Halim (2015), untuk menjadi seorang akuntan publik harus memenuhi kriteria yaitu menyelesaikan pendidikan dari perguruan tinggi dan dinyatakan lulus pendidikan profesi akuntansi atau lulus ujian sertifikasi akuntan profesional, berpengalaman di bidang akuntansi, dan sebagai anggota Profesi Akuntan. Sudibyo dalam Ludigdo dan Machfoedz (1999) menyatakan bahwa dunia pendidikan akuntansi juga mempunyai pengaruh yang besar terhadap perilaku kode etik akuntan yang merupakan bagian dari profesi akuntan.

Di Provinsi Bengkulu yang berprofesi sebagai akuntan publik masih sangat sedikit. Mahasiswa pada dasarnya merupakan subjek atau pelaku didalam pergerakan pembaharuan yang akan menjadi generasi-generasi penerus bangsa yang pada saatnya nanti akan memasuki dunia kerja.

Profesi akuntan publik nantinya akan menjadi salah satu pilihan pekerjaan yang menarik dan menjanjikan bagi mahasiswa akuntansi dengan mengandalkan keahlian dan keterampilan yang tinggi serta berperilaku secara independen. Salah satu profesi akuntan yang sangat populer di masyarakat dan khususnya dikalangan mahasiswa akuntansi ialah Profesi Akuntan Publik (Nurani, 1990).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dan kualitatif. Martono (2014:20), penelitian kuantitatif adalah penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data yang berupa angka, atau data berupa kata-kata atau kalimat yang dikonversi menjadi data yang berbentuk angka. Sugiyono (2012), metode kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, pengambilan sampel

sumber data dilakukan secara *pusposive* dan *snowball*. Teknik pengumpulan dengan triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi. Sugiyono (2012), sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut.

Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik sampling dengan *non probability sampling*, yaitu metode pengambilan sampel dengan tidak memberikan peluang yang sama bagi setiap unsur (anggota) populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel. Teknik yang digunakan untuk menentukan sampel dalam penelitian ini yaitu sampling sensus, dimana semua anggota populasi dijadikan sampel (Sugiyono, 2012), sampling sensus adalah. Populasi dalam penelitian ini adalah mahasiswa reguler jurusan berjumlah 55 orang mahasiswa. Metode pengumpulan data di dalam penelitian ini digunakan untuk mendapatkan data yang akurat, aktual dan relevan. Metode pengumpulan data menggunakan Kuesioner (angket). Menurut Sugiyono (2012), Kuesioner adalah teknik pengumpulan data dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya.

Penggunaan metode kualitatif ini bertujuan agar memperoleh hasil yang optimal sehingga penelitian ini dapat mencapai tujuan yang diharapkan. Analisis *rating scale*. Sugiyono (2012) memberikan pengertian *rating scale* adalah data mentah yang diperoleh berupa angka yang kemudian ditafsirkan dalam bentuk kualitatif. Analisis ini menggunakan sebuah *statement* dengan skala lima (5) yang mana menunjukkan setuju dan tidak setuju terhadap pernyataan dengan menggunakan *scala likert*.

Tabel 1. Skala Likert

Kategori	Skor
Sanga sangat Setuju	5
Setuju	4
Ragu-ragu	3
Tidak Setuju	2
Sangat Tidak Setuju	1

Berdasarkan tabel di atas nilai kriterium interval setiap kelas sebesar 220 maka tertinggi yaitu 5, dengan Rumus Kriterium jawaban responden dapat disusun sebagai berikut ini :

$$\text{Kriterium} = \frac{\text{Skor Tertinggi} \times \text{Jumlah Pertanyaan}}{\text{Jumlah Responden}}$$

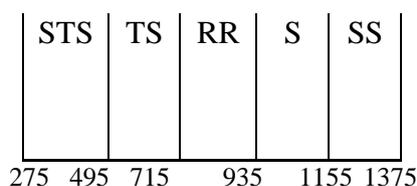
Setelah nilai kriterium ditemukan selanjutnya menentukan nilai Interval Kelas (IK).

Untuk mendapatkan nilai interval kelas tersebut menurut Sugiyono (2012) yaitu bobot tertinggi-bobot terendah/jumlah kelas yaitu $(1375-275)/5= 220$. Dengan nilai

- a. 275 – 495 = Sangat Tidak Setuju
- b. 496 – 715 = Tidak Setuju
- c. 716 – 935 = Ragu-ragu
- d. 936 – 1.155 = Setuju
- e. 1.156 – 1.375= Sangat Setuju

Setelah nilai interval kelas diketahui tahapan selanjutnya jawaban tersebut dimasukkan kedalam bentuk interval *rating scale* dengan gambar sebagai berikut :

Gambar 2. Kategori Kontinum



Sumber : Sugiyono (2012)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Universitas Dehasen adalah salah satu Universitas Swasta yang ada di Kota Bengkulu, dengan lokasi yang strategis, terletak di tengah-tengah Kota Bengkulu. Universitas Dehasen Bengkulu didirikan berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 39/D/O/2008 tanggal 17 Maret 2008. Universitas Dehasen Bengkulu secara sah diakui oleh pemerintah yang

memiliki Fakultas Ilmu Komputer, Fakultas Ekonomi, Fakultas Pertanian, Fakultas Teknik, Fakultas Sastra, dan Fakultas Ilmu sosial. Setelah melakukan penelitian kepada mahasiswa akuntansi Universitas Dehasen Bengkulu kelas reguler, maka didapat tanggapan responden melalui kuesioner yang meliputi 4 item pernyataan dengan masing-masing item terdiri dari 4 pernyataan.

Tabel 2. Persepsi Responden Terhadap Penghargaan Finansial

Pernyataan	Tanggapan Responden					Jumlah Skor	Rata-rata
	SS	S	RR	TS	STS		
Profesi akuntan publik adalah profesi yang memiliki <i>fee</i> yang menjanjikan	9	44	2	0	0	227	4,127
Menurut anda profesi akuntan publik tidak termasuk pekerjaan yang memberikan jaminan di masa depan (dana pensiun).	0	32	8	12	3	179	3,254
Menurut anda profesi akuntan publik akan memperoleh bonus kerja apabila kinerja yang dilakukan baik.	6	24	18	5	2	192	3,490
Menurut anda profesi akuntan publik tidak termasuk pekerjaan yang memberikan kenaikan gaji yang relatif cepat.	3	27	17	7	1	189	3,436
JUMLAH						787	14,309

Tabel 2 diatas dapat diketahui bahwa jumlah skor jawaban yang diberikan oleh mahasiswa akuntansi terhadap penghargaan finansial sebesar 787 atau nilai rata-rata 14,309. Hal ini menempatkan penghargaan

finansial berada pada interval kelas 716 – 935 atau ragu-ragu. Sehingga dari penjelasan tersebut dapat digambarkan grafik kontinum seperti pada gambar berikut ini:

Gambar 1. Kategori Kontinum Penghargaan Finansial

Sangat Tidak Setuju	Tidak Setuju	Ragu-ragu	Setuju	Sangat Setuju
275	495	715	935	1.155
787				
275	495	715	935	1.155
1.375				

Berdasarkan tabel 2 dan gambar 1 diketahui bahwa faktor penghargaan finansial sebesar 787 berada pada interval kelas 715-935 (RR) yang berarti bahwa faktor penghargaan finansial merupakan faktor yang kurang dominan.

Tabel 3. Persepsi Responden Terhadap Pengakuan Professional

Pernyataan	Tanggapan Responden					Jumlah Skor	Rata-rata
	SS	S	RR	TS	STS		
Profesi akuntan publik menuntut keahlian dan kemampuan dalam bekerja.	37	18	0	0	0	257	4,672
Profesi akuntan publik mampu memberikan kesempatan untuk berkembang.	17	37	1	0	0	236	4,290
Profesi akuntan publik akan memberikan pengakuan atas prestasi yang diperoleh.	6	36	13	0	0	213	3,872
Profesi akuntan publik memerlukan keahlian tertentu untuk mencapai sukses.	33	21	1	0	0	252	4,581
JUMLAH						958	17,418

Dari tabel 2 diatas dapat diketahui bahwa jumlah skor jawaban terhadap pengakuan profesional sebesar 958 atau nilai rata-rata 17,418. Berada pada interval kelas 936 – 1.155 atau setuju. Sehingga dari penjelasan tersebut dapat digambarkan grafik kontinum seperti pada gambar berikut ini:

Gambar 2. Kategori Kontinum Pengakuan Profesional

Sangat Tidak Setuju	Tidak Setuju	Ragu-ragu	Setuju	Sangat Setuju
275	495	715	935	1.155
958				
275	495	715	935	1.155
1.375				

Berdasarkan tabel 2 dan gambar 2 diketahui bahwa jawaban responden terhadap pengakuan profesional sebesar 958 berada pada interval kelas 935-1155 Setuju (S),

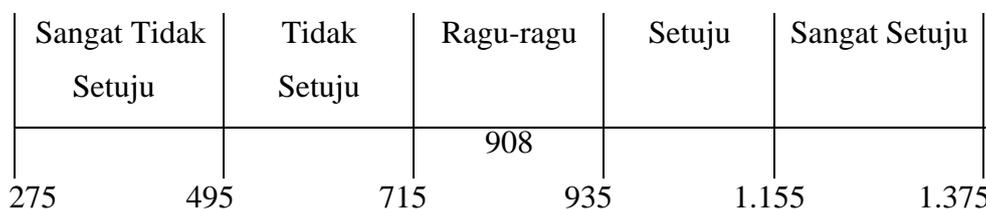
yang berarti bahwa faktor pengakuan profesional merupakan faktor yang cukup dominan.

Tabel 4. Persepsi Responden Terhadap Lingkungan Kerja

Pernyataan	Tanggapan Responden					Jumlah Skor	Rata-rata
	SS	S	RR	TS	STS		
Seorang akuntan publik dituntut untuk dapat beradaptasi dan bersosialisasi dengan lingkungan kerja agar dapat mencapai target kerja yang diwajibkan	35	17	2	1	0	251	4,563
Dalam lingkungan kerja pada Kantor Akuntan Publik Profesi akuntan publik memberikan pekerjaan rutin.	3	29	19	4	0	196	3,563
Profesi akuntan publik menuntut kinerja yang atraktif.	10	37	8	0	0	222	4,036
<i>Deadline</i> waktu yang diberikan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan mendorong akuntan akuntan untuk bekerja lembur.	26	23	5	1	0	239	4,345
JUMLAH						908	16,509

Dari tabel 4 diatas dapat diketahui bahwa jumlah skor jawaban yang diberikan oleh mahasiswa akuntansi terhadap profesional sebesar 908 atau nilai rata-rata 16,509. Hal ini menempatkan pengakuan

Gambar 3. Kategori Kontinum Lingkungan Kerja



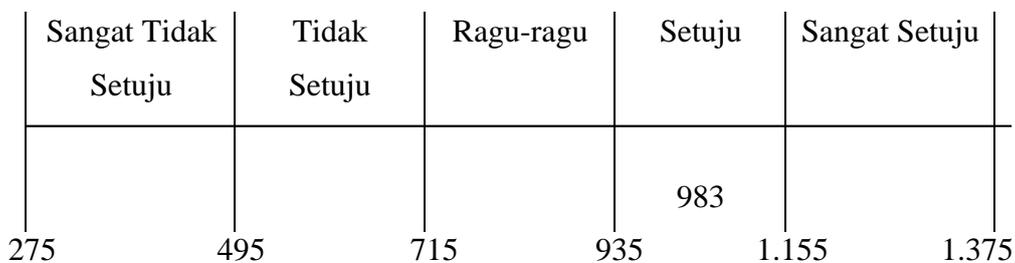
Berdasarkan tabel 4 dan gambar 3 kerja merupakan faktor yang masih diragukan dalam mengambil keputusan. lingkungan diragukan dalam mengambil keputusan.

Tabel 6. Persepsi Responden Terhadap Personalitas

Pernyataan	Tanggapan Responden					Jumlah Skor	Rata-rata
	SS	S	RR	TS	STS		
Profesi akuntan publik memberi kesesuaian pekerjaan dengan kepribadian yang dimiliki.	20	27	4	4	0	228	4,145
Profesi akuntan publik adalah profesi yang tidak mudah terpengaruh, tidak memihak, bahkan dengan klien yang membayarnya.	33	13	6	1	0	247	4,490
Profesi publik harus memenuhi tanggungjawab profesionalnya dengan integritas seinggi mungkin	36	16	3	0	0	253	4,6
Profesi akuntan publik harus selalu bertindak tegas dan jujur dalam setiap penugasan audit yang dilakukan.	39	13	2	1	0	255	4,654
						983	17,872

Dari tabel 6 diatas dapat diketahui bahwa pada interval kelas 936 – 1.155 atau setuju. jumlah skor jawaban yang diberikan oleh mahasiswa akuntansi terhadap personalitas sebesar 983 atau nilai rata-rata 17,872. Hal ini menempatkan pengakuan jabatan berada

Sehingga dari penjelasan tersebut dapat digambarkan grafik kontinum seperti pada gambar berikut ini

Gambar 4. Kategori Kontinum Personalitas

Berdasarkan tabel 6 dan gambar 4 diketahui bahwa *rating scale* jawaban responden terhadap elemen personalitas sebesar 983 berada pada interval kelas 935-1.155 (S), yang berarti bahwa faktor personalitas merupakan faktor yang cukup dominan dalam mempengaruhi persepsi mahasiswa akuntansi terhadap profesi akuntan publik.

Persepsi mahasiswa akuntansi Universitas Dehasen Bengkulu terhadap penghargaan finansial mendapatkan skor sebanyak 787 dengan rata-rata 14,309, ini menunjukkan bahwa penghargaan finansial merupakan faktor yang belum dapat mempengaruhi persepsi mahasiswa akuntansi terhadap profesi akuntan publik. Hal ini bisa terjadi

karena dalam profesi akuntan publik tidak memberikan jaminan di masa depan (dana pensiun), tidak memperoleh bonus kerja, dan kenaikan gaji yang harus diiringi dengan kemampuan skill kerja dan loyalitas sebagai timbal baliknya. Pengakuan profesional mendapatkan skor sebanyak 958 dengan rata-rata 17,418, lingkungan kerja mendapatkan skor sebanyak 908 dengan rata-rata 16,509 dan mendapatkan skor 983 dengan rata-rata 17,872.

Dari hasil tersebut dapat diketahui bahwa personalitas menjadi faktor dominan dalam profesi akuntan publik, sementara penghargaan finansial belum dapat menjadi faktor dominan dalam profesi akuntan publik. Penghargaan finansial mendapatkan nilai berjumlah 908 (RR). Dengan kata lain bahwa faktor lingkungan kerja tidak dipertimbangkan mahasiswa akuntansi dalam memilih karier sebagai akuntan publik. lingkungan kerja belum menjadi faktor dominan bagi mahasiswa akuntansi yang ada dalam persepsi mahasiswa akuntansi terhadap profesi akuntan publik.

Dari penjelasan diatas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa faktor lingkungan kerja merupakan faktor yang belum mampu mempengaruhi mahasiswa akuntansi untuk berprofesi sebagai akuntan publik dimana pernyataan yang diuji

meliputi sifat pekerjaan. Berdasarkan pada hasil penelitian personalitas merupakan salah satu determinan yang potensial terhadap perilaku individu saat berhadapan dengan situasi atau kondisi tertentu. Personalitas menunjukkan bahwa bagaimana mengendalikan atau mencerminkan kepribadian seseorang dalam bekerja. Pernyataan tentang personalitas dengan nilai 983 (S) artinya personalitas menjadi pertimbangan mahasiswa akuntansi dalam memilih karier sebagai akuntan publik. hal ini dikarenakan faktor personalitas menunjukkan bahwa bagaimana mengendalikan atau mencerminkan kepribadian seseorang dalam bekerja.

SIMPULAN

Berdasarkan dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa faktor penghargaan finansial dengan nilai 787 dengan rata-rata 14,309 berada pada interval kelas 715-935 atau Ragu-ragu (RR). ini menunjukkan bahwa penghargaan finansial merupakan faktor yang belum dapat mempengaruhi persepsi mahasiswa akuntansi Universitas Dehasen terhadap profesi akuntan publik. Pengakuan profesional dengan nilai skor sebanyak 958 dengan rata-rata 17,418 berada pada interval kelas 935 – 1.155 atau Setuju (S). artinya faktor pengakuan professional dapat mempengaruhi persepsi

mahasiswa akuntansi Universitas Dehasen Bengkulu terhadap profesi akuntan publik. Lingkungan kerja mendapatkan skor sebanyak 908 dengan rata-rata 16,509 dan mendapatkan skor 983 dengan rata-rata 17,872 artinya faktor lingkungan kerja belum mampu mempengaruhi mahasiswa akuntansi untuk berprofesi sebagai akuntan publik dimana pernyataan yang diuji meliputi sifat pekerjaan.

Personalitas merupakan salah satu determinan yang potensial terhadap perilaku individu saat berhadapan dengan situasi atau kondisi tertentu. Personalitas menunjukkan bahwa bagaimana mengendalikan atau mencerminkan kepribadian seseorang dalam bekerja. Pernyataan tentang personalitas dengan nilai 983 (S) artinya personalitas menjadi pertimbangan mahasiswa akuntansi dalam memilih karier sebagai akuntan publik. hal ini dikarenakan faktor personalitas menunjukkan bahwa bagaimana mengendalikan atau mencerminkan kepribadian seseorang. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa faktor yang paling dominan yang mempengaruhi persepsi mahasiswa akuntansi Universitas Dehasen Bengkulu adalah personalitas dan pengakuan profesional.

REFERENSI

- Budiman. (2012). *Etika Profesi Guru*. Yogyakarta. Mentari Pustaka.
- Dermawan.D dan Sujono. R. (2010). *Keperawatan Profesional, Edisi pertama, Cetakan Pertama*. Yogyakarta. Gosyen Publishing.
- Dewi. Y.S. (2010). *Bekerja Sebagai Akuntan*. Jakarta. Erlangga.
- Halim. A.. (2015). *Auditing 1, Cetakan Kelima*. Yogyakarta. UPP STIM YKPN.
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2011). *Standar Profesional Akuntan Publik*. Jakarta. Salemba Empat.
- Khairani. M. (2016). *Psikologi Umum Cetakan II, Edisi Revisi*. Yogyakarta. Aswaja Pressindo.
- Ludigdo. U dan Machfoedz.M (1999). Persepsi Akuntan dan Mahasiswa terhadap Etika Bisnis. *Jurnal Riset Akuntansi Indonesia*, Januari: 1-19.
- Nurani Y.A.B.B, (1990). *Persepsi Mahasiswa dan Profesi Akuntan terhadap Masalah Akuntansi dan Profesi Akuntansi*. Tesis. Yogyakarta: Universitas Gajah Mada. Sumber Rujukan dari website
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 25/PMK.01/2014 tentang Akuntan Berregister Negara
- Pieter. HZ dan Lubis.NL. (2010). *Pengantar Psikologi Dalam Keperawatan*. Jakarta. Prenada Media Group.

376 AGREGAT: Jurnal Ekonomi dan Bisnis
Vol. 2, No. 2, September 2018
<http://journal.uhamka.ac.id/index.php/agregat>
p-ISSN: 2580-3360 e-ISSN: 2581-2874
DOI: 10.22236/agregat_vol1/is4pp366-376
Hal 366-376

Sunyoto.D. (2013). *Auditing (Pemeriksaan Akuntansi)*. Yogyakarta. Center Of Academic Publishing Service.

Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung. Alfabeta, CV.

Suprihatiningrum.J.2014.*Guru Profesional, Cetakan II*.Yogyakarta.Ar-Ruzz Media.

Suwarno.W. (2009). *Psikologi Perpustakaan*.Jakarta.CV Sagung Seto.

Undang-Undang No.5 tahun 2011 tentang Akuntan Publik.

KOMPONEN INFORMASI DAN KOMUNIKASI SERTA PEMANTAUAN ATAS SIKLUS PENGELUARAN

Hera Khairunnisa

Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA

Email: hera.uhamka@gmail.com

Diterima: 3 Juni 2018; Direvisi: 7 Juni 2018; Disetujui: 25 Juni 2018

Abstract

This research aims to analyze and give suggestion on internal control system in expenditure cycle of Unit A by comparing components on the Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO) internal control framework that consisted of environment control, risk assessment, control activity, information and communication, and monitoring. The method of analysis data is using qualitative analysis by gathering data with interview, document review, and literature review. Conclusion from information and communication component is that the entity does not have standard information on the completeness of supporting data for cash disbursement transactions. Conclusion of monitoring is that the logistic manager has not conducted optimal monitoring of the process of receiving goods in the warehouse.

Keywords: *Information and communication, monitoring, expenditure cycle, COSO, Unit A.*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan memberi usulan pada sistem pengendalian internal siklus pengeluaran kas Unit A dengan membandingkan komponen-komponen dalam kerangka pengendalian internal dari Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (CO-SO) yang terdiri dari lingkungan pengendalian, penilaian risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, dan pemantauan. Metode analisis data menggunakan analisis kualitatif dengan mengumpulkan data yang bersumber dari wawancara, telaah dokumen, dan tinjauan pustaka. Kesimpulan penelitian atas penelaahan komponen informasi dan komunikasi yaitu entitas belum memiliki standar informasi atas kelengkapan data pendukung transaksi pengeluaran kas. Kesimpulan atas pemantauan yaitu manajer logistik belum melakukan pemantauan optimal atas proses penerimaan barang di gudang.

Kata kunci: Informasi dan komunikasi, pemantauan, siklus pengeluaran kas, COSO, Unit A.

PENDAHULUAN

Kecurangan merupakan tindakan yang dilakukan secara sengaja oleh seseorang yang dapat mengakibatkan kesalahan material pada penyajian laporan keuangan suatu perusahaan (Astuti, Zuhrotun, dan Kusharyanti, 2015). Pada umumnya, kecurangan terbagi menjadi tiga bentuk yaitu penyalahgunaan aset, kecurangan laporan keuangan, dan korupsi (Astuti, Zuhrotun, dan Kusharyanti). Kecurangan yang dilakukan oleh oknum-oknum tertentu berdampak negatif pada eksistensi perusahaan tersebut. Enron merupakan salah satu perusahaan yang runtuh akibat adanya kecurangan yang dilakukan oleh oknum perusahaan.

Enron merupakan perusahaan penyedia energi terbesar didunia pada era 2000-an (Astuti, Zuhrotun, dan Kusharyanti, 2015). Enron melakukan tindak kecurangan dengan melaporkan sejumlah pendapatan di laporan keuangannya sementara fakta yang ada justru membuktikan perusahaan tersebut mengalami kerugian (Ghozali dan Achmad, 2018). Adanya kecurangan tersebut membuat Enron mengalami keterpurukan dan akhirnya mengalami kebangkrutan. Runtuhnya Enron tersebut mengakibatkan kerugian \$70 Miliar di pasar modal (Huang *et al.*, 2016). Di Indonesia juga terdapat beberapa perusahaan yang melakukan tindak kecurangan dalam kegiatan usahanya. Kecurangan atas

pelaporan keuangan di Indonesia dilakukan oleh PT Kimia Farma, PT Pakuwon Jati, PT Energi Mega Persada, PT Waskita Karya, dan sebagainya (Astuti, Zuhrotun, dan Kusharyanti, 2015). PT Kimia Farma memanipulasi angka di laporan keuangannya (Ghozali dan Achmad, 2018). Kecurangan tersebut membuat pengguna laporan keuangan dibohongi karena angka laporan keuangan yang tertera dalam laporan keuangan tersebut merupakan hasil rekayasa dari manajemen. Rekayasa atas informasi di dalam laporan keuangan memicu kesalahan pada pengambilan keputusan yang dilakukan oleh pengguna laporan keuangan.

Kasus kecurangan yang terjadi pada Enron membuktikan bahwa perusahaan tersebut kurang menerapkan nilai etika dalam praktik bisnisnya (Said, *et al.*, 2017). Penerapan nilai etika merupakan bagian penting dari penerapan sistem pengendalian internal perusahaan. Lokanan (2014) juga menyatakan bahwa kecurangan pada pelaporan keuangan yang dilakukan oleh perusahaan disebabkan oleh belum optimalnya penerapan pengendalian internal di perusahaan tersebut. Pengendalian internal menurut Romney dan Steinbart (2015) yaitu suatu sistem yang berkaitan dengan prosedur dan praktik yang dikembangkan oleh entitas yang bertujuan untuk mengamankan aset, memastikan

keakuratan informasi akuntansi, meningkatkan efisiensi, dan mengukur kepatuhan manajemen pada kebijakan dan prosedur. Pengendalian internal tidak hanya diterapkan pada entitas berskala bisnis besar, namun dapat diterapkan pula pada entitas berskala kecil. Penerapan sistem pengendalian internal berbeda antara satu entitas dengan entitas lain tergantung dari berbagai faktor (Giriunas, 2009).

Mutu dari pengendalian internal dapat dinilai dari penelaahan desain dan implementasinya melalui kerangka pengendalian yang ada (Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission, 2013). Pengendalian internal yang didefinisikan oleh Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commissions memiliki arti yaitu suatu proses yang dipengaruhi oleh peran direksi, manajemen, dan karyawan yang dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai terkait dengan pencapaian tiga aspek tujuan yaitu operasional, pelaporan, serta kepatuhan. Keefektivan sistem pengendalian internal dapat dinilai dari implementasi kelima komponen kerangka pengendalian internal dari Committee of Sponsoring Organizations of The Treadway Commission (COSO) (Lansiluoto, Jokipii, dan Eklund, 2016). Komponen pengendalian internal yang disusun oleh

Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission pada 2013 terdiri dari lingkungan pengendalian, penilaian risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, serta kegiatan pemantauan. Awalnya, penelitian ini dilakukan dengan wawancara pendahuluan dengan objek penelitian untuk mengetahui permasalahan penelitian. Wawancara pendahuluan tersebut melibatkan Satuan Pengawasan Internal (SPI) Yayasan X. Selain wawancara pendahuluan, peneliti juga melakukan penelaahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) tahun 2016 yang dihasilkan SPI untuk memahami lebih mendalam mengenai permasalahan pada objek penelitian.

Yayasan X merupakan entitas berbadan hukum yang kegiatan utamanya adalah memberikan jasa pengajaran di bidang bahasa baik formal maupun nonformal. Sampai dengan saat ini, Yayasan X telah memiliki enam unit kegiatan. Unit A merupakan unit kegiatan terbesar yang dimiliki Yayasan X. Unit A merupakan lembaga pendidikan bahasa asing non formal yang memiliki banyak cabang di Indonesia. Unit A memiliki dua puluh kantor cabang dan lima puluh kantor kerjasama yang tersebar di seluruh Indonesia. Unit A membuka program pengajaran bahasa asing empat kali dalam satu tahun. Term

1/Triwulan I diselenggarakan dari Januari-Maret, Term 2/Triwulan 2 diselenggarakan pada April-Juni. Term 3/Triwulan 3 diselenggarakan pada Juli-September dan Term 4/Triwulan 4 diselenggarakan pada Oktober-Desember. Jenis program kelas dibagi menjadi dua yaitu program kelas umum dan kelas luar. Atas penelaahan LHP Kantor Pusat Unit A periode November 2014 sampai September 2016, penelitian ini melihat adanya temuan-temuan pada siklus pengeluaran. Temuan tersebut disebabkan adanya ketidaksesuaian antara pelaksanaan dengan desain sistem pengendalian internal/Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ditetapkan. Selain itu terdapat temuan atas penumpukan buku pembelajaran yang telah dibeli oleh Unit A. Kantor Pusat Unit A berfungsi sebagai *cost center* dengan fungsi melakukan pengeluaran atas pembelian yang bersifat terpusat untuk seluruh cabang-cabangnya.

LHP juga menjelaskan adanya beberapa transaksi pengeluaran yang tidak dilengkapi dengan bukti pendukung yang memadai seperti tagihan/*invoice* asli dari pemasok. Terdapat pula beberapa transaksi pengeluaran yang tidak didukung oleh otorisasi pejabat berwenang pada dokumen pendukung. Terdapat dokumen pendukung transaksi pengeluaran yang tidak merepresentasikan jumlah/saldo transaksi

tersebut. Temuan lainnya menunjukkan adanya transaksi pengeluaran yang tidak dicatat pada akun yang tepat (Yayasan X, 2016). Penumpukan buku tidak hanya terdapat di gudang Yayasan X, tetapi terdapat pula di gudang pemasok buku. Penumpukan buku di gudang pemasok telah terjadi dari 2014 dan sampai saat ini belum ada tindakan Unit A untuk mengatasi hal tersebut (Yayasan X, 2016). Penumpukan buku di gudang milik Yayasan X terjadi sekitar tahun 2014. Penumpukan buku tersebut terjadi atas kontrak dengan distributor buku periode 2013-2017. Penumpukan buku di gudang Yayasan X tentu menimbulkan risiko penambahan *carrying cost* dan biaya pemeliharaan bagi Unit A.

Temuan SPI terkait dengan ketidaklengkapan dokumen pendukung proses pengeluaran menunjukkan adanya risiko atas pembelian fiktif atau pembayaran berulang ke pemasok (Romney dan Steinbart, 2015). Atas penelaahan SOP keuangan dan akuntansi Yayasan X tidak terdapat pernyataan yang menjelaskan mengenai kriteria kelengkapan dokumen pendukung yang harus dipenuhi. Temuan tersebut dapat terjadi karena ketidakpahaman pelaksana pengendalian internal terhadap pentingnya prosedur yang ada atau kurangnya informasi atas pelaksanaan

prosedur tersebut. Dari penjelasan tersebut di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian pada sistem pengendalian pada Unit A atas siklus pengeluaran. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis kondisi pengendalian internal pada sistem pengeluaran Unit A serta menyarankan perbaikan yang dibutuhkan oleh Unit A. Siklus pengeluaran merupakan suatu siklus atau proses yang terdiri dari proses pembelian dan pengeluaran kas (Romney dan Steinbart, 2015).

Penelitian ini meneliti sistem pengendalian internal dengan menggunakan instrumen komponen pengendalian Internal dari Committee of Sponsoring Organizations of The Treadway Commission. Sistem pengendalian yang dibahas pada penelitian dibatasi hanya pada komponen informasi dan komunikasi serta komponen pemantauan. Pembatasan tersebut dilakukan karena pemantauan merupakan aspek yang harus dilakukan untuk memastikan sistem pengendalian internal telah dilaksanakan sesuai prosedur.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan studi kasus. Dalam Wahyuni (2012), metode penelitian kualitatif merupakan pendekatan induktif yang bertujuan untuk mendapatkan

pemahaman lebih mendalam atas kelompok/orang tertentu. Penelitian kualitatif menempatkan objek penelitian sebagai suatu interpretasi atas gejala yang diamati, sesuatu yang dinamis, serta hasil konstruksi pemikiran yang bersifat utuh/holistik. Hal tersebut disebabkan karena setiap aspek dari objek penelitian memiliki satu kesatuan yang tidak terpisahkan (Sugiyono, 2011). Menurut Yi (1984) dalam Wahyuni (2012) penelitian studi kasus adalah penyelidikan empiris untuk menyelidiki fenomena kontemporer di konteks kehidupan nyata. Batasan antara fenomena dengan teori tidak dapat dibedakan/tidak terlihat secara jelas. Dalam jenis penelitian ini, studi kasus juga merupakan penelitian yang menyelidiki kasus dari berbagai macam bukti dan sumber yang dipergunakan. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus dengan objek penelitian yaitu Kantor Pusat Unit A.

Penelitian ini menggunakan data primer yang didapatkan melalui wawancara langsung dengan unit-unit analisis. Selain itu data primer dalam penelitian ini juga didapatkan melalui observasi atas kegiatan-kegiatan di unit analisis tersebut. Dalam penelitian ini digunakan juga data sekunder yang didapatkan melalui analisis dan penelaahan dari dokumen-dokumen

yang dihasilkan oleh Unit A. Data-data tersebut antara lain Kebijakan dan SOP Keuangan dan Akuntansi Umum, Kebijakan dan SOP Pengadaan Barang dan Jasa, struktur organisasi entitas, daftar pekerjaan dan tanggung jawab Manajer Departemen Logistik, dan buku *core values* Yayasan X. Selain itu data sekunder juga didapat melalui LHP SPI periode 2014-2016, Rencana Strategis Yayasan X, Rencana Kerja Anggaran Departemen Logistik 2017, dan dokumen-dokumen terkait dengan siklus pengeluaran kas. Sistem pengendalian internal dalam penelitian ini dibatasi pada dua komponen kerangka pengendalian internal dari Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission yaitu informasi dan komunikasi serta pemantauan.

Kedua komponen tersebut masing-masing memiliki butir-butir prinsip pengendalian internal. Komponen informasi dan komunikasi terdiri dari prinsip; penggunaan informasi yang relevan dan berkualitas; optimalisasi proses komunikasi internal; optimalisasi proses komunikasi eksternal. Sementara komponen pemantauan terdiri dari prinsip: pemilihan, pengembangan, dan pengevaluasian berkelanjutan atas pengendalian internal; pengevaluasian dan penyampaian kelemahan pengendalian internal secara tepat waktu kepada

pihak yang bertanggung jawab atas pengendalian internal tertentu.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sistem pengendalian internal pada siklus pengeluaran Unit A dan memberikan masukan atau usulan perbaikan pada sistem pengendalian internal Unit A. Tahapan yang ada dalam penelitian ini adalah tahap wawancara pendahuluan yaitu merupakan tahap pertama yang dilakukan untuk menemukan permasalahan pada objek penelitian. Peneliti melakukan wawancara pendahuluan dengan SPI Yayasan X dan menyimpulkan bahwa terdapat masalah pada sistem pengeluaran Unit A.

Setelah itu, peneliti melakukan tahap kedua yaitu tahap analisis *current situation* pengendalian internal Unit A dengan menggunakan data primer dan data sekunder. Pada tahap kedua, peneliti menganalisis *current situation* atas siklus pengeluaran kas berdasarkan komponen kerangka pengendalian internal dari Committee of Sponsoring Organizations of The Treadway Commission. Pada tahap ketiga, peneliti memberikan usulan perbaikan atas *current situation* pada Unit A yang belum sesuai dengan kaidah pengendalian internal dari Committee of Sponsoring Organizations of The Treadway Commission.

Pada bagian ini, peneliti menjelaskan mengenai tahap analisis *current situation* dan tahap pemberian usulan perbaikan bagi Unit A. Peneliti menganalisis masing-masing prinsip yang terdapat pada komponen informasi dan komunikasi yaitu: penggunaan informasi yang relevan dan berkualitas; optimalisasi proses komunikasi internal; optimalisasi proses komunikasi eksternal. Siklus pengeluaran Unit A yaitu terdiri dari; proses pengajuan permintaan dan pembelian dari masing-masing kantor cabang/departemen di Unit A kepada Departemen Logistik Unit A; proses penerimaan barang yang telah dipesan; proses pemrosesan tagihan dari pemasok; proses pembayaran ke pemasok.

Contoh dari siklus pengeluaran Unit A adalah proses pengadaan buku pembelajaran Unit A, pengadaan jasa perbaikan, dan sebagainya. Peneliti melakukan penelaahan dokumen yaitu hasil pemeriksaan/ LHP dari SPI. Hasil pemeriksaan SPI menunjukkan pada Januari 2015 terdapat dua transaksi pembelian tidak didukung oleh tagihan/*invocie* asli. Peneliti juga menemukan terdapat sembilan transaksi pengeluaran yang tidak didukung oleh tagihan asli pada Februari dan Oktober 2015. Setelah itu peneliti melakukan wawancara dengan SPI terkait dengan temuan tersebut. SPI

menjelaskan bahwa adanya temuan tersebut dipicu karena adanya kelalaian dari karyawan yang bertanggung jawab atas pengendalian internal tersebut. Peneliti juga melakukan wawancara dengan karyawan departemen akuntansi dan logistik. Hasil wawancara menunjukkan bahwa karyawan tidak mengetahui dengan jelas kriteria dokumen yang dianggap lengkap sesuai dengan kaidah pengendalian internal dan SOP yang ada. Tidak hanya terbatas pada pemeriksaan dari SPI saja, peneliti juga melakukan pemeriksaansendiri terkait dengan dokumen siklus pengeluaran Unit A periode Januari 2017. Peneliti menemukan tiga transaksi pengeluaran di bulan Januari 2017 yang tidak disertai bukti penerimaan barang dan tiga transaksi yang tidak disertakan tagihan asli dari pemasok.

Peneliti melakukan konfirmasi dengan staf departemen akuntansi dan logistik. Ketidaklengkapan bukti pendukung transaksi pengeluaran dikarenakan staf tidak mengetahui informasi yang jelas terkait dengan kriteria kelengkapan dokumen yang dibutuhkan dalam memproses transaksi pengeluaran. Berdasarkan wawancara dengan staf akuntansi dan logistik adanya ketidaklengkapan dokumen dapat diterima asalkan wakil direktur keuangan atau manajer akuntansi telah menyetujui adanya

pengeluaran dana. Informasi yang tidak relevan untuk mendukung siklus pengeluaran Unit A akan berisiko pada Unit A. Jika staf akuntansi tidak mengetahui informasi terkait kelengkapan dokumen yang penting bagi siklus pengeluaran, maka risiko yang mungkin muncul adalah pembayaran pada pemasok atas barang yang tidak diterima (Romney dan Steinbart, 2015). Selain itu, risiko yang mungkin muncul adalah adanya pembelian fiktif serta pembayaran ganda pada suatu tagihan dari pemasok. Jika hal tersebut terus dibiarkan maka entitas akan mengganggu aspek efisiensi perusahaan (Romney dan Steinbart, 2015).

Untuk menanggapi hal tersebut penelitian ini mengusulkan adanya informasi formal dan jelas mengenai syarat kelengkapan dokumen yang menjadi dasar memadai suatu transaksi pengeluaran. Peneliti menyarankan agar department Unit A membuat suatu formulir yang berisikan daftar-daftar kelengkapan dokumen yang dibutuhkan dalam pengeluaran kas. Pihak yang mengajukan permintaan dana harus melengkapi dokumen yang tertera di formulir tersebut, setelah itu staf akuntansi akan dapat pemroses pengeluaran kas berdasarkan dokumen pendukung yang memadai. Tagihan asli merupakan dasar untuk melakukan

pembayaran ke pemasok (Romney dan Steinbart, 2015). Secara umum prinsip optimalisasi proses komunikasi internal sudah dipenuhi oleh Unit A. Unit A telah memiliki jalur komunikasi internal yang memadai. Hal tersebut didukung dengan adalah memorandum, *e-mail*, pesan elektronik per departemen, dan surat-surat formal lainnya. Terdapat pula rapat rutin per tiga bulan direksi dengan kantor cabang per regional. Terdapat pula rapat rutin Wakil Direktur Keuangan dengan manajer-manajer. Secara umum prinsip optimalisasi proses komunikasi eksternal sudah dipenuhi oleh Unit A. Jalur komunikasi dengan pihak eksternal dilaksanakan melalui telepon, *e-mail*, surat resmi atau pesan elektronik lainnya. Penelitian terdahulu dilakukan oleh Maguire pada tahun 2014 pada sistem pengendalian internal di organisasi non-profit.

Maguire (2014) menyatakan bahwa komponen informasi memegang peranan penting dalam implementasi sistem pengendalian internal. Perusahaan harus dapat memastikan bahwa informasi penting terkait pengendalian internal disampaikan ke pihak-pihak yang berkepentingan dengan cara komunikasi yang efektif. Perusahaan harus menerapkan kebijakan yang tegas dan jelas agar pengendalian internal dapat berjalan dengan baik (Maguire, 2014). Pada bagian ini, peneliti menjelaskan mengenai tahap an-

alisis *current situation* dan tahap pemberian usulan perbaikan bagi Unit A. Peneliti menganalisis masing-masing prinsip yang terdapat pada komponen pemantauan yaitu; pemilihan, pengembangan, dan pen-gevaluasian berkelanjutan atas pengendalian internal; pengevaluasian dan penyampaian kelemahan pengendalian internal secara tepat waktu kepada pihak yang bertanggung jawab atas pengendalian internal tertentu. Analisis prinsip pertama pada komponen pemantauan menunjukkan evaluasi berjalan yang dilaksanakan Unit A adalah melalui evaluasi anggaran yang dilaksanakan oleh Manajer Keuangan dan Akuntansi. Pada umumnya jika terdapat pembelian atas barang/jasa yang tidak dianggarkan, manajemen akan mempertimbangkan tingkan kebutuhan dari barang tersebut. Sehingga biasanya walaupun tidak dianggarkan, barang tersebut dapat dapat dibeli karena mendesaknya kebutuhan akan barang tersebut. Bentuk pemantauan yaitu adanya pemantauan direksi pada anggaran dengan melakukan persetujuan khususnya untuk pembelian yang tidak dianggarkan sebelumnya.

Pada sub proses penerimaan barang, Unit A selama ini belum melakukan evaluasi berjalan terkait dengan sub proses penerimaan barang. Berdasarkan keterangan

dari petugas gudang penerimaan barang dilakukan langsung oleh petugas gudang dan belum melibatkan staf logistik/manajer logistik. Penerimaan barang juga melibatkan bantuan dari karyawan koperasi Yayasan X. Usulan dalam komponen pemantauan yaitu, peneliti menyarankan agar Manajer Logistik secara teratur dapat memantau kegiatan penerimaan barang digudang. Kegiatan penerimaan barang penting dilakukan untuk memastikan bahwa barang yang diterima perusahaan merupakan barang yang sebenarnya dipesan oleh perusahaan (Romney dan Steinbart, 2015). Maguire (2014) menyatakan bahwa komponen pemantauan berjalan baik jika perusahaan mampu mengevaluasi dokumen-dokumen penting terkait sistem pengendalian perusahaan. Maguire (2014) juga menyatakan bahwa manajer harus memantau aktivitas dari karyawan untuk memastikan sistem pengendalian internal berjalan dengan baik.

Unit A secara umum telah menerapkan prinsip kedua komponen pemantauan pada sistem pengendalian internalnya. Secara umum manajer akan secara langsung mengoreksi kesalahan dari pelaksana/staf departemen terkait. Kesalahan yang terjadi pada proses pengeluaran pada umumnya yaitu kesalahan pencatatan kode akun saat melakukan penjurnalan. Selain itu Manajer

Logistik pada umumnya mengoreksi kesalahan staffnya saat pembuatan *purchase order* secara langsung. Implementasi dari komponen pemantauan terbukti dari adanya audit yang dilaksanakan oleh SPI. SPI selalu mengaudit area keuangan termasuk berhubungan dengan siklus pengeluaran. Penelitian terdahulu dilakukan oleh Oppong *et al.*

(2016) pada organisasi non-profit. Oppong *et al.* (2016) menemukan bahwa rekonsiliasi bank pada objek penelitian telah merepresentasikan pemantauan yang baik. Pemantauan yang baik tercermin dari pemisahan tugas yang tepat. Manajer harus melakukan pemantauan dengan cara memeriksa pekerjaan rekonsiliasi bank yang dilakukan oleh staff.

SIMPULAN

Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis sistem pengendalian internal atas siklus pengeluaran pada Unit A. Penelitian ini dilakukan atas dasar temuan LHP SPI Yayasan X periode 2014 sampai 2016. Atas dasar tersebut penelitian ini difokuskan untuk memberikan usulan perbaikan bagi Unit A agar sistem pengendalian internal pada siklus pengeluaran lebih optimal. Hasil dari analisis pada komponen informasi dan komunikasi menunjukkan bahwa belum ada informasi mengenai standar kelengkapan dokumen pendukung transaksi pengeluaran.

Hasil dari analisis pada komponen pemantauan menunjukkan Manajer Logistik belum melakukan pemantauan atas proses penerimaan barang. Manajer keuangan juga belum optimal dalam melakukan pengecekan kelengkapan dari dokumen pendukung pengeluaran.

REFERENSI

- Astuti, S., Zuhrotun, & Kusharyanti. (2015). Fraudulent Financial Reporting in Public Companies in Indonesia: An Analysis of Fraud Triangle and Responsibilities of Fraud Triangle and Responsibilities of Auditors. *Journal of Economics, Business, and Accountancy Ventura*, 18 (1), 283-290.
- Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission. (2013). *Internal Control Integrated Framework and Appendices*.
- Giriunas, L. (2009). Evaluation of Condition of Internal Control System in the Company. Vilnius University. *Ekonomika ir Vadyba: Aktualijos ir Perspektyvos*, page 103-113.
- Ghozali, I., & Achmad, T. (2018). A Pilot Study of Corporate Governance and Accounting Fraud: The Fraud Diamond Model. *Journal of Business and Retail Management Research*, 12 (2), 253-261.

- Huang, S., Y., Lin, C., Chiu, A., & Yen, D., C. (2016). *Fraud Detection Using Fraud Triangle Risk Factors*. Springer Science Business Media New York.
- Husmawati, P., Septriani, Y., Rosita, I., & Handayani, D. (2017). Fraud Pentagon Analysis in Assessing the Likelihood of Fraudulent Financial Statement. *International Conference of Applied Science on Engineering, Business, Linguistics, and Information Technology*, 46-51.
- Lansiluoto, A., Jokipii, A., & Eklund, T. (2016). Internal Control Effectiveness a Clustering Approach. *Managerial Auditing Journal Vol. 31*.
- Lokanan, M., E. (2014). How Senior Manager Perpetuate Accounting Fraud? Lessons for Fraud Examiner from an Instructional Case. *Journal of Financial Crime*, 21(4), 411-423.
- Maguire, K., A. (2014). Best Practices for Nonprofits Internal Control Self Assessment. *Advances in Management & Applied Economic*, 4(1).
- Oppong, M., Owiredu, A., Abedana, V., N., & Asante, E. (2016). The Impact of Internal Control on the Performance of Faith-Based NGOs in Accra. *Research Journal of Finance and Accounting*, 7(12), 110-125.
- Romney, M., B., & Steinbart, P., J. (2015). *Accounting Information Systems*. London: Pearson.
- Said, J., Alam, M.M., Ramli, M., dan Rafidi, M. (2017). Integrating Ethical Values into Fraud Triangle Theory in Assessing Employee Fraud: Evidence from Malaysian Banking Industry. *Journal of International Studies*, 10(2), 170-184.
- Sugiyono. (2011). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Wahyuni, S. (2012). *Qualitative Research Method Theory and Practices*. Jakarta: Salemba Empat.
- Zakaria, K., M., Nawawi, A., & Salin, A. (2016). Internal Controls and Fraud – Empirical Evidence from Oil & Gas Company. *Journal of Financial Crime*, 23, 1-17.

**EFEK MORAL REASONING TERHADAP NIAT AUDITOR INTERNAL
UNTUK MELAKUKAN WHISTLEBLOWING**

Meita Larasati

Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA

Email : meita.larasati91@gmail.com

Diterima: 3 Juni 2018; Direvisi: 7 Juni 2018; Disetujui: 25 Juni 2018

Abstract

The purpose of this study is to investigate the effect of moral reasoning on the intention of internal auditors to conduct whistleblowing. The respondents in this study using purposive sampling technique. The researchers choose a sample based on individuals who have work experience as internal auditors for one year and at least 21 years old. This study used a survey method using a questionnaire. The questionnaire was distributed to 70 internal auditors who worked on State University located in Yogyakarta. However, only 56 questionnaires can be used in this study. All questionnaire were analyzed using regression analysis. This study provides empirical evidence that moral reasoning has a positive effect on the intention of internal auditor behavior to blow the whistle.

Keyword: Whistleblowing, intention, moral reasoning, internal auditor

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menginvestigasi pengaruh *moral reasoning* terhadap niat internal auditor untuk melakukan *whistleblowing*. Sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*. Peneliti memilih sampel berdasarkan individu yang memiliki pengalaman kerja minimal satu tahun sebagai auditor internal dan berumur sekurang-kurangnya 21 tahun. Penelitian ini menggunakan metode survey dengan menggunakan kuesioner sebagai instrument penelitian. Kuesioner didistribusikan kepada 70 auditor internal yang bekerja pada semua Universitas Negeri yang berada di wilayah Yogyakarta. Namun, hanya 56 kuesioner yang dapat digunakan dalam penelitian ini. Semua kuesioner yang terkumpul dianalisis dengan menggunakan regresi berganda. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa *moral reasoning* memiliki pengaruh positif terhadap niat internal auditor untuk melakukan *whistleblowing*.

Kata Kunci: Whistleblowing, niat, moral reasoning, auditor internal

PENDAHULUAN

Pengungkapan tindakan kecurangan atau yang dikenal dengan istilah *whistleblowing* dalam beberapa tahun terakhir telah menjadi fenomena yang menarik perhatian dunia. Sekitar satu dekade terakhir, dunia digemparkan dengan terungkapnya kasus kecurangan yang dilakukan oleh perusahaan besar, seperti Enron dan Worldcom. Pada kasus Enron, kecurangan terletak pada laporan keuangan perusahaan yang dimanipulasi agar terlihat bahwa perusahaan memiliki kinerja yang baik. Laporan keuangan yang dibuat oleh perusahaan Enron sengaja dimanipulasi dengan cara melakukan *mark up* pada pendapatan perusahaan (academia.edu). Kecurangan tersebut membuat Enron yang tadinya merupakan salah satu perusahaan terbesar di dunia bisnis Amerika, seketika runtuh setelah kasus tersebut terungkap.

Praktik *whistleblowing* yang dilakukan oleh anggota organisasi atau perusahaan dikenal dengan istilah “si pengungkap aib”. Pengertian dari “si pengungkap aib” adalah individu yang dengan gamblang dan sukarela membeberkan kecurangan yang terjadi atau adanya perilaku tidak etis dalam suatu organisasi. *Whistleblowing* adalah sebuah tindakan yang tidak hanya dilakukan berdasarkan niat semata, akan tetapi juga harus diwujudkan dalam tindakan ketika

seorang karyawan dihadapkan dengan adanya kecurangan dalam perusahaan (Bateman dan Crant, 1993). Miceli dan Near (2002) mengatakan bahwa mayoritas para *whistleblower* pertama kali mengungkapkan kecurangan atau tindakan tidak etis kepada internal perusahaan sebelum mereka melaporkannya kepada publik. Menjadi *whistleblower* bukanlah hal yang mudah karena pasti akan selalu dihadapkan oleh berbagai konsekuensi. Alasan utama para *whistleblower* rela membayar ongkos personal yang begitu tinggi menjadi poin yang sangat menarik untuk diteliti. Aksi heroik para *whistleblower* pasti tidak akan pernah terlepas dari dilema etis yang dirasakan dalam lingkungan kerja mereka.

Tindakan untuk tidak melakukan *whistleblowing* dapat dikategorikan menjadi dua bentuk, yaitu “memilih untuk diam” (Gorta & Forell, 1995) dan “tidak melakukan tindakan” (Rothschild & Miethe, 1999), walaupun ada kemungkinan timbul tindakan lain, namun kedua tindakan tersebut sudah dapat mewakili perilaku seseorang ketika menyaksikan adanya kesalahan dalam organisasi (Dworkin & Callahan, 1991; Miceli & Near, 1992; King, 2000;). Niat individu untuk melakukan *whistleblowing* adalah sebagai dasar kemungkinan individu tersebut untuk melakukan *whistleblowing* walaupun berada

di bawah tekanan. Beberapa profesi memiliki keterkaitan yang sangat dekat dengan *whistleblowing*, seperti profesi akuntan dan auditor (internal maupun eksternal). Mereka memiliki banyak kesempatan untuk mengungkap penyimpangan atau kecurangan yang terjadi bahkan sebelum efeknya menjadi besar dan sangat membahayakan kelangsungan hidup (*going concern*) perusahaan (Shawver dan Clements, 2012).

Dilema etis yang dihadapi oleh auditor internal dan eksternal berbeda. Auditor internal lebih sulit memutuskan untuk melakukan *whistleblowing*. Hal ini disebabkan karena auditor internal selalu dihadapkan dengan konflik kepentingan. Auditor Internal dituntut tanggung jawab dan loyalitas oleh organisasi tempat mereka bekerja. Peran auditor internal sangatlah besar untuk mengetahui dan melaporkan *wrongdoing* yang terjadi di Organisasi. Namun, terkadang ada ancaman yang membuat auditor internal lebih memilih untuk menyembunyikan temuannya. Oleh karena itu profesi akuntan dan auditor hendaknya memiliki *moral reasoning* agar dapat menyikapi dilema etis yang sering ditemui pada praktik kerja mereka. Beberapa penelitian terdahulu telah memberikan bukti bahwa *moral reasoning* memiliki pengaruh

yang signifikan terhadap niat individu untuk melakukan *whistleblowing* dan akan berlanjut pada aksi mereka untuk melaporkan kecurangan tersebut (Miceli dan Near, 2005; Taylor and Curtis (2010). Secara kodrati, manusia diciptakan sebagai makhluk sosial yang tidak akan pernah terlepas dari moral dan norma-norma sosial dalam memutuskan suatu tindakan. Moralitas dapat diartikan sebagai suatu standar atau pedoman yang mengatur hak dan kewajiban dari hubungan manusia secara sosial (Rest, 1986).

Menurut Kohlberg (1981) *moral reasoning* merupakan penilaian nilai, sosial dan kewajiban yang mengikat individu dalam melakukan suatu tindakan. *Moral reasoning* adalah konsep dasar individu untuk menganalisa masalah sosial-moral dan menilai terlebih dahulu tindakan apa yang akan dilakukan (Rest, 1979). Dapat disimpulkan bahwa *moral reasoning* merupakan konsep dasar dan kemampuan individu untuk menganalisa keputusan dan menentukan suatu tindakan bermoral dalam menghadapi situasi sosial tertentu terutama ketika dihadapkan oleh suatu dilema etis. Kohlberg (1981) menyatakan bahwa kapasitas *moral reasoning* individu dapat berkembang ketika individu tersebut mendapatkan tambahan struktur moral

kognitif pada setiap level pertumbuhan moral. Teori *Cognitive Moral Development* yang dikembangkan oleh Kohlberg (1969) berdasarkan asumsi bahwa terdapat proses kognitif yang terlibat dalam penilaian moral yang berkembang. Kohlberg mengidentifikasi tiga level perkembangan moral, yaitu: *Pre-Conventional*, *Conventional* dan *Post-Conventional* atau *Principled*. Tiga level utama ini dapat berkembang sesuai dengan kondisi yang mereka hadapi, masing-masing dari level tersebut dibagi lagi menjadi dua tahap.

Level pertama adalah pertimbangan keputusan moralitas berdasarkan prospek hukuman (*punishment*), keputusan yang diambil hanya untuk menghindari suatu hukuman. Pada level kedua, individu mempresepsikan kebenaran dan kesalahan yang mutlak yang mengasumsikan bahwa hukum adalah hakim moralitas. Level ketiga merupakan level tertinggi, yaitu ketika individu membuat keputusan moral berdasarkan kontrak social untuk berperilaku tertentu dan mampu untuk mendahulukan etika diluar kepentingan sendiri atau kelompok. Berdasarkan teori *Cognitive Moral Development*, Kohlberg membuktikan bahwa pada setiap individu secara bertahap akan meningkatkan *moral reasoning* mereka dari tingkatan yang terendah sampai kepada

tingkatan yang tertinggi. Gundlach *et al.* (2003) menyatakan bahwa *moral reasoning* dan retaliasi mempunyai peran yang signifikan dalam proses untuk melakukan *whistleblowing*. Hasil empiris dari beberapa penelitian terdahulu juga mendukung kedua faktor (retaliasi dan *moral reasoning*) tersebut dalam mempengaruhi keputusan seseorang untuk melakukan *whistleblowing* (Arnold and Ponemon, 1991; Brabeck, 1984; Brewer dan Selden, 1995; Chan dan Leung, 2006; Liyanarachi dan newdick, 2009; Miceli et al., 1991; Near dan Miceli, 1986).

Menurut Brabeck (1984) kemampuan seseorang untuk menyelesaikan atau mengintepretasikan dilema etis dipengaruhi oleh *moral reasoningnya*. Penelitian dari Rest dan Narvaes (1994) menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat *moral reasoning* individu maka semakin besar kemungkinan untuk berperilaku etis. Pola pikir demikian senada dengan penelitian dari Arnold & Ponemon (1991) yang menemukan bahwa *moral reasoning* seseorang akan mempengaruhi perilaku etisnya, orang yang memiliki *moral reasoning* yang rendah akan memiliki respon yang berbeda dibanding orang yang memiliki *moral reasoning* yang lebih tinggi jika dihadapkan dengan permasalahan etis. Arnold & Ponemon (1991); Brabeck (1984); dan Ponemon & Gabhart (1990) menemukan bahwa auditor

dengan *moral reasoning* yang tinggi akan memiliki niat yang lebih tinggi dalam melakukan *whistleblowing* dibanding dengan auditor dengan *moral reasoning* yang lebih rendah. Penelitian yang dilakukan oleh Liyanarachchi dan Newdick (2009) konsisten dengan penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa, pada umumnya individu dengan tingkat *moral reasoning* yang tinggi akan melakukan *whistleblowing* dibandingkan dengan tingkat *moral reasoning* yang rendah. Penjelasan dari beberapa penelitian di atas menunjukkan hasil yang konsisten terhadap *moral reasoning* dan niat individu untuk melakukan *whistleblowing* membuat peneliti ingin mengkonfirmasi kembali mengenai hubungan keduanya ketika diinvestigasi di Indonesia.

Moral reasoning yang memadai membuat individu tersebut lebih berperilaku etis, dan *whistleblowing* merupakan salah satu perilaku yang beretika. Berdasarkan pola perilaku individu terkait tingkatan *moral reasoning* yang dimilikinya, maka niat perilaku individu untuk melakukan *whistleblowing* lebih tinggi pada individu yang memiliki *moral reasoning* yang lebih tinggi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Hartono (2013), penelitian kuantitatif adalah penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data yang berupa angka, atau data berupa kata-kata atau kalimat yang dikonversi menjadi data yang berbentuk angka. Metoda yang digunakan dalam penelitian ini adalah *survey* dengan menyebarkan kuesioner kepada responden yang sesuai dengan tujuan dari penelitian ini.

Pemilihan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan cara menetapkan sampel berdasarkan kriteria tertentu sesuai dengan tujuan penelitian. Penggunaan teknik pengumpulan sampel seperti ini lebih dikenal dengan nama *purposive sampling*. Sampel yang dipilih dalam penelitian ini adalah para auditor internal yang bekerja di Universitas Negeri yang berada di Yogyakarta. Kriteria sampel dalam penelitian ini adalah auditor internal yang telah memiliki pengalaman bekerja minimal satu tahun dan minimal berusia 21 tahun.

Responden yang dipilih dalam penelitian ini adalah auditor internal yang bekerja pada Universitas Negeri di wilayah Yogyakarta. Kuesioner yang dikirimkan berjumlah 70 kuesioner dengan jumlah kuesioner yang dapat digunakan sebanyak 56 kuesioner. Peneliti melakukan *pilot test*

Sebelum menyebarkan kuesioner kepada auditor internal di Universitas Negeri yang berlokasi di Yogyakarta. Hal ini ditujukan untuk melihat sejauh mana responden memahami isi dari kuesioner penelitian ini. Pengujian data dalam penelitian ini melewati beberapa tahapan, yaitu tabulasi jawaban dari seluruh responden yang dilakukan dengan perhitungan profil responden, statistik deskriptif, uji kualitas data, dan uji asumsi klasik. Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan metode analisis regresi. Metode ini digunakan karena peneliti ingin mengetahui pengaruh antara *moral reasoning* terhadap niat auditor internal untuk melakukan *whistleblowing*. Peneliti menggunakan *software* SPSS 21 (*Statistical Product and Service Solution*) untuk mengolah data dalam penelitian ini.

Dalam penelitian ini *moral reasoning* diukur dengan menggunakan *Defining Issue test (DIT)*, menggunakan instrumen yang dikembangkan oleh Welton *et al* (1994), dengan mengikuti pola instrumen DIT dari Rest (1979). Instrumen tersebut juga telah digunakan dalam penelitian Liyanarachchi dan Newdick (2009). Instrumen tersebut dinilai paling sesuai ketika digunakan untuk mengukur persepsi mahasiswa akuntansi dan profesi akuntan (Welton *et al.*, 1994) dan paling sering digunakan dalam penelitian yang terkait dengan *whistleblowing*

(Liyanarachchi dan Newdick, 2009). Instrumen terdiri dari tiga skenario yang merefleksikan aspek lingkungan kerja akuntan. Namun, dengan berbagai pertimbangan, peneliti hanya memakai satu skenario. Pertama, peneliti berasumsi dari ketiga skenario DIT tersebut, hanya satu kasus yang relevan untuk digunakan dalam penelitian ini. Kedua, untuk meminimalisir adanya *non-respon bias* pada penelitian ini. Ketiga, peneliti menjaga agar instrumen penelitian tidak terlalu panjang agar responden tidak menghabiskan banyak waktu dalam pengisian instrumen dan akan membuat jenuh responden. Partisipan diminta untuk mengevaluasi pernyataan pada lima skala likert (1= sangat tidak mungkin, 2= tidak mungkin, 3= cukup mungkin, 4= mungkin, 5= sangat mungkin) dan mengisi pada kolom yang telah disediakan.

Pengukuran variabel *whistleblowing* dalam penelitian ini mengadaptasi instrumen kasus yang dirumuskan oleh Schultz *et al* (1993). Responden diminta untuk menilai niat untuk melakukan *whistleblowing* dengan skala Likert lima-poin untuk tiap skenario (1= sangat tidak mungkin, 2= mungkin, 3= cukup mungkin, 4= mungkin, 5= sangat mungkin).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengujian Validitas dalam penelitian ini menggunakan *Confirmatory Analysis*

Factor (CFA). Ketentuan validitas item pertanyaan diperoleh dari KMO MSA > 0.5 dan signifikansi < 0.05. sumbu diagonal *anti-image correlation* harus > 0.5 dan hanya membentuk 1 faktor dalam komponen component matrix dengan melihat factor loading. Nilai dari KMO MSA dan *Bartlett's Test* dapat dilihat pada tabel 1. Hasil analisis menunjukkan bahwa nilai *Kaiser-Meyer-Olkin-Measure of Sampling Adequacy* (KMO-MSA) adalah 0.513 > 0.5 sehingga dapat dilakukan analisis faktor. Begitu juga dengan nilai *Bartlett's Test of Sphericity* memiliki signifikansi 0.000, maka dapat dinyatakan bahwa uji analisis faktor dapat dilanjutkan.

Hasil analisis menunjukkan bahwa nilai *Kaiser-Meyer-Olkin-Measure of Sampling Adequacy* (KMO-MSA) adalah 0.513 > 0.5 sehingga dapat dilakukan analisis faktor. Begitu juga dengan nilai *Bartlett's Test of Sphericity* memiliki signifikansi 0.000, maka dapat dinyatakan bahwa uji analisis faktor dapat dilanjutkan. Pengintepretasian analisis faktor melalui *factor rotation*. Metode yang digunakan oleh peneliti dalam merotasi faktor-faktor tersebut adalah *varimax*. Hasil rotasi faktor dari variable penelitian ini dapat dilihat pada tabel 2.

Dari Tabel 2 hasil rotasi menunjukkan bahwa indikator WB1 sampai WB4 mengelompok pada faktor 2 sedangkan MR1 sampai MR12 mengelompok pada faktor 1. Pengelompokan masing-masing indikator dengan masing-masing faktor, maka dapat disimpulkan bahwa semua indikator dikatakan valid karena masing-masing konstruk mengelompok berdasarkan variable tersebut. Pengujian reliabilitas dalam penelitian ini menggunakan uji statistik dengan melihat nilai *Cronbach's Alpha* untuk setiap konstruk. Konstruk tersebut dapat dikatakan reliabel jika nilai *Cronbach's Alpha* > 0,60 sehingga dianggap kuesioner dapat diandalkan (Hair *et al.*, 2010).

Instrument *whistleblowing* dalam penelitian ini dinyatakan reliable karena memiliki nilai Cronbach's Alpha 0.880 > 0.60. Instrument *moral reasoning* dalam penelitian ini dinyatakan reliable karena memiliki nilai Cronbach's Alpha 0.918 > 0.60 Setelah seluruh item pertanyaan dinyatakan valid dan reliable maka peneliti melanjutkan pengujian untuk menguji hipotesis satu yaitu pengaruh *moral reasoning* terhadap niat auditor internal untuk melakukan *whistleblowing*.

Tabel 1
KMO dan Bartlett's Test

Kaiser-Meyer-Olkin-Measure of Sampling Adequacy		0.513
Bartlett's Test of Sphericity	Approx. Chi-Square	2.1743

	Df	861
	Sig.	0.000

Sumber: Data primer yang diolah, 2015

Tabel 2
Rotated Component Matrix

	Component	
	1	2
WB 1		0.786
WB 2		0.807
WB 3		0.814
WB 4		0.664
MR 1	0.705	
MR 2	0.690	
MR 3	0.794	
MR 4	0.646	
MR 5	0.669	
MR 6	0.595	
MR 7	0.821	
MR 8	0.815	
MR 9	0.754	
MR 10	0.676	
MR 11	0.832	
MR 12	0.630	

Sumber: Data primer yang diolah, 2015

Tabel 3
Hasil Uji t

Variabel	Koef Regresi	t _{hitung}	t _{tabel}	Sig
Konstanta	3.287			
<i>Moral reasoning</i>	0.259	2.336	1.676	0.023

Sumber: Data primer yang diolah, 2015

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa hipotesis satu yaitu *moral reasoning* memiliki pengaruh positif terhadap niat auditor internal untuk melakukan *whistleblowing* diterima. Hasil pengujian menunjukkan bahwa nilai t variabel

moral reasoning sebesar $2.336 > 1.676$ dengan signifikansi 0.023 dapat dilihat pada tabel 3. Hal ini menunjukkan bahwa *moral reasoning* memiliki pengaruh positif terhadap niat individu untuk melakukan *whistleblowing*. Individu dengan tingkat

moral yang lebih tinggi mempunyai niat yang lebih besar untuk melakukan *whistleblowing*. Hasil dari pegujian H1 dalam penelitian ini sejalan dengan beberapa penelitian terdahulu yang menyebutkan bahwa auditor dengan *moral reasoning* yang tinggi akan memiliki niat yang lebih tinggi untuk melakukan *whistleblowing* sebaliknya dengan auditor yang memiliki *moral reasoning* yang rendah (Arnold & Ponemon; 1991, Brabeck; 1984, Ponemon & Gabhart; 1990). Penelitian terdahulu juga konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Liyanarachchi dan Newdick (2009) yang menyatakan bahwa, pada umumnya individu dengan tingkat *moral reasoning* yang tinggi cenderung melakukan *whistleblowing* dibandingkan dengan tingkat *moral reasoning* yang rendah.

SIMPULAN

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh *moral reasoning* terhadap niat auditor internal untuk melakukan *whistleblowing*. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa tingkat *moral reasoning* mempunyai pengaruh positif yang signifikan terhadap niat individu untuk melakukan *whistleblowing*. Jadi, individu dengan tingkat *moral reasoning* yang tinggi mempunyai niat yang lebih besar untuk melakukan *whistleblowing* daripada individu

dengan tingkat *moral reasoning* yang rendah.

Penelitian ini hadir bukan tanpa adanya limitasi. Limitasinya adalah penelitian ini masih menggunakan subyek penelitian yang tidak terlalu luas, yakni auditor internal yang bekerja di Universitas Negeri yang berada di Yogyakarta. Penelitian ini memiliki kontribusi dalam perluasan literatur dan melengkapi penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan *whistleblowing*. Penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai acuan untuk lembaga pendidikan agar lebih menekankan pendidikan etika bisnis kepada mahasiswa supaya kedepannya dapat bertindak lebih beretika. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar pertimbangan bagi organisasi untuk mulai membentuk *whistleblowing* sistem, hal ini ditujukan untuk pencegahan *fraud* dan *wrongdoing*.

REFERENSI

- Arnold, D., and L. Ponemon. (1991). Internal Auditors Perception of Whistle-Blowing and The Influence of Moral Reasoning: An Experiment. *Auditing: A journal of Practice & Theory*. 10(2): 1-15.
- Bateman, T. S., and Crant, J. M. (1993). The Proactive Component of

- Organizational Behavior. *Journal of Organizational Behavior*. 14(2): 103-118.
- Brabeck, M. M. (1984). Ethical Characteristics of Whistle-Blowers. *Journal of Research in Personality*. 18: 41-53.
- Brewer, G. A. and S. C. Selden. (1995). Whistle Blowing in the Federal Civil Service: New Evidence of the Public Service Ethics?. *Revised Version of the Paper Presented at the Annual Meeting of the American Political Science Association*. (Chicago, IL)
- Chan, S. Y. and P. Leung. (2006). The Effects of Accounting Students Ethical Reasoning and Personal Factors on Their Ethical Sensitivity. *Managerial Auditing Journal*. 21: 436-457.
- Dworkin, T.M. and E.S. Callahan. (1991). Internal Whistleblowing: Protecting the Interests of the Employee, the Organization and Society. *American Business Law Journal*. 29: 267-308.
- Gorta, A. and S. Forell. (1995). Layers of Decision Linking Social Definitions of Corruption and Willingness to Take Action. *Crime, Law, & Social Change*. 23: 315-343.
- Gundlach, M. J. et al. (2003). The Decision to Blow the Whistle: A Social Information Processing Framework. *Academy of Management Review* (January): 107-123.
- Hair, J.F., et al. (2010). Multivariate data analysis. 7th edition. New Jersey : Pearson Education Inc.
- Hartono, Jogyanto. (2013). Metodologi Penelitian Bisnis. Edisi 6. BPFE :Yogyakarta.
- King, G. 2000. The Implications of Differences in Cultural Attitudes and Styles of Communication on Peer Reporting Behavior. *Cross Cultural Management – An International Journal*. 7(2): 11-17.
- Kohlberg, L. (1969). Continuities and Discontinuities in Childhood and Adult Moral Development. *Human Development*. 12(2): 93-120.
- Kohlberg, L. (1981). The Philosophy of Moral Development, Moral Stage and Idea of Justice. San Francisco : Harper and Row.
- Liyanarachchi, G., and Newdick, C. (2009). The Impact of Moral Reasonin and Retaliation on Whistle-Blowing: New Zealand Evidence. *Journal of Business Ethic*. 89: 37-57
- Miceli, M. P., J. B. Dozier and Near. Near, J. P. (1991), Blowing the Whistle on Data-Fudging: A Controlled Field

- Experiment. *Journal of Applied Social Psychology*. 21(4): 271–295.
- Miceli, M. P. and Near, J. P. (1992). *Blowing the Whistle – The Organizational and Legal Implications for Companies and Employes*. New York, NY: Lexington Books
- Miceli, M. P. & Near, J. P. (2002). What Makes Whistle-Blower Effective? Three Field Studies. *Human Relation*, 55, 455-479.
- Ponemon, L. (1994). A Comment On “Whistle -Blowing” As An Internal Control Mechanism: Individual And Organizational Considerations. *Auditing: A Journal of Practice & Theory* (Fall). 118–130.
- Rest, J. (1986). *Moral Development. Advance in Research and Theory*. New York. Praeger.
- Rest, J. (1979). *Development In Judging Moral Issues*. Minneapolis, MN: University of Minnesota Press.
- Rest, J. R. & Narvaez, D. (1994). *Moral Development in Prefessions*. New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates Pub
- Rothschild, J. and Miethe, T. D. (1999). Whistle-blower Disclosure and Management Rataliation. *Work & Occupations*. 26(1): 107-128.
- Schultz, J. J., D. A. Johnson, D. Morris and S. Dyrnes. (1993). An Investigation of the Reporting of Questionable Acts in an International Setting. *Journal of Accounting Research*. 31: 75-103.
- Shawver, T., and Clements, L. H. (2012). How Do Emotions Affect Ethical Evaluation For Accountans. *Journal of Forensic and Investigating* 4.
- Taylor, E.Z., and Curtis, M.B. (2010). An Examination of the Layers of Workplace Influences in Ethical Judgments: Whistleblowing Likelihood and Preseverance in Public Accounting. *Journal of Business Ethics*. 93: 21-37.
- Welton, R. E., J. R. Davis and M. LaGrone. (1994). Promoting the Moral Development of Accounting Graduate Students: An Instructional Design and Assessment. *Accounting Education. International Journal*. 3(1): 35–50.

**STANDAR AKUNTASI KEUANGAN ENTITAS TANPA AKUNTABILITAS
PUBLIK (SAK ETAP)**

Budiandru¹, Shabrina Saufani Isfa²

¹²Universitas Muhammadiyah Prof. DR HAMKA

Email: 1budiandru@gmail.com, 2shabrina@gmail.com

Diterima: 3 Juni 2018; Direvisi: 7 Juni 2018; Disetujui: 25 Juni 2018

Abstract

This study aims to analyze the application of SAK ETAP on the presentation of financial statements CV SK. CV SK is a medium-sized businesses engaged in catering services and Wedding Organizer. The method used in this research is descriptive qualitative analysis. The results of the study based on Balance Sheet and Income Statement for 2012-2016, show that the company has not presented cash flow statement, and notes to financial statements (CALK) and inconsistency in the presentation of some post on Balance Sheet not disclosed in CALK. This research suggests that companies develop other components of financial statements and disclose the company's accounting policies in CALK.

Keywords: *Financial Statement, UMKM, SAK ETAP*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan SAK ETAP pada penyajian laporan keuangan CV SK. CV SK merupakan usaha menengah yang bergerak di bidang jasa catering dan Wedding Organizer. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian berdasarkan Neraca dan Laporan Laba Rugi tahun 2012-2016, menunjukkan bahwa perusahaan belum menyajikan laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan (CALK) serta terjadi inkonsistensi dalam penyajian beberapa pos pada Neraca yang tidak diungkapkan dalam CALK. Penelitian ini menyarankan agar perusahaan menyusun komponen laporan keuangan lainnya dan mengungkapkan kebijakan akuntansi perusahaan dalam CALK.

Kata Kunci: Laporan Keuangan, UMKM, SAK ETAP

PENDAHULUAN

Salah satu jenis usaha di Indonesia adalah Usaha Kecil dan Menengah (UKM). Usaha Kecil dan Menengah (UKM) ini mempunyai peranan yang sangat penting bagi kondisi perekonomian negara Indonesia. Laporan keuangan perusahaan yang utama menyediakan informasi mengenai laporan laba rugi perusahaan dan laporan posisi keuangan.

Ikatan Akuntan Indonesia telah menerbitkan Standar Akuntansi Keuangan untuk Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP). SAK-ETAP ini telah berlaku efektif sejak 1 Januari 2011, sehingga perusahaan kecil seperti UKM tidak perlu membuat laporan keuangan dengan menggunakan PSAK umum yang berlaku. Di dalam beberapa hal SAK-ETAP memberikan banyak kemudahan untuk perusahaan dibandingkan dengan PSAK dengan ketentuan pelaporan yang lebih kompleks. Sesuai dengan ruang lingkup SAK-ETAP maka Standar ini dimaksudkan untuk digunakan oleh entitas tanpa akuntabilitas publik. Entitas tanpa akuntabilitas publik yang dimaksud adalah entitas yang tidak memiliki akuntabilitas publik signifikan dan tidak menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum (*general purpose financial statement*) bagi

pengguna eksternal. Dalam penyusunan laporan keuangan harus sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi. Penyusunan laporan keuangan disiapkan mulai dari berbagai sumber data. Data yang asli bukan saja digunakan untuk mengisi buku perkiraan, tetapi dapat juga dipakai untuk membuktikan keabsahan transaksi. Penyusunan laporan keuangan pasti selalu menghadapi kendala-kendala yang dialami. Seperti tidak lengkapnya bukti-bukti transaksi saat menyusun laporan keuangan, kesalahan pencatatan pos-pos transaksi secara signifikan, yang sebelumnya sudah ditentukan karena terdapat biaya-biaya tak terduga selama operasi.

Oleh karena itu, suatu laporan keuangan perlu dilakukan pemeriksaan apakah dalam pembuatan laporan keuangan telah sesuai dengan PSAK yang berlaku di Indonesia, agar informasi keuangan yang disajikan di dalam laporan keuangan bersifat adil (*fair*) bagi semua pihak yang berkepentingan (manajemen, pemegang saham, pemerintah, dan kreditur). Hal ini melibatkan Kantor Akuntan Publik (KAP) sebagai pihak ketiga yang memberikan jasa akuntansi, salah satunya yaitu *accounting service* sekaligus untuk mengetahui dan

menghimpun data perusahaan secara lengkap dan akurat. Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan diatas, maka dapat dirumuskan masalah dalam penelitian ini yaitu “Bagaimanakah penyusunan dan penyajian laporan keuangan CV SK berdasarkan SAK ETAP”. Adapun penelitian ini dibatasi pada masalah penyusunan laporan keuangan, kendala-kendala yang dihadapi dalam menyusun laporan keuangan dan penyajian laporan keuangan neraca dan laba rugi tahun 2012-2016 menurut SAK ETAP 2016. Menurut Ryan Arie Firmansyah dan Miyosi Margi Utami (2013), “SAK ETAP adalah Standar akuntansi untuk entitas yang memiliki skala kecil hingga menengah, misalnya UKM (tidak memiliki akuntabilitas publik).”

Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia dalam buku Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (2016) menyatakan bahwa: SAK ETAP yaitu Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik. Entitas tanpa akuntabilitas publik adalah entitas yang Tidak memiliki akuntabilitas publik yang signifikan. Menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum (*general purpose*

financial statement) bagi pengguna eksternal. Contoh pengguna eksternal adalah pemilik yang tidak terlibat langsung dalam pengelolaan usaha, kreditur, dan lembaga pemeringkat kredit. Menurut Walter, et.al., (2011), “Laporan keuangan (*financial statements*) adalah dokumen bisnis yang digunakan perusahaan untuk melaporkan hasil aktivitasnya kepada berbagai kelompok pemakai yang dapat meliputi manajer, investor, kreditor, dan agen regulator.

Menurut PSAK 1 (2017), “Laporan keuangan adalah penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas. “Laporan keuangan merupakan dokumen yang digunakan oleh perusahaan untuk melaporkan aktivitas perusahaan kepada pemakai laporan keuangan seperti investor, kreditor dan lain-lain.” Menurut Lilis Puspitawati dan Sri Dewi Anggadini (2011) dalam buku “Sistem Informasi Akuntansi”, Siklus akuntansi secara garis besar menggambarkan proses pengidentifikasian bukti transaksi, pencatatan transaksi ke dalam jurnal umum (*posting ke general ledger*), pengelompokan bukti-bukti transaksi ke dalam golongan transaksi yang sama ke dalam buku besar (*ledger*),

meringkas bukti transaksi ke dalam neraca saldo (trial balance). Melakukan penyesuaian (adjustment), membuat kertas kerja (worksheet) dan membuat laporan keuangan (financial statement). Menurut Rudiyanto (2012), "Siklus akuntansi adalah urutan kerja yang harus dilakukan oleh akuntan sejak awal hingga menghasilkan laporan keuangan perusahaan. Menurut Dwi Martani (2012) dalam buku Akuntansi Keuangan Menengah, "SAK ETAP digunakan untuk entitas yang tidak memiliki akuntabilitas publik yang signifikan dalam menyusun laporan keuangan untuk tujuan umum (general purpose financial statement). SAK ETAP (2016) Dalam menyajikan laporan keuangan yang diatur dalam paragraph 3.10-3.11, pos-pos material yang disajikan terpisah dalam laporan keuangan sedangkan yang tidak material digabungkan dengan jumlah yang memiliki sifat atau fungsi sejenis.

Penyajian laporan keuangan menurut SAK ETAP yakni Di dalam penyusunan neraca, SAK ETAP (2016) dalam paragraph 4.2 dan 4.4 mengatur beberapa informasi penting yang harus dijabarkan di dalam neraca. Informasi tersebut meliputi kas dan setara kas, Piutang usaha dan Piutang lainnya, persediaan, properti

investasi, Aset tetap, Aset tidak berwujud, Utang usaha dan Utang lainnya, Aset dan Kewajiban pajak, Kewajiban diestimasi, dan Ekuitas. Bentuk penyajian Aset lancar dan Aset tidak lancar, Kewajiban jangka pendek dan Kewajiban jangka panjang harus disajikan dalam klasifikasi terpisah dalam neraca sesuai yang disebutkan paragraph 4.6-4.9, kecuali jika penyajian berdasarkan likuiditas memberikan informasi yang andal dan lebih relevan. Jika pengecualian tersebut diterapkan, maka semua Aset dan Kewajiban harus disajikan berdasarkan likuiditasnya.

SAK ETAP mengatur penjelasan mengenai laporan laba rugi tersebut dalam paragraph 5.2-.5.4. Laporan laba rugi merupakan laporan yang memasukkan semua pos penghasilan dan Beban yang diakui dalam suatu periode kecuali SAK ETAP mensyaratkan lain. Informasi yang wajib disampaikan minimal mencakup hal-hal berikut, yakni Pendapatan, Beban keuangan, bagian laba atau rugi dari investasi yang menguntungkan metode Ekuitas, Beban pajak, laba atau rugi neto. SAK ETAP mengharuskan entitas menyajikan pos, judul dan sub jumlah lainnya pada laporan laba rugi jika penyajian tersebut

relevan untuk memahami kinerja keuangan entitas. Hal yang dilarang adalah entitas tidak boleh menyajikan atau mengungkapkan pos Pendapatan dan Beban sebagai “pos luar biasa”, dalam laporan laba rugi maupun dalam catatan atas laporan keuangan. Laporan perubahan Ekuitas diperlukan untuk menyajikan laba atau rugi suatu entitas dalam suatu periode, pos Pendapatan dan Beban yang diakui secara langsung, pengaruh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan yang diakui dalam periode tersebut, dan jumlah investasi serta jumlah dividen dan distribusi lain ke pemilik Ekuitas selama periode tersebut sesuai yang dijelaskan dalam paragraf 6.2. Lebih lanjut dalam paragraph 6.4-6.5, disamping laporan perubahan Ekuitas, entitas wajib menyusun laporan laba rugi dan saldo laba.

Laporan ini berfungsi untuk menyajikan laba atau rugi entitas dan perubahan saldo laba untuk suatu periode pelaporan. Jika perubahan pada Ekuitas hanya berasal dari laba atau rugi, pembayaran dividen, koreksi kesalahan periode lalu, dan perubahan kebijakan akuntansi maka SAK ETAP memperbolehkan entitas hanya

menerbitkan laporan laba rugi dan saldo laba menggantikan laporan laba rugi dan laporan perubahan Ekuitas. Informasi yang wajib disampaikan di dalam laporan baik laba rugi dan saldo laba meliputi saldo laba pada awal periode pelaporan, dividen yang diumumkan dan dibayarkan atau terutang selama periode, penyajian kembali saldo laba setelah koreksi kesalahan periode lalu, penyajian kembali saldo laba setelah perubahan kebijakan akuntansi, dan saldo laba pada akhir periode pelaporan.

SAK ETAP menyebutkan dalam BAB 7 mengenai laporan arus kas bahwa laporan arus kas menyajikan informasi perubahan historis atas kas dan setara kas, yang menunjukkan secara terpisah perubahan yang terjadi selama satu periode dari aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Dalam paragraph 8.4 disebutkan bahwa secara normal urutan penyajian catatan atas laporan keuangan adalah suatu pernyataan bahwa laporan keuangan telah disusun sesuai dengan SAK ETAP. Ringkasan kebijakan akuntansi signifikan yang diterapkan. Informasi yang mendukung pos-pos laporan keuangan yang sesuai dengan urutan penyajian setiap komponen laporan

keuangan dan urutan penyajian pos-pos tersebut.

METODE PENELITIAN

Didalam penulisan ini, penulis menggunakan beberapa metode penelitian, yaitu Metode Observasi: Metode ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data secara langsung dengan cara mengamati dan melaksanakan langsung terhadap obyek yang diteliti pada saat melakukan *Accounting Service*. Metode wawancara: Metode ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data berupa mnegajukan pertanyaan langsung kepada informan untuk memperoleh informasi yang diharapkan. Metode kepustakaan: Metode ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data ataupun informasi melalui buku-buku yang berkaitan dengan objek riset.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berikut merupakan interpretasi dari hasil penerapan penyusunan dan penyajian laporan keuangan CV SK berbasis SAK ETAP. Penyusunan laporan keuangan CV SK berdasarkan SAK ETAP CV SK dalam melakukan penyusunan laporan keuangan menggunakan 2 aplikasi yaitu sejak awal berdiri sampai dengan tahun 2012 bulan April CV SK menggunakan aplikasi *bookkeeping* dan sejak tahun

2012 bulan Mei sampai dengan sekarang CV SK menggunakan aplikasi *accurate* dengan tahapan yang dilakukan oleh CV SK dalam melakukan penyusunan laporan keuangan.

Tahap pertama, Tahap Transaksi (Transaksi Internal dan Eksternal). Pada tahapan ini CV SK melakukan Pencatatan atas transaksi yang telah dilakukan selama perusahaan beroperasi. Transaksi yang dimaksudkan adalah transaksi keuangan yang terjadi dan berpengaruh terhadap arus kas CV SK. *Tahap kedua adalah tahap pencatatan Penjurnalan*. Penjurnalan adalah aktivitas meringkas dan mencatat transaksi perusahaan di buku jurnal dengan menggunakan urutan tertentu berdasarkan dokumen dasar yang dimiliki. CV SK melakukan pembukuan Jurnal Umum dari transaksi-transaksi yang sudah terjadi ke dalam aplikasi *Accounting Software Accurate* dan berdasarkan nomor urut faktur atau tanggal terjadinya transaksi.

Tahap ketiga adalah Tahap Pengikhtisaran. Neraca saldo adalah daftar akun-akun beserta saldonya pada suatu waktu tertentu. Neraca saldo CV SK dibuat pada akhir periode akuntansi. Setelah semua ayat jurnal penyesuain dibuat dan di posting ke buku besar, maka

neraca saldo dibuat dari akun-akun buku besar dan dinamakan neraca saldo telah disesuaikan. *Tahap keempat adalah tahap pelaporan keuangan.* Laporan keuangan yang disusun pertama kali CV SK adalah laporan laba rugi. Laporan laba rugi memiliki 3 komponen yaitu komponen Pendapatan, Biaya, dan laba-rugi. Langkah selanjutnya adalah menyusun laporan neraca. Selanjutnya membuat laporan perubahan Modal, pada tahap ini CV SK tidak membuat laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan. Setelah mengetahui penyusunan laporan keuangan CV SK, Team KAP melakukan *Accounting Service* atau pembenaran pada laporan keuangan dari awal penyusunan sampai menjadi laporan keuangan karena laporan keuangan CV SK masih belum sesuai dengan SAK ETAP.

Dalam menyusun laporan keuangan CV SK Team KAP menggunakan Aplikasi *Microsoft Excel* dengan tahapan-tahapan yang dilakukan team KAP. *Tahap pertama, Tahap Transaksi (Transaksi Internal dan Eksternal).* Pada tahap ini Team KAP meminta bukti-bukti transaksi dan daftar akun yang dimiliki oleh CV SK selama berjalannya aktivitas perusahaan dan menganalisa dan mengidentifikasi

atas bukti transaksi tersebut. *Tahap kedua, Tahap Pencatatan.* Team KAP melakukan pembukuan atau menjurnal semua kegiatan atau transaksi-transaksi yang dilakukan selama setahun ke dalam Aplikasi excel.

Tahap ketiga, Tahap Penggolongan. Setelah melakukan tahap pencatatan langkah selanjutnya adalah melakukan posting. Posting adalah aktivitas memindahkan catatan di buku jurnal ke dalam buku besar sesuai dengan jenis transaksi dan nama akun masing-masing. Pada tahap ini karna Team KAP menggunakan aplikasi *Microsoft Excel* maka buku besar sudah langsung ter-link setelah melakukan penjurnalan dari bukti-bukti yang sudah di jurnal sebelumnya. Sedangkan untuk buku besar pembantu karena CV SK tidak membuat buku besar pembantu maka Team KAP membuat buku besar pembantu agar dapat mengetahui transaksi-transaksi yang telah terjadi secara lebih detail. Team KAP membuat buku besar pembantu Piutang Penjualan, Hutang Dagang, dan Persediaan. *Tahap keempat, Tahap Pengikhtisaran.* Setelah melakukan tahap penggolongan yaitu mem-posting buku jurnal umum ke buku besar, langkah

selanjutnya adalah membuat neraca saldo. Neraca saldo adalah daftar akun-akun beserta saldonya pada suatu waktu tertentu. Biasanya, neraca saldo dibuat pada akhir periode akuntansi. Menyusun Ayat Jurnal Penyesuaian. Setelah semua ayat jurnal penyesuaian dibuat dan di posting ke buku besar, maka neraca saldo dibuat dari akun-akun buku besar dan dinamakan neraca saldo telah disesuaikan. Pada tahap ini karna Team KAP menggunakan aplikasi excel maka neraca saldo disesuaikan sudah langsung ter-link setelah melakukan posting buku jurnal umum ke buku besar.

Tahap kelima, Tahap Pelaporan Keuangan. Laporan keuangan yang disusun pertama kali adalah laporan neraca, yang terdiri dari Asset lancar, Asset tidak lancar, Liabilitas jangka pendek dan Ekuitas. Laporan keuangan yang kedua adalah laporan laba rugi, yang terdiri dari Pendapatan, Beban, dan Pendapatan (Beban) lain. Pada tahap ini karena Team KAP menggunakan aplikasi excel, maka semua laporan tersebut sudah ter-link setelah membuat Neraca Saldo. Satu siklus akuntansi terdiri dari banyak fungsi yang dilakukan dalam rangka mengolah transaksi menjadi informasi keuangan. Dapat dibandingkan antara

siklus akuntansi CV SK dan siklus akuntansi yang terdapat dalam SAK ETAP memiliki perbedaan, yaitu CV SK tidak membuat buku besar dan buku besar pembantu. CV SK tidak membuat laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan. Kendala yang dihadapi dalam menyusun laporan keuangan CV SK.

Berikut adalah kendala pada saat melakukan penyusunan laporan keuangan pada CV SK yakni kesulitan pertama adalah pembukuan CV SK tidak lengkap, seperti tidak adanya buku pembantu kas dan setara kas, Piutang, dan Hutang. Sehingga dalam melakukan penjurnalan Team KAP harus melihat dari bukti-bukti transaksi seperti faktur penjualan, faktur pembelian, nota kredit, nota debit, bond pembelian barang, bukti pengeluaran kas kecil, besar, dan konsumen.

Kesulitan kedua adalah pada pencatatan CV SK ada beberapa akun-akun yang memiliki perlakuan yang tidak sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku dan yang dipelajari penulis di bangku perkuliahan. Seperti perlakuan akun kasbon, dan Piutang lain-lain terkait dengan deposit. Penyajian Laporan Keuangan CV SK menurut SAK ETAP. Pada pembahasan kali ini penulis membatasi Laporan Keuangan CV SK

hanya pada Laporan Neraca dan Laba Rugi. Berikut adalah laporan keuangan yang telah dibuat oleh CV SK. *Laporan Neraca*, Neraca digunakan untuk menilai likuiditas, solvabilitas, dan fleksibilitas keuangan perusahaan. Neraca menyajikan Asset, Kewajiban, dan Ekuitas suatu entitas pada suatu tanggal tertentu akhir periode pelaporan. Neraca dikatakan seimbang apabila harta perusahaan atau Asset jumlahnya sama dengan jumlah Utang ditambah Modal ($\text{harta} = \text{Utang} + \text{Modal}$).

Laporan Laba Rugi. Laporan laba rugi adalah laporan yang mengukur keberhasilan operasi perusahaan selama periode tertentu. Dalam laporan laba rugi CV SK terdiri dari Pendapatan penjualan, HPP Produksi, HPP service dan dekor, persediaan bahan baku, Biaya operasi dan Pendapatan dan Beban lain. Kebijakan Akuntansi CV SK. *Dasar Penyusunan Laporan Keuangan*, Pencatatan transaksi keuangan perusahaan disusun berdasarkan konsep harga perolehan (*historical cost*) dan *accrual basic method*. Dengan demikian dalam laporan keuangan ini tidak memperhatikan perubahan pada nilai sekarang (*current value*) dari Aktiva- Aktiva tidak lancar perusahaan. *Kas dan*

Setara Kas, Kas merupakan alat pembayaran yang siap dan bebas dipergunakan untuk membiayai kegiatan perusahaan, deposito berjangka yang akan jatuh tempo dalam waktu 3 bulan atau kurang dari tanggal perolehannya diklasifikasikan sebagai setara kas, begitu juga saldo rekening giro atau uang tunai yang dalam brankas diklasifikasikan setara kas. Piutang, Perusahaan tidak mencadangkan piutang tidak tertagih disebabkan manajemen berkeyakinan bahwa semua Piutang dapat tertagih. Piutang dihapuskan pada saat Piutang tersebut dipastikan tidak dapat ditagih lagi.

Persediaan, Harga perolehan barang jadi ditentukan dengan metode periodik. Harga perolehan barang penunjang ditentukan dengan metode rata-rata bergerak. Penyisihan untuk penurunan nilai persediaan ditentukan berdasarkan penelaahan terhadap keadaan persediaan. Aktiva Tetap, Aktiva tetap diakui sebesar harga perolehan setelah dikurangi dengan akumulasi penyusutan. Semua Aktiva tetap disusutkan dengan menggunakan metode saldo garis lurus, selama masa

manfaatnya. Gedung (20 tahun), peralatan (4 tahun), kendaraan (8 tahun), dan Inventaris (4 tahun). Biaya pemeliharaan rutin dan pemakaian di bebaskan pada laporan laba rugi pada saat terjadinya pengeluaran dalam jumlah yang signifikan, dan yang meningkatkan manfaat Aktiva tetap. Apabila Aktiva tetap tidak dipergunakan lagi atau dijual, maka nilai tercatat dan akumulasi penyusutannya dikeluarkan dari laporan keuangan dan keuntungan atau kerugian yang dihasilkan diakui dalam laporan laba rugi pada tahun bersangkutan. Pendapatan dan Beban. Pendapatan penjualan diakui sebagai Pendapatan pada saat dilakukan penyerahan/ pengiriman barang kepada konsumen, sedangkan Beban diakui sesuai dengan masa manfaatnya (*accrual basis*) pada periode yang bersangkutan. Penyajian laporan keuangan menurut SAK ETAP (2016).

Pajak Penghasilan. Taksiran pajak penghasilan belum ditentukan berdasarkan taksiran laba kena pajak untuk tahun yang bersangkutan. Perusahaan tidak melakukan penangguhan pajak atas perbedaan waktu pengakuan Pendapatan dan Beban antara laporan keuangan untuk tujuan komersial dan pajak. Penyajian Laporan Keuangan CV SK berdasarkan SAK ETAP Laporan

keuangan Neraca. Berikut adalah penjelasan dari informasi-informasi yang disajikan dalam laporan neraca menurut SAK ETAP yakni pada Aset CV SK yang dilaporkan belum memenuhi sebagian besar ketentuan SAK ETAP. Untuk penyajian Aset, dikarenakan Akun Kasbon. Akun Kasbon yang dimaksud CV SK merupakan kas sementara yang dikeluarkan untuk karyawan dalam menjalankan kegiatan operasional perusahaan dan harus direalisasi dikemudian hari.

Sedangkan pengertian yang sebenarnya akun kasbon ialah pinjaman pribadi untuk karyawan dengan memotong gaji karyawan setiap bulannya. Oleh karena itu Team KAP menyarankan untuk mengganti nama akun kasbon ini menjadi Kas Advance. Dan Jangka waktu realisasi Kas Advance maksimal 7 hari setelah realisasi agar controlling mudah dilakukan. Perlakuan Piutang lain-lain terkait deposit gedung, karena pencatatan yang dilakukan sangat rumit dan memungkinkan terjadinya overstated (double pencatatan). Menurut SAK ETAP Piutang lain-lain yang terkait dengan deposit gedung seharusnya masuk ke akun deposit gedung. Tetapi pada pencatatan CV SK Piutang lain-lain terkait deposit

gedung dimasukkan di akun Piutang lain-lain. Oleh karena itu CV SK disarankan untuk memisahkan akun "Piutang lain-lain" yang berkaitan dengan deposit gedung. Aktiva tetap yang disajikan dalam laporan keuangan CV SK belum sesuai dengan SAK ETAP karena tidak adanya rincian Aktiva tetap yang lengkap seperti: tanggal perolehan yang sesungguhnya, akumulasi penyusutannya masih ada yang tidak disesuaikan pada beberapa bulan tahun berjalan.

Oleh karena itu *Team* KAP membuat daftar rincian penyusutan Aktiva Tetap yang lengkap terdiri dari Harga Perolehan, Tanggal perolehan, Masa Manfaat dan metode akuntansi keuangan penyusutan yang sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku umum. Sehingga alokasi pembebanan Aktiva Tetap setiap tahunnya di *posting* dengan wajar ke dalam jurnal. Pada kewajiban CV SK yang dilaporkan sudah memenuhi sebagian besar ketentuan SAK ETAP untuk penyajian Kewajiban, akan tetapi untuk Kewajiban CV SK karena Hutang dibagi menjadi 3 yaitu Hutang dagang, Hutang sewa peralatan service, Hutang sewa pelatan dekor. Maka *Team* KAP memutuskan untuk menggabungkan ke

tiga Hutang tersebut menjadi Hutang dagang agar tidak terjadi kesalahan pencatatan atau double catat pada saat melakukan penjurnalan seperti tahun-tahun sebelumnya. Laporan Laba Rugi Menurut SAK ETAP, laporan laba rugi minimal mencakup pos Pendapatan, Beban keuangan, bagian laba atau rugi dari investasi yang menggunakan metode Ekuitas, Beban Pajak dan laba atau rugi neto. Penyajian Laporan Laba Rugi pada CV SK telah berdasarkan Standar Akuntansi yang berlaku. Pada SAK ETAP (2016) pengklasifikasian Beban dalam laporan laba rugi disajikan dengan menggunakan dua metode yaitu metode berdasarkan sifat Beban dan metode berdasarkan fungsi Beban.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pengolahan data yang telah dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan bahwa CV SK belum menyusun laporan keuangan lengkap menurut SAK ETAP. Dari semua siklus akuntansi, CV SK hanya menerapkan sebagian dalam penyusunan laporan keuangan. CV SK tidak membuat buku besar dan buku besar pembantu, serta tidak membuat laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan. Hal ini

Berdasarkan SAK ETAP yang menyatakan laporan keuangan lengkap terdiri atas Neraca, Laporan Laba Rugi, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan. Masalah-masalah yang dihadapi dalam menyusun laporan keuangan CV SK diantaranya adalah kurangnya pembukuan CV SK seperti buku pembantu Piutang, Hutang, dan Persediaan. Sehingga dalam proses penyusunan laporan keuangan ini sedikit memperlambat proses pengerjaan, karena *Team* KAP harus melihat dari bukti-bukti transaksi. Penyajian laporan keuangan CV SK sepenuhnya masih belum sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku umum karena pada laporan neraca CV SK ini belum disusun berdasarkan SAK ETAP. Khususnya Aset CV SK yang dilaporkan belum sesuai dengan penyajian yang ada di SAK ETAP, yaitu seperti penyajian akun kasbon, Perlakuan Piutang lain-lain terkait deposit gedung, dan Aktiva tetap. Sedangkan untuk penyajian laporan laba rugi CV SK sudah sesuai dengan SAK ETAP.

REFERENSI

Dwi, Martani., dkk. (2012). *Akuntansi*

Keuangan Menengah Berbasis

PSAK Buku 1. Jakarta: Salemba Empat.

Ikatan Akuntan Indonesia.(2017). *Standar Akuntansi Keuangan*. Jakarta: Salemba Empat.

(2016). *Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik*. Jakarta: Salemba Empat.

Kasmir. (2013). *Analisis Laporan Keuangan*. Edisi 1. Jakarta: Raja Grafindo.

Kieso, Donald E, Jerry J. Weygandt, Terry D. Warfield. (2011). *Akuntansi Intermediate*. Edisi Ketujuhbelas. Jilid Dua. Diterjemahkan oleh Emil Salim. Jakarta: Erlangga.P

Puspitawati Lilis, Sri Dewi Anggadini. (2011). *Sistem Informasi Akuntansi*. Yogyakarta: Graha ilmu.

Romney, Marshal B dan Paul John Steinbart. (2014). *Sistem Informasi Akuntansi*, Edisi ketiga belas, Diterjemahkan oleh: Kikin Sakinah, Nur Safira dan Novita Puspasari. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.

Rudianto.(2012). *Pengantar Akuntansi Konsep dan Teknik Penyusunan Laporan Keuangan*. Jakarta: Penerbit Erlangga.

Ryan Ariefiansyah dan Miyosi Margi Utami.(2013). *Membuat Laporan*

Keuangan Gampang Untuk Pemula dan Orang Awam. Jakarta Timur: Dunia Cerdas.

Soemarso.(2009). *Akuntansi Suatu Pengantar.*Buku ke 2.Edisi 5.

Jakarta: Salemba Empat.

T. Harrison Jr, Walter, T. Hongren, Charles, Thomas, C. William, Suwardy, Themin. (2012).

Akuntansi Keuangan. Edisi Kedelapan. Erlangga.

Warren, James M Reeves & Jonathan E. Duchac.(2010). *Pengantar Akuntansi Adaptasi Indonesia.* Edisi 25 .Jakarta : Salemba Empat.

Nama Penulis Utama :

Alamat Penulis :

Telp/Fax :

Email :

Nama Penulis :

Judul Artikel :

.....

1. Kami mengirimkan artikel pada Agregat: Jurnal Ekonomi dan Bisnis, kami memastikan bahwa artikel yang kami kirimkan belum pernah dipublikasikan sebelumnya atau sedang dalam proses penelahaan pada jurnal lain atau mengandung materi yang melanggar hak cipta kepada orang atau entitas lain.
2. Kami menyetujui untuk mengalihkan hak cipta kepada Agregat: Jurnal Ekonomi dan Bisnis sebagai penerbit artikel ini dengan judul artikel yang tersebut di atas.

Demikian pernyataan ini kami buat, apabila terjadi pelanggaran hak cipta terkait artikel ini, maka kami siap untuk menerima sanksi sesuai prosedur yang berlaku.

Tanggal:.....

Tanda Tangan

.....

(Jika ada lebih dari satu penulis, cukup penulis pertama yang menandatangani)

PETUNJUK PENULISAN

1. PETUNJUK UMUM

- a. Naskah merupakan ringkasan hasil
- b. Naskah sudah ditulis dalam bentuk format word yang sudah jadi dan siap cetak sesuai dengan template yang disediakan. Template tentang tata cara penulisan artikel dapat diunduh di laman
- c. Ukuran file word naskah maksimal 5MB.
- d. Naskah ditulis dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris dengan huruf Time New Roman font 12. Panjang naskah sekitar 15–20 halaman dan diketik 1,5 spasi.
- e. Naskah dalam format pdf diunggah ke laman.....
- f. Seting halaman adalah 2 kolom dengan equal with coloumn dan jarak antar kolom 5 mm, sedangkan Judul, Identitas Penulis, dan Abstract ditulis dalam 1 kolom.
- g. Ukuran kertas adalah A4 dengan lebar batas-batas tepi (margin) adalah 3,5 cm untuk batas atas, bawah dan kiri, sedang kanan adalah 2,0 cm.
- h. Naskah merupakan ringkasan hasil
- i. Naskah sudah ditulis dalam bentuk format word yang sudah jadi dan siap cetak sesuai dengan template yang disediakan. Template tentang tata cara penulisan artikel dapat diunduh di laman
- j. Ukuran file word naskah maksimal 5MB.
- k. Naskah ditulis dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris dengan huruf Time New Roman font 11. Panjang naskah sekitar 15–20 halaman dan diketik 1,5 spasi.
- l. Naskah dalam format pdf diunggah ke laman.....
- m. Seting halaman adalah 2 kolom dengan equal with coloumn dan jarak antar kolom 5 mm, sedangkan Judul, Identitas Penulis, dan Abstract ditulis dalam 1 kolom.
- n. Ukuran kertas adalah A4 dengan lebar batas-batas tepi (margin) adalah 3,5 cm untuk batas atas, bawah dan kiri, sedang kanan adalah 2,0 cm.

2. SISTIMATIKA PENULISAN

- a. Bagian awal : judul, nama penulis, abstraksi.
- b. Bagian utama : berisi pendahuluan, metode, hasil dan pembahasan, dan simpulan dan saran (jika ada).
- c. Bagian akhir : ucapan terima kasih (jika ada), keterangan simbol (jika ada), dan daftar pustaka.

3. JUDUL DAN NAMAPENULIS

- a. Judul dicetak dengan huruf besar/kapital, dicetak tebal (bold) dengan jenis huruf Times New Roman font 12, spasi tunggal dengan jumlah kata maksimum 15.
- b. Nama penulis ditulis di bawah judul tanpa gelar, tidak boleh disingkat, diawali dengan huruf kapital, tanpa diawali dengan kata "oleh", urutan penulis adalah penulis pertama diikuti oleh penulis kedua, ketiga dan seterusnya.
- c. Nama perguruan tinggi dan alamat surel (email) semua penulis ditulis di bawah nama penulis dengan huruf Times New Roman font 11.

4. ABSTRACT

- a. Abstract ditulis dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia, berisi tentang inti permasalahan/latar belakang, cara pemecahan masalah, dan hasil yang diperoleh. Kata abstract dicetak tebal (bold).
- b. Jumlah kata dalam abstract tidak lebih dari 250 kata dan diketik 1 spasi.
- c. Jenis huruf abstract adalah Times New Roman font 11, disajikan dengan rata kiri dan rata kanan, disajikan dalam satu paragraph, dan ditulis tanpa menjorok (indent) pada awal kalimat.
- d. Abstract dilengkapi dengan Keywords yang terdiri atas 3-5 kata yang menjadi inti dari uraian abstraksi. Kata Keywords dicetak tebal (bold).

5. ATURAN UMUM PENULISANNASKAH

Setiap sub judul ditulis dengan huruf Times New Roman font 11 dan dicetak tebal (bold).

- a. Alinea baru ditulis menjorok dengan indent-first line 0,75 cm, antar alinea tidak diberi spasi.
- b. Kata asing ditulis dengan huruf miring.
- c. Semua bilangan ditulis dengan angka, kecuali pada awal kalimat dan bilangan bulat yang kurang dari sepuluh harus dieja.
- d. Tabel dan gambar harus diberi keterangan yang jelas, dan diberi nomor urut.

6. REFERENSI

Penulisan pustaka menggunakan sistem Apa Style. Semua yang tertera dalam daftar pustaka harus dirujuk di dalam naskah. Kemutakhiran referensi sangat diutamakan. Penulisan naskah dan sitasi yang diacu dalam naskah ini disarankan menggunakan aplikasi referensi (reference manager) seperti Mendeley, Zotero, Reffwork, Endnote dan lain-lain.

A. Buku

[1] Penulis 1, Penulis 2 dst. (Nama belakang, nama depan disingkat). Tahun publikasi. Judul Buku cetak miring. Edisi, Penerbit. Tempat Publikasi.

Contoh:

O'Brien, J.A. dan J.M. Marakas. (2011). Management Information Systems. Edisi 10. McGraw-Hill. New York-USA.

B. Artikel Jurnal

[2] Penulis 1, Penulis 2 dan seterusnya, (Nama belakang, nama depan disingkat). Tahun publikasi. Judul artikel. Nama Jurnal Cetak Miring. Vol. Nomor. Rentang Halaman.

Contoh:

Cartlidge, J. (2012). Crossing boundaries: Using fact and fiction in adult learning. The Journal of Artistic and Creative Education. 6 (1): 94-111.

C. Prosiding Seminar/Konferensi

[3] Penulis 1, Penulis 2 dst, (Nama belakang, nama depan disingkat). Tahun publikasi. Judul artikel. Nama Konferensi. Tanggal, Bulan dan Tahun, Kota, Negara. Halaman.

Contoh:

Michael, R. (2011). Integrating innovation into enterprise architecture management. Proceeding on Tenth International Conference on Wirt-schafts Informatik. 16-18 February (2011), Zurich, Swis. Hal. 776-786.

D. Tesis atau Disertasi

[4] Penulis (Nama belakang, nama depan disingkat). Tahun publikasi. Judul. Skripsi, Tesis, atau Disertasi. Universitas.

Contoh:

Soegandhi. (2009). Aplikasi model kebangkrutan pada perusahaan daerah di Jawa Timur. Tesis. Fakultas Ekonomi Universitas Joyonegoro, Surabaya.

E. Sumber Rujukan dari Website

[5] Penulis. Tahun. Judul. Alamat Uniform Resources Locator (URL). Tanggal Diakses.

Contoh:

Ahmed, S. dan A. Zlate. (2013) Capital flows to emerging market economies: A brave new world?. <http://www.federalreserve.gov/pubs/ifdp/2013/1081/ifdp1081.pdf>. Diakses tanggal 18 Juni 2013.

Petunjuk Penulisan, silahkan download disini

Diterbitkan oleh :
Fakultas Ekonomi & Bisnis Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA
Jl. Raya Bogor KM. 23, No. 99. Flyover Pasar Rebo Jakarta Timur 13830
Telp : 021 - 87796977, Fax : 021 - 87796977
Email : agregat@uhamka.ac.id
<http://journal.uhamka.ac.id/index.php/agregat/index>

